

# **MODERNISASI PERTANIAN: PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**



I Ketut Gede Arta | I Ketut Suda | Ida Bagus Dharmika

**UNHI PRESS**  
**2020**



# **MODERNISASI PERTANIAN: PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

Oleh  
**I Ketut Gede Arta  
I Ketut Suda  
Ida Bagus Dharmika**

EDITOR  
**I Putu Sanjaya**



**UNHI PRESS**

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

Penulis : I Ketut Gede Arta  
I Ketut Suda  
Ida Bagus Dharmika  
ISBN : 978-623-7963-19-6  
Editor : **I Putu Sanjaya**  
Penyunting : **Ida Bagus Putu Eka Suadnyana**  
Desain Sampul dan Tata Letak : I Wayan Wahyudi

Penerbit : UNHI Press  
Redaksi : Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar -Bali Telp.  
(0361) 464700/464800 Email : unhipress@unhi.ac.id

Distributor Tunggal :  
UNHI Press  
Jl. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar-Bali  
Telp. (0361) 464700/464800  
Email : unhipress@unhi.ac.id

Cetakan pertama, Oktober 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# Kata Pengantar

*Om Swastyastu,*

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Hyang Widhi Wasa*) karena atas *asung waranugraha*-Nya, buku kecil yang berjudul “Modernisasi Pertanian: Perubahan Sosial, Budaya, dan Agama ini dapat diselesaikan walaupun dengan penuh perjuangan. Buku kecil ini secara garis besar mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran budaya pada subak abian di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, proses terjadinya perubahan budaya, dan implikasinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, keagamaan, dan juga terhadap sistem kekerabatan masyarakat bersangkutan. Buku kecil ini merupakan hasil penelitian disertasi yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan format penulisan buku. Dalam proses penyelesaian buku ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bantuan moral maupun material.

Untuk itu melalui kesempatan yang baik ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pertama-tama kepada Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Bapak Dr. Tri Handoko Seto, S.Si, M.Sc, yang telah berkenan membiayai penerbitan buku ini, Prof. Dr. Fil I Ketut Ardhana, M.A selaku Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang telah memberikan dorongan, baik moral maupun material atas

terbitnya buku kecil ini. Ucapan dan doa serupa penulis juga sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. drh., I Made Damriyasa, M.S beserta jajarannya atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian buku kecil ini.

Demikian pula terima kasih yang tulus penulis sampaikan pula kepada semua pihak yang ikut memberikan bantuan, baik berupa dorongan moral maupun material, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Hyang Widhi Wasa*) memberikan balasan atas amal baik bapak/ibu yang telah berkontribusi terhadap terbitnya buku kecil ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih sangat jauh dari apa yang disebut sempurna, namun demikian dengan kerendahan hati penulis hantarkan juga buku kecil ini ke hadapan sidang pembaca dengan harapan mendapat saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan buku ini.

***Om Santih, Santih, Santih, Om***

Denpasar, Oktober 2020

Penulis

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	iii
DAFTAR ISI-----	v
DAFTAR TABEL -----	vii
DAFTAR BAGAN -----	ix
DAFTAR GAMBAR -----	x
GLOSARIUM -----	xi
BAB I      PENDAHULUAN -----	1
BAB II     PEMETAAN HASIL-HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA -----	5
BAB III    PEMAHAMAN TEORITIK: MODERISASI DAN PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN SOSIOBUDAYA SUBAK ABIAN -----	17
A.    Moderisasi -----	17
B.    Perubahan Sosiokultur dan Respon Masyarakat atas Perubahan yang Terjadi -----	20
BAB IV    FENOMENA KECAMATAN PEKUTATAN -----	28
4.1   Sejarah Singkat Kecamatan Pekutatan -	28
4.2   Keadaan Geografis Kecamatan Pekutatan -----	30
4.3.   Demografis Kecamatan Pekutatan -----	34
4.2.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur -----	35

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

4.2.2	Keadaan Penduduk Menurut Agama -----	36
4.2.3	Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan -----	37
4.3	Desa Adat dan Desa Dinas -----	38

<b>BAB V</b>	<b>PENYEBAB TERJADINYA PERGESERAN BUDAYA PERTANIAN SUBAK ABIAN DI KECAMATAN PEKUTATAN, KABUPATEN JEMBRANA</b> -----	<b>46</b>
5.1	Faktor Modernisme -----	46
5.2	Faktor Ideologis -----	58
5.3	Perkembangan Jaman dari Pra-Modern Menuju Era Modernisasi-----	67
5.4	Faktor Orientasi Pembangunan Ekonomi -----	79
5.5	Faktor Pengetahuan dan Teknologi ----	86

<b>BAB VI</b>	<b>PERUBAHAN BUDAYA PERTANIAN SUBAK ABIAN DI KECAMATAN PEKUTATAN, KABUPATEN JEMBRANA</b> -----	<b>95</b>
6.1	Perubahan Imprastruktur Material -----	95
6.1.1	Terjadinya Perubahan Teknologi	95
6.1.2	Perubahan Aspek Ekonomi -----	100
6.1.3	Perubahan Ekologi -----	105
6.1.4	Perubahan Demografi -----	113
6.2	Perubahan pada Aspek Struktur Sosial	123
6.2.1	Perubahan pada Aspek Struktur Sosial -----	124
6.2.2	Perubahan Sistem Kepolitikan ---	130



**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

6.2.3	Pembagian Kerja dan Ketidaksamaan secara Seksual ---	134
6.2.4	Perubahan bidang Pendidikan ----	141
6.3	Perubahan pada Aspek Superstruktur Ideologis -----	145
6.3.1	Perubahan pada Ideologi Umum -	145
6.3.2	Perubahan pada Kehidupan Keagamaan -----	151
6.3.3	Perubahan pada Aspek Ilmu Pengetahuan -----	157
6.3.4	Perubahan Menyangkut Kesenian dan Kesusastraan -----	162
BAB VII	IMPLIKASI TERJADINYA PERGESERAN BUDAYA PERTANIAN SUBAK ABIAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI, DAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI KECAMATAN PEKUTATAN -----	168
7.1	Implikasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat -----	168
7.2	Implikasi terhadap Kehidupan Ekonomi -----	174
7.3	Implikasi terhadap Kehidupan Keagamaan -----	178
7.4	Implikasi terhadap Sistem Kekarabatan -----	185
BAB VIII	PENUTUP -----	189
DAFTAR PUSTAKA -----		193

## Daftar Tabel

Tabel 4.1	Jumlah KK dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Pekutatan Tahun 2015 --	60
Tabel 4.2	Jumlah Pendudukan Kecamatan Pekutatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2017—2018 -----	62

## Daftar Bagan

Bagan 4.1	Struktur Prajuru Desa Adat -----	43
Bagan 4.2.	Struktur Pemerintahan Desa Dinas -----	45

## Daftar Gambar

Gambar 4.1	Pola usaha tani dengan system tumpeng sari -----	33
Gambar 5.1	Tanaman pisang di sela-sela tanaman kopi, milik petani subak abian di Desa Badingkayu, Pekutatan, Jembrana -----	52
Gambar 5.2	Gambar pacul dan traktor yang mempunyai fungsi untuk menggemburkan tanah pertanian -----	65
Gamabr. 5.3	Bapak Camat Pekutatan saat memberikan arahan kepada Kepala Desa dan Kelihan Subak se Kecamatan Pekutatan sebelum wawancara kepada masing-masing informan dilakaukan -----	72
Gambar 5.5	Kepala Desa Medewi, sesaat setelah diwawancarai di Kantor Camat Pekutatan -	77
Gambar 5.6	Jenis tanaman keras yang dibudi dayakan para petani di Subak Abian Kecamatan Pekutatan, Kab. Jembrana -----	80
Gambar 5.7	Tanaman manggis yang ditanam di sela-sela pohon kopi di Subak Abian Badingkayu, Kec. Pekuatan, Jembrana-----	80

## Glosarium

<i>Abian</i>	: pertanian lahan kering
<i>adharma</i>	: sikap yang tidak benar
<i>adiluhung</i>	: mempunyai nilai yang sangat tinggi
agama pasar	: keyakinan masyarakat akan kemampuan pasar untuk menjamin keselamatan hidup manusia, karena segala kebutuhan manusia seakan dapat dipenuhi lewat pasar
<i>anggapan</i>	: alat tradisional untuk memanen padi (ani-ani)
<i>anggar kasih</i>	: hari suci umat Hindu yang merupakan pertemuan antara anggare (bagian dari <i>sapta wara</i> ) dengan hari <i>kliwon</i> (bagian dari panca wara)
<i>aungan</i>	: trowongan untuk saluran irigasi tradisional
<i>Asta Kosala-Kosali-Asta Bumi</i>	: judul buku pegangan para undagi dalam membuat sebuah bangunan menurut perhitungan Bali
<i>bendesa adat</i>	: ketua organisasi sosial (desa) pada masyarakat Bali
<i>banten</i>	: sarana upacara yang sering juga disebut <i>upakara</i>
ber-yadnya	: melakukan korban suci

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

<i>Betara Rambut Sedana</i>	: nama dewa dalam manifestasinya sebagai penguasa uang
<i>biyukukung</i>	: upacara yang dilakukan oleh petani atas padi yang ditanamnya di sawah menjelang tanaman padi itu berbuah
<i>budaya rungu</i>	: kepedulian sosial kepada tetangga atau kepada orang lain
<i>busung</i>	: janur atau daun kelapa muda
<i>catur angga batukaru</i>	: empat keanggotaan subak yang berada di kawasan gunung batu karu yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya
<i>dadia</i>	: kumpulan beberapa keluarga inti yang masih dalam satu garis keturunan dan terikat oleh <i>merajan gede</i>
<i>desa, kala, dan patra</i>	: tempat, waktu, dan keadaan
<i>desa adat</i>	: organisasi sosial tradisional masyarakat Bali yang mengurus urusan adat dan agama dan membawahi beberapa <i>banjar adat</i>
<i>dewa nyalantara</i>	: dewa yang berwujud manusia
<i>Dewi Melanting</i>	: nama dewa yang menurut umat Hindu sebagai penguasa Pasar
<i>dharma</i>	: kebenaran
<i>dhana-bhakti</i>	: sikap hormat dan pengabdian yang tinggi
dualisme dikotomik	: masyarakat membuat pemilahan yang berlawanan satu dengan yang lainnya

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

- futurisme* : alam konteks spritualisme modern memiliki kecenderungan menggali hampir semua makna masa kini dalam hubungannya dengan masa depan yang dalam praktiknya melupakan masa lalu, atau selalu menjalin keterikatan dengan segala sesuatu yang baru
- gender* : atribut yang diberikan kepada seseorang yang dikonstruksi berdasarkan kebudayaan manusia
- hari raya galungan dan kuningan* : hari suci agama Hindu yang jatuhnya setiap enam bulan sekali
- homo socius* : esensi manusia sebagai mahluk sosial
- homo economicus* : esensi manusia sebagai mahluk ekonomi
- jero mangku kahyangan tiga* : *pinandita* yang khusus bertugas pada *khayangan tiga* (*pura puseh, dalam dan bale agung*)
- jero mangku pura subak* : *pinandita* yang khusus bertugas di pura subak (*pura bedugul*)
- juru raksa* : bendahara desa adat yang bertugas melakukan administrasi keuangan dan inventarisasi kekayaan *desa adat*
- kahyangan tiga* : tiga jenis kayangan yang mengikat karma *desa adat*, yakni *pura desa, pura puseh, dan pura dalem*

MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA

- kajeng keliwon* : hari suci agama Hindu yang merupakan pertemuan antara hari *kajeng* (bagian dari *tri wara*) dengan *kliwon* bagian dari *panca wara*
- kama* : bagian dari ajaran *catur purusa artha*, yang artinya hawa nafsu
- karma phala* : hukum perbuatan, dalam arti apapun bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang pada akhirnya dia akan memetik hasil dari perbuatan yang dilakukan
- kelihan banjar adat* : kepala banjar adat yang bertugas mengkoordinir berbagai aktivitas di tingkat banjar adat
- kelian subak* : ketua organisasi subak
- krama desa* : anggota organisasi *desa adat* yang terikat kewajiban *nyunusung kayangan tiga*
- krama banjar adat* : anggota *banjar adat* yang berada di bawah naungan *desa adat*
- krama subak* : anggota organisasi subak
- kuren* : keluarga inti pada masyarakat Bali yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang lahir dalam keluarga tersebut
- local genius* : nilai-nilai kearifan lokal
- mantenin padi* di lumbung : melakukan upacara terhadap padi yang telah dimasukan di lumbung dan memohon doa kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri agar persiapan padi



MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA

- yang dimilikipetani cukup sampai masa panen berikutnya
- mati iba hidup kae* : prinsip hidup yang mengutamakan kehidupan sendiri dalam arti yang penting saya hidup biarlah orang lain mati
- matriarchate* : sistem kekerabatan yang memperhitungkan garis keturunan dari ibu menurut garis lurus
- matulungan* : membantu teman, tetangga, atau kerabat secara suka rela tanpa imbalan dan bentuk uang
- McDonaldisasi* : prinsip hidup yang diterapkan restoran waralaba dengan prinsip cepat saja (instan)
- medana punia* : menyumbangkan sejumlah uang secara tulus ikhlas untuk kepentingan *desa adat* atau *banajar adat*
- mekepung* : karapan sapi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Jembrana dengan tujuan hiburan
- melaspas* : upacara penyucian bangunan, baik rumah maupun pura/pemerajan, dan fasilitas umum lainnya.
- menyame beraya* : sifat persaudaraan
- mepandes* : upacara potong gigi bagi remaja Hindu menjelang akil balig
- meselisi* : bertukar tenaga, untuk mengerjakan suatu pekerjaan di

MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA

	desa atau di subak, karena kesibukan dan kemudian akan diganti dengan stem tukar nega
<i>nanhluk merana</i>	: upacara yang diselenggarakan oleh para petani untuk mengusir hama tanaman
<i>ngalap cengkeh</i>	: memetik buah cengkeh
<i>ngalap duren</i>	: memetik buah durian
<i>ngalap manggis</i>	: memetik buah manggis
<i>ngayah</i>	: menyumbangkan tenaga secara sukarela untuk kepentingan <i>desa adat</i> atau <i>banjar adat</i>
<i>nelubulanin</i>	: upacara tiga bulanan untuk bayi
<i>ngodalin</i>	: upacara ulang tahun pura atau <i>pemerajan</i>
<i>ngopin</i>	: membantu tetangga, kerabat, atau orang lain dalam hal pekerjaan tertentu tanpa bayaran
<i>ngorte</i>	: ngobrol sambil bertukar informasi
<i>ngotonin</i>	: upacara peringatan hari kelahiran yang jatuhnya setiap enam bulan (210 hari) sekali
<i>niskala</i>	: alam yang tidak nyata
<i>nyilih pipis</i>	: meminjam uang kepada tetangga atau kerabat, biasanya tanpa dikenai bunga
<i>pajeg</i>	: sistem penen dengan cara kontrak hasil pertanian yang masih dipohnya
<i>parental</i>	: sistem kekerabatan yang memperhitungkan, baik

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

	keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan
<i>patriarkhi</i>	: sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan laki-laki menurut garis lurus
<i>pecaruan</i>	: persembahan yang ditujukan untuk makhluk di bawah manusia ( <i>butha</i> )
<i>pederep</i>	: orang yang membantu memanen padi dengan imbalan padi
<i>penyarikan atau petajuh bandesa</i>	: wakil kepala desa adat yang bertugas membantu tugas-tugas kepala desa adat ( <i>bandesa adat</i> )
<i>pesangkepan</i>	: pertemuan rutin setiap bulan yang dilakukan, baik oleh <i>krama desa</i> maupun <i>karma subak</i> , untuk membahas berbagai permasalahan yang muncul dalam aktivitas desa atau subak menurut perhitungan bulan Bali
<i>pitra yadanya</i>	: korban suci yang ditujukan pada roh leluhur
<i>predana</i>	: status yang diberikan kepada anak perempuan dalam sistem kekerabatan pada masyarakat Hindu di Bali
<i>petani parekan</i>	: seseorang yang berprofesi sebagai petani sekaligus menjadi abdi kerajaan
<i>purnama</i>	: hari bulan penuh, dalam arti pada hari itu, bulan tampak penuh dari bumi

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

- purusa* : status yang diberikan kepada anak laki-laki pada sistem kekerabatan masyarakat Bali dan mempunyai kewajiban untuk meneruskan keturunan
- rasa jengah* : rasa malu jika seseorang tidak mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh tetangga, kerabat, atau andaitolan
- refleksivitas : praktik sosial yang terjadi secara terus-menerus, diuji, dan diubah berdasarkan informasi yang baru masuk, yang paling praktis.
- reringgitan* : sarana upacara yang terbuat dari daun kelapa
- revolusi hijau : upaya untuk mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional, menjadi pertanian yang berbasis teknologi modern.
- rwa bhineda* : dua hal yang berbeda yang diyakini oleh umat Hindu selalu menyelimuti kehidupan ini
- saling asah, asih, dan asuh* : hidup dalam kebersamaan, saling menyayangi dan saling membina satu sama lain
- samadhi* : upaya yang dilakukan seseorang untuk memusatkan pikiran untuk mencapai tujuan tertentu
- sangah (pemerajan)* : kuil keluarga tempat anggota keluarga untuk melakukan upacara keagamaan

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

- satua Bali* : cerita rakyat Bali
- sayan gede ombake sayan* : pepatah orang  
*gede masih angine* Bali yang artinya semakin besar pendapatan keluarga semakin besar pula pengeluarannya
- sedahan yeh* : salah satu lembaga di dalam sistem pemerintahan di Bali yang bertugas memungut pajak dari para petani pertanian basah (sawah)
- sedahan tembuku* : lembaga tradisional Bali yang bertugas memungut pajak yang dihitung berdasarkan pembagian air
- sedahan tukad* : lembaga tradisional Bali yang bertugas memungut pajak dari sistem pengairan yang bersumber pada air sungai
- sedahan tegal* : lembaga tradisional Bali yang bertugas memungut pajak dari sistem pertanian kering
- segalak-segilik, salung-lung*  
*sabayantaka, paras-paros*  
*sarpenaya* : hidup dalam kebersamaan dengan prinsip saling *asah, asih, dan asuh*.
- sekala* : alam nyata yang ditempati oleh manusia
- sekar rare, sekara alit,*  
*sekar madya, dan*  
*sekar agung* : pembagian tembang-tembang Bali, menurut jenis dan fungsinya

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

- sekhe arja* : perkumpulan orang-orang seni yang biasa memainkan tarian arja
- sekhe drama gong* : perkumpulan orang-orang seni yang biasa memainkan tarian drama gong
- sekhe janger* : perkumpulan orang-orang seni yang biasa memainkan tarian janger
- sekhe manyi* : perkumpulan petani yang menjalankan usaha memanen padi sawah
- sekhe numbeg* : perkumpulan anggota petani tradisional Bali yang mengambil usaha dalam bidang penyediaan jasa pengemburan lahan pertanian
- sekhe semal* : Perkumpulan petani tradisional Bali yang mengambil usaha dalam bidang penyediaan jasa pembasmi hama tupai
- sinoman* : orang yang ditunjuk untuk menyampaikan berbagai informasi terkait aktivitas yang dilakukan desa adat
- soroh* : penggolongan anggota masyarakat didasarkan atas merajan agung, misalnya soroh pasek gelgel, sorong pasek kayu selem, soroh brahmana mas, soroh brahman manuaba, dan lain-lain

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

- subak* : organisasi irigasi tradisional yang mengurus sistem pertanian di Bali
- subak abian* : organisasi irigasi tradisional Bali yang mengurus sistem pertanian tanaman kering
- survival of the fittes tilem* : siapa yang kuat dia yang menang  
: hari bulan mati, artinya pada hari itu posisi bumi, matahari, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bulan tidak kelihatan dari bumi
- top-down planning* : program pembangunan yang ide-idenya semua berasal dari atas (pimpinan)
- tri hita karana* : tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan
- tri wangsa* : penggolongan anggota masyarakat yang didasarkan atas tiga profesi, yakni brahmana, ksatria, dan wesia
- tumpek bubuh* : upacara yang dilaksanakan oleh petani untuk menyampaikan rasa syukur kehadapat Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewa Sangkara atas berbagai tumbuhan yang telah diciptakan-Nya untuk kesejahteraan umat manusia
- tumpek uye* : upacara yang dilaksanakan oleh petani untuk menyampaikan rasa syukur kehadapat Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

- sebagai Dewa Pasupati atas berbagai hewan piaraan yang telah diciptakan-Nya untuk kesejahteraan umat manusia
- upacara ngantukan nini* : upacara yang dilakukan para petani pasca panen dengan membawa segenggam padi untuk diupacarai sebelum penyimpanan padi di lumbung
- wangsa* : penggolongan masyarakat didasarkan atas garis keturunan
- wyapi wyapaka* : meresapi serta memenuhi segala-galanya di seluruh jagat raya ini
- Wipra* : para yogi atau para pertapa



# BAB I

## Pendahuluan

Pembangunan yang berlangsung di Indonesia, termasuk Bali meliputi berbagai bidang kehidupan, yakni kehidupan sosio-budaya, ekonomi, keagamaan, dan kehidupan bidang pertanian. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dalam Pembangunan Lima Tahun Pertama (1969—1974) pemerintah Orde Baru, sejak tahun 1969, telah menerapkan revolusi hijau, yakni sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

Menurut Fakih, (dalam Atmadja, 2010:11) revolusi hijau merupakan salah satu program industrialisasi, dan modernisasi pertanian, yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Artinya, dalam konteks pertanian segala sesuatu yang berbau tradisional harus diperbaharui menjadi sesuatu yang modern dengan pertimbangan agar produksi (hasil) pertanian dapat meningkat. Berangkat dari gagasan tersebut, maka segala bentuk teknologi hayati kimiawi dan teknologi mekanis harus digunakan dalam aktivitas pertanian. Hal ini

sejalan dengan gagasan Giddens (2005:43) yang menyatakan bahwa ketika masyarakat mengklaim dirinya sebagai masyarakat modern, maka ketika itu pula ia harus mengontraskan, bahkan membenturkan dirinya dengan hal-hal yang berbau tradisional.

Hal ini berpadanan pula dengan gagasan Rich, (1999:276) yang mengatakan bahwa pematjinalan, penenyapan, dan pergeseran hal-hal yang berbau tradisional di kalangan masyarakat, termasuk masyarakat Bali, berkaitan pula dengan prinsip reflektivitas, sebagai ciri dinamis masyarakat modern. Landasan filosofi dari perkembangan dunia modern adalah pengembangan institusi-institusi yang berbasis nilai-nilai efisien, ekonomis, efektif, dan pragmatis, melalui transformasi kultural, sehingga terbebas dari tradisi, adat, dan ikatan komunalisme. Seiring dengan arah perkembangan masyarakat seperti itu, maka di lingkungan masyarakat Bali, termasuk masyarakat subak pun akhirnya ikut mengalami pergeseran. Sebelum masuknya teknologi pertanian ke dalam kehidupan masyarakat subak di Bali, para generasi muda Bali telah didoktrinasi oleh para orang tuanya agar rajin-rajin bersekolah, sehingga kehidupannya di kemudian hari tidak semata-mata tergantung pada kehidupan di sektor pertanian. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara ideologi pada masyarakat Bali termasuk masyarakat subak, telah terjadi pergeseran ideologi dari ideologi pertanian ke ideologi jasa yang pada saat itu para orang tua menginginkan agar anak-anaknya bisa menjadi pegawai negeri, dengan harapan bisa memperbaiki taraf kehidupan mereka.

Berbicara pembangunan bidang pertanian, masyarakat Bali sebagian besar hidupnya tergantung dari kehidupan sektor pertanian, baik pertanian lahan basah (sawah) maupun pertanian lahan kering (ladang). Oleh karena itu, jenis tanaman

yang ditanam pun bermacam-macam, yakni untuk di wilayah subak basah jenis tanaman yang dibudidayakan adalah padi, palawija, dan sayur-mayur. Sedangkan untuk di wilayah subak abian jenis tanaman yang dibudidayakan umumnya adalah jenis tanaman keras, seperti kopi, cengkeh, vanili, kakao, kelapa, dan lain-lain.

Untuk di Kabupaten Jembrana, sampai saat ini jumlah subak abian mencapai 147 subak, dengan jenis komoditi yang dihasilkan meliputi kopi, cengkeh, vanili, kakao, dan kelapa. Tetapi yang menjadi komoditi andalan di kabupaten Jembrana adalah tanaman kakao yang produksinya telah berhasil menembus pasar internasional. Untuk meningkatkan produksi pertanian pemerintah Indonesia, sebagaimana di singgung sebelumnya, sejak pelita pertama (1969—1974) telah menerapkan apa yang disebut dengan revolusi hijau.

Akibat diterapkannya revolusi hijau dalam bidang pertanian, ternyata telah menimbulkan terjadinya pergeseran-pergeseran budaya yang berdimensi sangat luas. Dalam arti, perubahan yang terjadi tidak saja menyangkut budaya pertanian, tetapi juga menasar berbagai kehidupan tradisional masyarakat Bali, termasuk masyarakat Jembrana. Akibatnya, terjadilah apa yang oleh Atmadja (2010:15) disebut detradisionalisasi yang luas dan kompleks pada kehidupan masyarakat Bali. Gejala ini tidak dapat dilepaskan dari asumsi dasar yang ada di balik revolusi hijau, yang mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, segala sesuatu yang berbau tradisional harus disingkirkan dan diganti dengan sistem modernisme yang bersumber dari pengetahuan dan teknologi Barat.

Dalam kondisi budaya seperti inilah, terjadi penggusuran secara besar-besaran berbagai nilai tradisional masyarakat Bali, misalnya berbagai organisasi pertanian, seperti

*sekhe numbeg, sekhe semal, sekhe manyi*, dan organisasi tradisional lainnya mulai tergusur. Dalam konteks pertanian tanaman kering, sistem panen yang semula, petani memanen hasil pertaniannya dengan sistem panen sendiri diganti dengan sistem *pajeg*, sistem membajak yang semula memakai cangkul atau hewan, diganti dengan traktor dengan pertimbangan lebih praktis, efisien, dan ekonomis. Bahkan nilai kearifan lokal dalam bidang bercocok tanam yang semula dilakukan dengan sistem gotong-royong dan tolong-menolong pun, kini telah diganti dengan sistem upah (bayaran). Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka dikhawatirkan, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali akan semakin tergeser oleh nilai-nilai budaya modern, yang pada ujungnya akan terjadi pula pergeseran pemaknaan nilai-nilai agama, khususnya Agama Hindu, yang dianut sebagian besar masyarakat Bali. Beberapa fenomena tersebut di atas, telah mengusik naluri peneliti untuk segera melakukan penelitian secara mendalam dan ilmiah terkait permasalahan tersebut.

## **BAB II**

# **Pemetaan Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya**

Pemetaan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini perlu dilakukan, karena melalui metode analisis kualitatif, dapat diperoleh *state of the art* dari pola-pola pergeseran budaya yang terjadi dalam kelompok masyarakat tertentu, sehingga dapat dipahami berbagai faktor penyebab, proses, dan implikasi terjadinya pergeseran budaya, khususnya budaya pertanian subak abian terhadap sistem sosial, dan sistem upacara keagamaan dalam satu komunitas tertentu.

Kemudian berdasarkan hasil penelusuran terhadap studi-studi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian dimaksud adalah sebagai berikut. *Pertama*, penelitian yang dilakukan Alit Artha

Wiguna, dkk., yang telah dibukukan dengan judul ‘‘*Jasa Lingkungan Budaya Sistem Subak di Bali*’’ (2018), menegaskan bahwa *pertama*, sistem subak di Bali telah menciptakan berbagai jenis jasa lingkungan budaya, yang secara garis besar dapat dikategorisasi menjadi tujuh kategori. Adapun jasa lingkungan dimaksud menurut Atha Wiguna, dkk., adalah (a) sistem teknologi dan peralatan; (b) sistem mata pencaharian; (c) sistem kesenian; (d) sistem bahasa; (e) sistem ilmu pengetahuan; (f) sistem organisasi; dan (g) sistem upacara dan agama.

Lebih lanjut menurut Atha Wiguna, dkk., jasa lingkungan budaya dari sistem subak tersebut secara faktual mampu memberikan kesejahteraan, rasa aman, dan nyaman bagi masyarakat pengelola sistem subak. *Kedua*, meski pun ditemukan jasa lingkungan subak, dapat memberikan kesejahteraan, rasa aman, dan nyaman bagi pengelola sistem subak di lokasi penelitiannya, namun Artha Wiguna, dkk., juga mengakui bahwa sistem subak di luar kawasan Warisan Budaya Dunia, Catur Angga Batukaru, telah mengalami beberapa pergeseran. Pergeseran utama yang terjadi menurutnya adalah terjadinya alih fungsi lahan subak menjadi lahan non-pertanian, yang pada gilirannya berimplikasi pada menurunnya kemampuan sistem subak dalam menyediakan jasa lingkungan budaya. *Ketiga*, adanya intervensi pihak luar, terutama pada subak di luar kawasan warisan budaya dunia, juga dapat menyebabkan menurunnya kemampuan subak dalam menyediakan jasa lingkungan budaya, karena terjadinya perubahan sistem fisik subak.

Dalam kajiannya itu Artha Wiguna, dkk, lebih banyak menyoroti pergeseran jasa lingkungan budaya subak karena terjadinya perubahan sistem fisik subak, dibandingkan pergeseran nilai-nilai kearifan lokal (nilai-nilai kearifan

tradisional). Memang, salah satu temuan yang didapat Artha Wiguna, dkk., telah menyinggung terjadinya degradasi sistem gotong-royong karena hilangnya sebagian besar organisasi yang berkaitan dengan sistem subak. Demikian pula hubungan komunikasi harmonis yang terbangun melalui sistem subak, kini juga mulai berkurang. Dengan demikian apa yang disoroti oleh Artha Wiguna, dkk, dapat membantu melacak fenomena bergesernya budaya pertanian subak abian yang selama ini diduga juga terjadi di Kabupaten Jembrana. Tergesernya budaya pertanian dalam kehidupan petani di wilayah subak yang termasuk wilayah Catur Angga Batukaru, sebagaimana ditegaskan Artha Wiguna, dkk., juga dapat membantu peneliti dalam memahami fenomena bergesernya budaya pertanian dalam kehidupan para petani subak abian, di Kabupaten Jembrana.

Namun, kajian yang dilakukan oleh Arta Wiguna, dkk., tidak menyinggung sedikit pun terjadinya pergeseran budaya pertanian, lebih-lebih persoalan budaya pertanian dikaitkan dengan sistem kapitalis. Memang dalam kajiannya itu, Artha Wiguna, dkk., menyinggung sedikit tentang aktivitas subak yang dihitung berdasarkan uang, tetapi tidak dijelaskan secara lebih mendalam faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, bagaimana proses terjadinya kapitalisasi sistem pertanian subak, dan bagaimana implikasinya terhadap sistem sosial dan sistem upacara keagamaan, apalagi untuk kasus di subak abian Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu ada dimensi-dimensi penting yang belum disentuh sama sekali oleh penelitiannya Artha Wiguna, dkk., sehingga persoalan ini sangat menarik, bahkan sangat mendesak untuk segera diteliti.

*Kedua*, Windia dan Wiguna (2012) juga telah melakukan kajian tentang “Subak sebagai Warisan Budaya

Dunia''. Dalam kajiannya tersebut dijelaskan bahwa subak merupakan organisasi petani, yang memiliki peranan penting dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian di Bali. Bahkan, Teguh (2008) menegaskan bahwa subak di Bali diperkirakan lahir pada abad ke-11, sebagai warisan budaya masyarakat Bali yang memiliki nilai-nilai *adiluhung*, seperti nilai keaslian (*authentic*), nilai-nilai universal (*universal values*), atau nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua golongan.

Selain itu, Windia dan Wiguna, juga menyebutkan bahwa subak sebagai hasil karya nenek moyang orang Bali juga memiliki nilai-nilai yang bersifat nyata (*tangible values*) dan nilai-nilai yang bersifat tidak nyata (*intangible values*). Nilai yang bersifat nyata misalnya, sawah mempunyai fungsi sebagai penghasil beras, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian nilai yang bersifat *intangible* misalnya, sawah dapat difungsikan sebagai kawasan konservasi air dan tanah, keanekaragaman hayati, suplay oksigen, dan sarana rekreasi atau aset wisata (Wiguna dan Kaler 2008). Hal menarik yang juga ditemukan oleh Windia dan Wiguna adalah berbagai nilai, baik yang bersifat *tangible* maupun yang bersifat *intangible* merupakan jasa ekosistem subak yang dimanfaatkan oleh manusia melalui filosofi *Tri Hita Karana* (THK). Demikian pula nilai-nilai subak dalam kategori *intangible values* merupakan suatu nilai yang tidak dapat ditemukan di pasaran (*non-marketable value*). Ini merupakan temuan cukup menarik, sebab di balik hal-hal yang tampak secara kasat mata, ternyata subak juga menyimpan nilai-nilai yang tidak dapat diamati secara nyata, yang nantinya dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji permasalahan penelitian ini.



Dikatakan demikian sebab, penelitian yang peneliti lakukan kali ini juga akan melihat berbagai nilai *intangible* maupun nilai *tangible* yang muncul setelah terjadinya pergeseran budaya pertanian dalam pengelolaan sektor pertanian di wilayah pertanian subak abian, Kabupaten Jembrana. Misalnya, setelah terjadinya pergeseran budaya pertanian subak abian, apakah hal ini berimplikasi pada sistem sosial dan sistem pelaksanaan upacara keagamaan yang ada di Kabupaten Jembrana.

Fenomena ini menjadi sangat menarik, sebab penelitian yang dilakukan Windia dan Wiguna juga menemukan bahwa, jasa lingkungan budaya subak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya (1) pengetahuan tentang cara membuat berbagai peralatan yang berkaitan dengan sistem subak; (2) pengetahuan membuat bajak dengan segala perlengkapannya, sehingga dari aspek ergonomis sangat nyaman digunakan oleh para petani dalam mengolah sawahnya; (3) pengetahuan membuat sarana upacara agama terkait dengan sistem subak; (4) pengetahuan tentang cara pembuatan saluran irigasi, termasuk pembuatan trowongan (*aungan*); (5) pengetahuan tentang pembuatan alat-alat panen dan pasca panen, dan banyak lagi jasa lingkungan subak yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Semua nilai-nilai tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan penelitian ini, karena peneliti juga ingin menyoroti berbagai nilai yang dihasilkan oleh jasa lingkungan subak, baik yang bersifat *tingible* maupun yang bersifat *intangible*, khususnya di lingkungan subak abian.

Namun, dalam kajiannya tersebut Windia dan Wiguna tidak menyinggung sedikit pun mengenai pergeseran budaya pertanian subak abian dalam pengelolaan lahan pertanian, apalagi untuk kasus di Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu

ada dimensi-dimensi penting yang belum terungkap dalam penelitian yang dilakukan Windia dan Wiguna, sehingga perlu diteliti lebih dalam dan lebih detail lagi. Misalnya, bagaimana proses pergeseran sistem tolong-menolong ke sistem upah ini terjadi di wilayah subak abian, bagaimana implikasinya bagi sistem sosial dan sistem upacara keagamaan yang berlangsung di wilayah tersebut. Demikian pula akan sangat menarik jika penelitian ini bisa menemukan secara utuh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut. Sebab dengan demikian peneliti akan dapat merumuskan temuan penelitian yang original, baik secara teoritik maupun secara praktis, sehingga dapat dijadikan acuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

*Ketiga*, Pitana (dalam Pitana, (ed.) (1994:137—165) secara khusus juga telah mengkaji *desa adat* dalam arus modernisasi. Dalam kajiannya tersebut Pitana secara jernih mengulas bahwa dengan munculnya era globalisasi, masyarakat Bali mengalami loncatan dalam perkembangannya, yakni dari masyarakat yang berbudaya ekonomi agraris menuju masyarakat yang berbudaya ekonomi jasa (yakni jasa pariwisata). Menurut Pitana, *desa adat* sebagai salah satu komponen dalam struktur kemasyarakatan Bali juga mengalami berbagai pergeseran karena pengaruh luar tersebut, di samping karena dinamika internalnya. Lebih lanjut menurut Pitana, di tengah-tengah derasny arus modernisasi dan globalisasi, *desa adat* mengalami perubahan-perubahan sesuai perkembangan masyarakat pendukungnya. Perubahan yang terjadi menurutnya dapat dipandang sebagai suatu progress. Hal ini menurut Pitana sejalan dengan teori evolusi, yakni perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional yang simpel menuju ke masyarakat yang lebih kompleks (modern). Menurut

Neil Smelser inilah yang disebut *structural differentiation* (diferensiasi struktural).

Dalam konteks ini kaum adaptationist menjelaskan bahwa berbagai perubahan tersebut seiring dengan usaha desa adat dalam mengadakan berbagai penyesuaian diri terhadap situasi objektif lingkungan luar yang meliputi lingkungan fisik, sosial-budaya, ekonomi, politik, dan teknologi sesuai konsep *survival of the fittes* atau sesuai dengan logika Darwinisme-Sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pitana, memandang perubahan yang terjadi akibat modernisme dan globalisasi sebagai sesuatu yang positif tanpa mencoba menyoroti sisi negatif dari perubahan yang terjadi. Hal ini sangat tampak dari pilihan teori yang digunakan Pitana untuk memotret persoalan di lapangan, yakni teori evolusinya Neil Smelser, teori fungsionalisme strukturalnya Talcot Parson dengan skema AGIL-nya, sehingga hasil rekamannya akan positif-positif saja. Dengan demikian Pitana, tidak menyinggung sedikit pun terjadinya pergeseran budaya dalam kehidupan pertanian, yang salah satunya adalah semakin mudarnya nilai-nilai budaya tolong-menolong dan gotong-royong dalam kehidupan pertanian. Oleh karenanya kajian yang dilakukan Pitana dapat dijadikan rujukan untuk menentukan original-tidaknya gagasan dalam penelitian ini.

Namun, di sisi lain kajian yang dilakukan Pitana dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan disertasi ini. Dikatakan demikian sebab beberapa konsep, proposisi dan teori yang dijadikan alat analisis oleh Pitana dapat dijadikan rujukan, seperti teori modernisasi, dan teori globalisasi karena Pitana juga mengaitkan keberadaan desa adat di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Misalnya, adanya intensitas kontak kebudayaan Bali dengan kebudayaan luar meningkat secara dramatik pada paruh kedua abad ini, karena

perkembangan teknologi yang pesat di bidang komunikasi dan transportasi. Adanya perkembangan kepariwisataan yang sangat pesat di Bali, telah berimplikasi terhadap perubahan budaya, termasuk lembaga adatnya. Dengan demikian kajian yang dilakukan Pitana penting juga disebut dalam penelitian ini.

*Keempat*, Atmadja Nengah Bawa (2010) dalam bukunya yang berjudul "*Ajag Bali Gerakan Identitas Kultural, dan Globalisasi*" juga secara khusus dalam satu sub bab mengkaji dinamika perubahan masyarakat Bali, khususnya dalam bidang pertanian. Dalam kajiannya tersebut Atmadja, secara jelas menguraikan bahwa pembagunanisme yang diterapkan pada masyarakat Indonesia juga menyasar kehidupan bidang pertanian. Fokus kajian yang dilakukan Atmadja adalah diterapkannya revolusi hijau (*green revolution*), sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan pangan yang diakibatkan melonjaknya pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Menurut Fakih (2004) revolusi hijau merupakan salah satu bentuk industrialisasi dan modernisasi pertanian yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Menurut logika ini, agar pertanian tradisional tidak kalah bersaing, maka harus dikembangkan ke arah pertanian modern untuk meningkatkan produksi beras (swasembada pangan). Dengan maksud tersebut teknologi hayati kimiawi dan teknologi mekanis tidak dapat dihindarkan dalam menyangga pembangunan bidang pertanian. Dengan sistem demikian revolusi hijau dianggap sebagai terapi bagi upaya peningkatan produksi pertanian, khususnya padi serta merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem komando dan subsidi.

Meski pun Fakih telah menyoroti, bagaimana revolusi hijau itu dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru, tetapi Fakih

tidak secara khusus melakukan kajian terhadap penerapan revolusi hijau dan implikasinya bagi masyarakat Bali. Oleh karena itu, apa yang diungkapkan Fakih setidaknya dapat dijadikan pegangan dalam mengkaji terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya tradisional, terutama dalam kehidupan petani di Bali, khususnya petani Subak Abian, di Kabupaten Jembrana. Hal ini terlihat dari sorotan Atmadja tentang dinamika yang terjadi dari sistem komando dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada petani dalam program revolusi hijau tersebut. Misalnya, semakin hijau tanaman padi atau tanaman apapun yang dibudidayakan oleh petani, maka semakin besar pula ketergantungan petani terhadap teknologi kimiawi atau terhadap pasar. Logikanya seperti ini, jika harga teknologi-kimiawi meningkat, maka meningkat pula kebutuhan petani atas ketersediaan uang tunai untuk membeli teknologi tersebut, sementara di sisi lain harga produksi pertanian belum tentu meningkat. Akibatnya, banyak petani yang mengeluh bahwa harga gabah dan palawija yang dihasilkan, tidak sesuai dengan harga sarana produksi yang dikeluarkan.

Dalam konteks ini Atmadja, hanya menyoroti adanya ketimpangan antara penghasilan yang diperoleh dari usaha bertani oleh para petani dengan harga sarana produksi berupa teknologi kimiawi yang membuat para petani terlanjur ketergantungan pada teknologi tersebut. Oleh karena itu ada dimensi-dimensi penting terkait dengan pergeseran budaya pertanian yang belum disentuh sama sekali oleh Atmadja, sehingga penelitian ini sangat menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ini.

*Kelima*, Dharmika (2019) dalam penelitiannya yang telah dibukukan dengan judul *“Paradoks Bali, Agama, Budaya, dan Kekerasan Hutan”* secara khususnya telah mengkaji hubungan antara agama, budaya, dan subak, dengan

temuan sebagai berikut. Menurut Dharmika, hubungan antara agama, budaya, dan subak diibaratkan sebagai sebutir telur, maka agama adalah kuning telur, kebudayaan adalah putih telur, sedangkan subak adalah kulitnya. Dijelaskan pula oleh Dharmika bahwa jika salah satu di antara ketiganya mengalami gangguan, maka bagian-bagian yang lain dari telur itu juga ikut terganggu. Misalnya, ketika kulit telur sebagai lapisan terluar dari telur itu sendiri, mengalami gangguan, maka bagian putih dan kuning telurnya pun akan ikut terganggu.

Demikian halnya dengan persoalan agama, budaya, dan subak yang dianalogikan sebagai sebutir telur. Jika organisasi subak sebagai bagian terluar atau wadah dari agama dan kebudayaan, mengalami gangguan, maka kebudayaan sebagai lapis kedua dari hubungan di antara ketiganya juga ikut terganggu. Demikian pula dengan keberadaan agama yang dianalogikan sebagai kuning telur dalam konteks hubungan di antara tiga komponen itu tadi, pasti akan ikut terganggu jika dua lapisan di luarnya, yakni kebudayaan dan organisasi subak yang dianalogikan sebagai kulit terluar dari telur mengalami gangguan.

Hal demikian bukan tidak mungkin disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pertanian dengan mudah dapat diserap dan berkembang biak dalam organisasi irigasi tradisional yang lazim disebut subak. Selain hubungan hubungan yang terjadi antara agama, budaya, dan subak sebagai organisasi tradisional yang mengurus urusan pertanian di Bali, Dharmika juga menemukan bahwa organisasi Subak telah berkembang menjadi tangan-tangan handal atau wadah pembangunan yang mampu menjadi agen modernisasi (*'agent of modernization'*). Adanya program intensifikasi pertanian yang dikembangkan melalui program revolusi hijau, seperti

penggunaan pupuk urea (pupuk buatan), pestisida, traktor, bibit unggul, dan lain-lain ternyata dengan mudah dapat diserap oleh para petani di lingkungan subak.

Penelitian yang dilakukan Dharmika, juga menemukan bahwa bagi masyarakat Pekutatan, agama, kebudayaan, dan organisasi subak merupakan tiga entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini dibuktikannya dengan melihat kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat Pekutatan, ajaran agama telah dijadikan sumber inspirasi dan motivasi bagi kreativitas dan berbagai aktivitas kehidupan, termasuk dalam kehidupan pertanian. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa ajaran agama telah menjadi sumber orientasi masyarakat Pekutatan, dalam menjalani berbagai aktivitas, termasuk aktivitas dalam bidang pertanian.

Beberapa temuan yang didapat oleh Dharmika sangat terkait dengan penelitian ini, seperti hubungan antara agama, kebudayaan, dan organisasi subak, yakni organisasi tradisional masyarakat Bali yang secara khusus mengurus kehidupan bidang pertanian. Demikian pula sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas bahwa subak sebagai organisasi tradisional juga telah berperan sebagai agen dari proses modernisasi yang menimpa kehidupan masyarakat Bali. Oleh karenanya beberapa konsep, proposisi, atau teori yang digunakan Dharmika, dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji permasalahan penelitian ini, yakni faktor penyebab terjadinya pergeseran budaya pertanian di subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, proses terjadinya pergeseran budaya subak abian, dan implikasinya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan sistem kekerabatan masyarakat Pekutatan. Namun demikian, Dharmika tidak menyinggung sedikit pun ketiga permasalahan tersebut, sehingga ada dimensi-dimensi penting berkaitan dengan terjadinya

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

pergeseran budaya subak abian, khususnya di Kecamatan Pekutatan akibat masuknya teknologi pertanian ke wilayah subak tersebut yang sangat menarik dan mendesak untuk segera diteliti.



# **BAB III**

## **Pemahaman Teoritik: Modernisasi Dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Perubahan Sosiobudaya Subak Abian**

### **A. Modernisme**

Sebagaimana dipahami bahwa modernisme sebagai sebuah teori, dalam sosiologi klasik dimiliki oleh para teoritis, seperti Marx, Weber, Durkheim, dan Simmel yang melihat kemunculan dan pengaruh modernitas terhadap kehidupan masyarakat. Meski keempat tokoh tersebut melihat berbagai keuntungan yang ditimbulkan akibat modernisme, namun mereka juga menyoroti berbagai sisi negatif yang dihadapi dalam kehidupan modern.

Marx misalnya, melihat bahwa modernitas sangat ditentukan oleh ekonomi kapitalis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial budaya. Meskipun Marx mengakui adanya kemajuan yang ditimbulkan

oleh transisi masyarakat pramodern menuju masyarakat kapitalis (masyarakat modern), namun, karya-karya Marx lebih banyak ditujukan untuk mengkritik sistem ekonomi kapitalis yang menurutnya terdapat banyak kekurangan, seperti terjadinya alienasi dan eksploitasi. Sementara Weber melihat kehidupan modern menentukan perkembangan rasionalitas formal dengan mengorbankan tipe pemikiran irasionalitas. Manusia semakin terpenjara dalam sangkar besi kehidupan, sehingga tidak mampu mengungkapkan beberapa ciri kemanusiaan mereka yang paling mendasar.

Sedikit pandangan yang berbeda, disampaikan Durkheim yang mengatakan bahwa modernitas ditentukan oleh solidaritas organik dan mulai melemahnya kesadaran kolektif. Sedangkan Simmel sebagai seorang sosiolog modernis, melihat dua sisi yang saling berhubungan satu sama lainnya, yakni kota dan uang. Dalam '*Philosophy of Money*', Simmel mengungkapkan apa yang tersembunyi dan apa yang ditekankan dalam masyarakat modern, apa pengaruh uang, dan apa akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari uang dalam kehidupan masyarakat modern.

Menurut (Dwipayana, 2001; dan Geertz, 2000) modernisasi yang melanda kehidupan masyarakat Bali, mengarah pada konstruksi budaya global yang disebabkan Indonesia, termasuk Bali lama berada di bawah jajahan pemerintah Kolonial Belanda. Menurut Dwipayana, pemerintah Kolonial Belanda menghegemoni dan mendominasi orang Bali dengan modal pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Dominasi dan hegemoni menjadi semakin kuat, karena orang-orang Belanda dengan fasihnya mampu memanfaatkan metal hamba atau *petani parekan* yang dilembagakan oleh raja-raja Bali, melalui ideologi dewa-raja dan tautan tuan-hamba atau *dhana-bhakti*. Hal menarik dari kepatuhan rakyat Bali, terhadap raja tidak

semata-semata karena kekuatan fisik yang dimiliki oleh raja untuk memaksa rakyat, tetapi yang lebih berperan dalam konteks ini adalah rakyat Bali memandang raja sebagai *Dewa* mawujud yang dalam istilah Balinya disebut *Dewa Nyalantara*. Mental *petani parekan* ini kemudian dimanfaatkan betul oleh Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya di Bali, dengan cara dimanfaatkannya raja-raja Bali sebagai tameng kekuasaan, sehingga masyarakat Bali yang bermental petani parekan, tidak saja menganggap raja sebagai tuan, tetapi juga orang Belanda yang berbudaya global dianggapnya sebagai wakil raja yang harus dihormati dan dipatuhi.

Kekaguman orang Bali terhadap kebudayaan modern, yang dibawa oleh orang Belanda mulai tampak pada awal abad ke-20 seiring semakin intensifnya pengaruh kebudayaan Belanda terhadap kebudayaan Bali, melalui penetrasi sistem pendidikan Barat. Kondisi ini tampaknya terus berlanjut sampai saat ini, sehingga banyak di antara masyarakat Bali yang sangat mudah menerima masuknya pengaruh modernisme yang kadang-kadang tanpa seleksi. Hal ini tentu dapat berpengaruh besar terhadap berbagai kebudayaan yang berbau tradisional, termasuk budaya pertanian. Dengan demikian tidak mengherankan jika kemudian, banyak nilai-nilai kearifan lokal, termasuk budaya gotong-royong dan sistem tolong-menolong dalam kehidupan pertanian yang selama ini sangat dijunjung tinggi sebagai barometer ketinggian nilai, kini mulai tergusur, karena prinsip-prinsip efektif, efisien, dan pragmatis.

Kondisi ini tidak saja melanda kehidupan masyarakat di daerah-daerah perkotaan di Bali, seperti masyarakat Denpasar, Tabanan, Badung, Gianyar, dan kota lainnya di Bali, tetapi juga telah menyasar kehidupan masyarakat di daerah-daerah pedesaan, termasuk masyarakat petani di Kabupaten Jembrana, khususnya di Kecamatan Pekutatan. Kuatnya pengaruh

konsumerisme dalam kehidupan masyarakat sebagai ciri utama masyarakat modern tidak dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Bali. Hal ini sejalan dengan pandangan Hertz (2004) yang mengatakan bahwa globalisasi produksi atau globalisasi informasi berakibat masyarakat menjadi bagian dari *global village*. Berkenaan dengan hal tersebut, konsumerisme sebagai rohnya ideologi pasar, telah menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Jembrana. Hal ini terlihat jelas dari pola kehidupan masyarakat Bali, yang doyan mengonsumsi berbagai barang produksi budaya global, demi sebuah gaya hidup. Terkait hal itu, Atmadja (2005:336) mengatakan “saya ada karena saya mengonsumsi”.

Adanya pandangan semacam ini menandakan bahwa arah perkembangan imperialisme telah berubah, dari imperialisme yang menekankan pada pendudukan wilayah secara fisik, kini bergeser pada imperialisme gaya baru, yakni imperialisme ekonomi dan imperialisme kultural (Ritzer, dan Goodmen, 2003 dan Fakih, 2004). Dalam buku ini penulis menjadikan premis dasar teori modernisme sebagai basis analisis guna mengeksplorasi berbagai faktor penyebab terjadinya pergeseran budaya pertanian, khususnya budaya pertanian subak abian, di Kabupaten Jembrana.

## **B. Perubahan Sosiokultural dan Respon Masyarakat atas Perubahan yang Terjadi**

Sistem sosiokultural menawarkan skema segitiga yang mengklasifikasi komponen-komponen dasar sebuah sistem sosiokultural. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa bisa jadi sekelompok orang dapat menggunakan berbagai cara untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka cenderung bertindak atas dasar bentuk-bentuk perilaku

sosial yang sudah terpolakan, dan menciptakan kepercayaan, serta nilai bersama yang dirancang untuk memberi makna bagi tindakan kolektif mereka.

Tokoh utama aliran ini adalah Stephen K. Sanderson, yang menegaskan bahwa perubahan sosio-kultural merupakan sebuah bentuk perubahan struktur dan sistem sosio-kultural suatu masyarakat. Komponen-komponen dasar dari paham ini meliputi, inprastruktur material yang terdiri atas, teknologi, ekonomi, ekologi, dan demografi. Kemudian struktur sosial terdiri atas, adatidaknya stratifikasi sosial, adatidaknya stratifikasi rasial, dan etnis, sistem kepolitikan, pembagian kerja secara sexual dan ketidakadilan secara sexual, keluarga dan kekerabatan, serta pendidikan. Sedangkan komponen ketiga dari perubahan sosiokultural masyarakat adalah superstruktur ideologis, yang meliputi, ideologi umum, agama, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan (Stephen K, Sanderson, 1993:60).

Jabaran teoritik dari paham ini adalah menegaskan bahwa perubahan yang terjadi pada sosio-kultural masyarakat bersifat linier, yakni dimulai dari perubahan pada aspek infrastruktur material, kemudian mempengaruhi perubahan pada aspek struktur sosial dan pada akhirnya akan mempengaruhi pula kehidupan superstruktur ideologis masyarakat. Jadi, jika dicermati secara lebih rinci jabaran teori perubahan sosio-kultural yang dikembangkan Stephen K. Sanderson, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut. Perubahan pada sebuah kehidupan sosio-kultural masyarakat, cenderung dimulai dari perubahan aspek infrastruktur material, seperti perubahan dalam bidang teknologi, ekonomi, ekologi, dan perubahan dalam bidang demografi. Hal ini secara linier berpengaruh pula terhadap kehidupan struktur sosial masyarakat yang meliputi, ada atau tidaknya stratifikasi sosial,

ada atau tidaknya stratifikasi rasial dan etnis, sistem kepolitikan, pembagian kerja secara seksual dan seterusnya.

Perubahan pada aspek struktur sosial sebuah masyarakat, menurut Sanderson juga dapat mempengaruhi perubahan pada super struktur ideologis, seperti ideologi umum, agama, ilmu apengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Berangkat dari tiga komponen perubahan sosio-kultural masyarakat sebagaimana digambarkan Sanderson di atas, dan jika dikaitkan dengan terjadinya pergeseran budaya pertanian subak abian, tampaknya teori perubahan sosiokultural cocok dijadikan alat analisis. Sebab, masuknya era modernisasi ke dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Jembrana, dapat berakibat sistem pertukaran jasa bergeser ke arah moneterisasi (Suda, 1999:144). Munculnya pergeseran seperti itu, dapat pula mengakibatkan bergesernya berbagai sistem sosial yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, fungsi-fungsi sosial tradisional seperti pola kerja dengan sistem gotong-royong dan tolong-menolong yang selama ini lumrah dilakukan oleh masyarakat petani di Jembrana, kini telah digeser dengan sistem upah. Hal ini juga berakibat nilai-nilai tradisional yang berbasis karakter produksi pertanian, kini cenderung mulai menipis, bahkan telah hilang.

Akibat lain dari bergesernya fungsi-fungsi sosial ke arah moneterisasi di lingkungan masyarakat dewasa ini, termasuk masyarakat Bali telah memunculkan kecenderungan minat anak-anak muda untuk bekerja di sektor pertanian juga berkurang. Hal demikian berimplikasi terhadap terjadinya degradasi pemahaman anak-anak muda atas nilai-nilai budaya tradisional yang berbasiskan karakter tradisi pertanian dan dapat mempercepat proses transformasi budaya, dari budaya agraris menuju budaya industri. Bukan hanya itu, berbagai nilai kearifan lokal dalam sistem sosial masyarakat Bali juga ikut

tergeser, salah satunya adalah bergesernya budaya pertanian, seperti budaya gotong-royong dan sistem tolong-menolong dalam hal menggarap lahan pertanian mereka.

Adanya perubahan semacam ini, tentu berpengaruh pula terhadap sistem budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Bali. Misalnya, nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat di era pramodern juga kurang mendapat perhatian dari kalangan masyarakat. Akibat, lanjutannya adanya perubahan-perubahan nilai semacam itu, dapat memicu munculnya ketegangan-ketegangan sosial di lingkungan masyarakat, yang menjurus ke arah disintegrasi sosial.

Selain itu, munculnya era modernisme dalam kehidupan masyarakat saat ini, tidak saja mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali, tetapi juga dapat menimbulkan stratifikasi sosial baru dalam masyarakat. Artinya, pelapisan masyarakat yang sebelumnya didasarkan atas sumber daya di bidang pertanian menjadi bergeser ke arah pelapisan masyarakat yang didasari atas sumber daya dalam bidang industri (ekonomi). Hal demikian melahirkan dua strata, yakni kaum majikan yang disebut bos yang menguasai alat-alat produksi, dan kaum buruh yang hanya memiliki tenaga dengan keterampilan seadanya. Munculnya stratifikasi sosial semacam ini, tentu dapat menggeser stratifikasi sosial yang ada sebelumnya, yakni pelapisan masyarakat yang didasarkan atas sumber daya dalam bidang pertanian. Artinya, pelapisan sosial yang mendasarkan diri pada kepemilikan asset pertanian, seperti sawah, alat-alat pertanian, teknologi pertanian dan keahlian di bidang pertanian menjadi tidak penting lagi (Koentjaraningrat, 1984).

Selain itu, sistem kepolitikan dalam kehidupan masyarakat juga ikut berubah. Dalam arti, tadinya orang yang

memiliki kekuasaan atau berperan sebagai pemimpin informal dalam masyarakat tani adalah pemilik tanah yang menurut budaya Jawa lazim disebut tuan tanah (Sutrisno, 1992:23). Kini posisi itu ditempati para industriawan yang menguasai sumber daya di bidang industri, yakni berupa modal (uang) dan alat-alat produksi. Kemunculan mereka tidak saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam hal politik. Sebab dengan uang yang dimilikinya, mereka dapat mempengaruhi para penguasa di tingkat supra desa, baik penguasa formal, maupun penguasa informal. Dengan kerangka pemikiran Sanderson ini diharapkan dapat digali berbagai data kancah yang dapat menghasilkan suatu temuan yang sesuai dengan realitas sosial-budaya dan sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat, terutama menyangkut proses bergesernya budaya subak abian di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Berkaitan dengan terjadinya perubahan sosiokultural masyarakat akibat berkembangnya paham modernisme, maka penting juga dipahami respon atau penerimaan masyarakat atas terjadinya perubahan tersebut. Untuk memahami respon masyarakat semacam itu, maka paham resepsi yang cocok dijadikan alat analisis. Menurut Kutha Ratna (2005:208) bahwa aliran Resepsi melokasikan pembaca ke dalam posisi sentral. Artinya, pembaca dipandang sebagai mediator, sebab tanpa pembaca karya sastra seolah-olah tidak memiliki arti apa-apa. Dalam arti yang lebih luas dapat dikatakan bahwa tanpa audiens, seperti pendengar, penonton, penikmat, pemirsa, dan keseluruhan aspek kultural seolah-olah kehilangan maknanya. Teori ini secara historis telah diperkenalkan oleh Hans Robert Jauss pada tahun 1967. Jauss (1983:3--45) menemukan cara-cara yang berbeda sebagai rangkaian tanggapan pembaca yang dikenal dengan teori Resepsi. Secara umum teori ini mengandung arti sebagai penerimaan, penyambutan,



tanggapan, dan reaksi serta sikap pembaca terhadap suatu karya sastra.

Dalam kaitannya dengan teori Resepsi dikenal ada dua macam teori Resepsi, yakni (a) resepsi secara sinkronis; dan (b) resepsi diakronis. Adapaun Resepsi sinkronis dimaksudkan adalah penelitian yang melibatkan pembaca sejaman, sedangkan teori Resepsi diakronis, adalah penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan pembaca sepanjang sejarahnya. Pembaca dimaksudkan dalam konteks penelitian ini adalah pembaca teks sosial, bukan teks sastra. Artinya, pembaca yang dimaksud dalam penelitian ini, bukanlah pembaca karya-karya sastra dalam arti *pure* karya sastra, seperti prosa, puisi, dan karya sastra lainnya, akan tetapi yang dimaksud adalah para pendengar, penikmat, penonton, dan penerjemah berbagai fenomena sosial dan fenomena budaya yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Model resepsi sinkronis yang paling mudah dapat dilakukan adalah tanggapan masyarakat yang sengaja dikelompokkan dalam rangka memberikan penilaian terhadap karya sastra. Dalam konteks ini penilaian yang diberikan bukan terhadap karya sastra, seperti karya-karya Chairil Anwar, karya-karya Pramudia Ananta Toer, dan yang lainnya, melainkan terhadap teks sosial berupa berbagai fenomena yang sedang berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat petani. Dalam konteks teori resepsi Barthes (1974:4) mengembangkan konsep pembaca sebagai penulis (*writerly*). Menurutnya, tujuan kritik sastra kontemporer bukanlah pembaca sebagai konsumen melainkan juga sebagai produsen, oleh karena itu mereka tidak semata-mata harus membaca tetapi juga harus menulis. Jika hal ini dikaitkan dengan studi kultural, pergeseran paradigim inilah yang kemudian

melahirkan pusat baru, dan pusat-pusat itu pun berubah secara terus-menerus.

Oleh karenanya, teori resepsi dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya tampak pada perubahan bentuk teks-teks sastra, tetapi juga menyangkut perubahan bentuk rumah misalnya. Seperti, kombinasi arsitektur klasik dan arsitektur modern, timbulnya kreasi-kreasi tarian baru, mode pakaian baru, dan tidak terkecuali mode-mode perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat petani. Misalnya, dalam kajian ini akan dilacak bagaimana tanggapan masyarakat terhadap terjadinya pergeseran budaya pertanian, khususnya dalam kehidupan pertanian subak abian. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan mengeksplorasi berbagai implikasi yang mungkin ditimbulkan oleh adanya pergeseran tersebut, terhadap sistem sosial dan sistem upacara keagamaan yang terjadi pada masyarakat Subak Abian, di Kabupaten Jembrana.

Menurut teori Resepsi, keindahan dan manfaat karya sastra bagi masyarakat, termasuk para aktor kebudayaan pada umumnya, bukanlah keindahan yang pasti definisinya. Atau dengan bahasa lainnya, keindahan yang dimaksud bukanlah keindahan abadi, melainkan keindahan sementara yang dalam konteks ini karya sastra yang dimaksud bukanlah bersifat universal. Akan tetapi keindahan model ini disebut juga keindahan yang bersifat nisbi, yang kualitasnya tergantung pada situasi sosial budaya pembaca. Oleh karenanya, pembaca dapat menggali dan memahami aktivitas kultural secara berbeda-beda pula. Demikian pula dalam konteks memahami terjadinya pergeseran budaya pertanian dalam kehidupan pertanian di subak Abian, di Kabupaten Jembrana, pembaca (dalam hal ini yang dimaksud adalah) masyarakat pelaku budaya, dapat secara bebas memaknai pergeseran tersebut, sesuai ruang dan waktu. Dalam perubahan nilai tersebut, yang

pada dasarnya bersumber dari audiens, terkandung dinamika studi kultural.

Artinya, dalam mengkaji berbagai perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat, pasti akan terjadi berbagai dinamika yang secara rasional dapat dipersepsikan secara berbeda oleh pelaku kebudayaan itu sendiri. Jadi, dalam konteks ini setiap pembaca dapat menafsirkan sebuah perubahan budaya berdasarkan konsep, pengetahuan, dan budaya yang mereka anut. Misalnya, bagaimana masyarakat dalam menanggapi terjadinya perubahan sosial dan budaya yang sedang terjadi dalam masyarakat di mana masyarakat itu hidup dan berkembang, ini sangat ditentukan oleh sistem sosial dan sistem budaya yang mereka anut. Jadi, singkatnya teori Resepsi akan digunakan sebagai alat analisis untuk menggali berbagai informasi yang ada dalam masyarakat terkait dengan implikasi yang ditimbulkan akibat terjadinya pergeseran budaya pertanian subak abian terhadap sistem sosial dan sistem upacara keagamaan pada masyarakat petani di Kabupaten Jembrana.

## BAB IV

# Fenomena Kecamatan Pekutatan

### 4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Pekutatan

Pekutatan pertama kali dibuka oleh *Nyoman Sapta* alias *Pan Derasning* pada tahun 1904. Pada saat Pan Derasning sampai di wilayah tersebut, di wilayah itu sebenarnya sudah ada penduduk muslim yang bernama *Uwak Leman* (diperkirakan nama aslinya adalah Sulaiman) yang bermukim di alas *Madurgama* (hutan keramat) yang banyak ditumbuhi pohon kutat yg sangat besar dan pohon paku (pakis).

Pada tahun 1916, datanglah rombongan dari Pergung yang rencananya dipekerjakan untuk membuka *afdelling*/perkebunan di wilayah Pekutatan. Namun, rombongan pekerja ini ternyata tidak kuat dalam menghadapi berbagai ujian, sehingga kemudian diganti dengan penduduk yang didatangkan dari Blambangan (Banyuwangi). Sebenarnya kedatangan rombongan dari pergung ini adalah atas seijin dari Bapak Daris

selaku kepala desa Pulukan. Mereka mendapat bagian di sebelah utara jalan sedang penduduk muslim di selatan jalan (jalan yang dimaksud adalah jalan di Villa Jepang sekarang/bukan jalan Denpasar-Gilimanuk).

Selanjutnya pada bulan Januari 1917, terjadi gempa besar yang meluluhlantakkan sebagian besar pulau Bali. Sementara di wilayah Pekutatan penduduk yang baru datang dari pergunung, mereka kebanyakan menempati rumah yang terbuat dari tanah, sehingga hampir semua rumah mereka roboh dan rata dengan tanah. Kemudian tahun 1926, datang lagi rombongan masyarakat dari Desa Munggu, di mana sebelumnya sekitar tahun 1912 sempat datang merabas hutan di Yeh Lebah tetapi tidak kuat akan penyakit malaria, akhirnya sebagian di antara mereka kembali ke Munggu, ada juga yang tinggal di Gumbrih, dan ada pula yang menetap di Yeh Kuning Dlod Berawah. Hal ini diceritakan oleh Pan Derasning kepada kumpunya yg bernama Wayan Erlambang (penulis).

Singkat ceritra pada bulan Juli 1917 mulai diresmikan pembukaan Afdelling Pulukan. Kemudian pada tahun 1927 mulai dibuka jalan tanah tembus ke Yeh Leh dan berlanjut sampai ke Soka. Demikian pula pada tahun 1935, mulai ada jalan geladag, hampir bersamaan dengan kedatangan rombongan dari Lebih Karangasem menuju ke Asahduren. Terkait dengan proses pembukaan hutan di wilayah Pekutatan, maka dapat diketahui bahwa yang pertama kali membuka *alas madurgama* (hutan keramat) di pertigaan pekutatan sekarang adalah Pan Derasning bersama Uwak Leman, dari Mendoyo Dangin Tukad. Adapun Pan Derasning itu, adalah putra dari Guru Mudiasning (cucu dari Guru Mudiasta cicit dari Ki Wayahan Tegeh Pangkung) yang datang dari Pangkung Tibah Tabanan ke Jembrana pada tahun 1828 saat perang diponogoro sedang berlangsung. Ki Wayahan Tegeh Pangkung adalah trah

dari Dalem Benciluk Tegeh Kuri. Dengan dibukanya alas madurgama tersebut, akhirnya terbangunkan wilayah Pekutatan sampai adanya sekarang ini (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pekutatan, Jembrana>) diakses, 7 Maret 2020).

Berdasarkan data yang didapat dari Kecamatan Pekutatan dalam Angka (2019:30) maka dapat dideskripsikan bahwa Kecamatan Pekutatan terletak paling timur Kabupaten Jembrana dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabanan. Dari data tersebut dapat pula dipahami bahwa jumlah desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Pekutatan adalah sebanyak 8 dan 6 di antaranya merupakan daerah pesisir, yang berbatasan langsung dengan laut, yakni samudra Indonesia. Luas Kecamatan Pekutatan adalah mencapai 129, 65 km<sup>2</sup> bila dibandingkan dengan luas Kabupaten Jembrana mencapai angka 15, 40 persen. Dari delapan desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Pekutatan, desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Pulukan yakni seluas 35, 48 km<sup>2</sup> atau 27, 37 persen dari luas Kecamatan Pekutatan.

Sementara luas lahan yang ada di Kecamatan Pekutatan sebagian besar terdiri atas hutan negara seluas 6.156 Ha atau sekitar 43 persen dari total wilayah Pekutatan dan hanya sekitar 43 persen yang diperuntukkan lahan pertanian sedangkan sisanya adalah pekarangan dan perumahan. Dari 541 Ha lahan sawah yang tersebar di desa desa di Kecamatan Pekutatan hampir seluruhnya tidak ada yang berpengairan teknis tetapi berpengairan semi teknis saja.

#### **4.2 Keadaan Geografis Kecamatan Pekuatatan**

Dilihat dari persepektif geografis, Kecamatan Pekutatan memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan Kecamatan Pekutatan merupakan kecamatan yang terletak di

ujung Timur Kabupaten Jembrana. Selain itu, Kecamatan Pekutatan merupakan jalur penghubung utama segala aktifitas, terutama aktivitas ekonomi antara Kabupaten Tabanan dengan ibu kota Kabupaten Jembrana, yaitu kota Negara. Sedangkan di sebelah Baratnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Mendoyo. Sebagai implikasi dari letak geografis semacam itu, maka Kecamatan Pekutatan dengan 8 wilayah desa dinasnya, yang terbentang dari timur ke barat memiliki potensi pengembangan berbagai usaha. Seperti, usaha pertanian, perdagangan, industri, dan jasa dengan memanfaatkan potensi lokal masyarakat setempat. Adapun potensi lokal yang dimiliki Kecamatan Pekutatan meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Potensi tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik, karena didukung oleh keharmonisan geografis antara letak dataran tinggi dan dataran rendah yang seimbang, dengan titik tertinggi 669 meter dan titik terendah adalah 1 (satu) meter. Di samping itu, perbandingan antara musim kemarau dan musim hujan berjalan secara normal. Secara faktual musim hujan di Kecamatan Pekutatan tidak berbeda dengan musim hujan di Kecamatan lainnya di kabupaten Jembrana. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun dan dengan suhu udara berkisar antara 23--30<sup>0</sup> Celcius.

Wilayah Kecamatan Pekutatan terdiri atas 8 desa dinas, 30 banjar dinas, dan 13 *desa adat* dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 12.965 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk pada akhir Desember 2015 tercatat 30.067 jiwa (7.636 KK) dengan kepadatan penduduk rata-rata 2.200 orang per km<sup>2</sup> dan memiliki batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah Barat adalah Kecamatan Mendoyo, di Sebelah Utara kabupaten Buleleng, di sebelah Selatan Samudra Indonesia, dan di sebelah

Timur adalah Kabupaten Tabanan (Profil Kecamatan Pekutatan, 2015).

Wilayah Kecamatan pekutatan merupakan daerah agraris yang sangat cocok untuk jenis pertanian kering dengan jenis tanaman keras, seperti durian, kelapa, manggis, cengkeh, dan lain-lain. Adanya dukungan sarana dan prasarana pertanian yang sangat memadai memungkinkan produksi pertanian dapat memberikan hasil secara optimal. Selain tanaman keras sebagai tanaman budi daya utama, petani juga menanam berbagai macam tanaman palawija, seperti jagung, ketela, sayur-mayur yang dimanfaatkan untuk melengkapi konsumsi masyarakat Pekutatan, seperti terong, labu, cabai dan mentimun. Di wilayah subak abian Kecamatan Pekutatan sejal lama juga telah dikembangkan teknik-teknik pertanian dengan metode intensifikasi, sehingga tingkat pengetahuan petani di bidang itu relatif maju, setara dengan pengetahuan petani lainnya di Bali.

Keadaan flora dan fauna di sekitar wilayah Kecamatan pekutatan, tidak jauh berbeda dengan keadaan alam flora fauna yang ada di daerah-daerah lainnya di Bali. Lahan tegalan yang ada di wilayah subak abian Kecamatan Pekutatan, telah dikelola secara intensif sebagai usaha pertanian yang cukup produktif. Pola usaha tani yang dikembangkan pada lahan tegalan di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan adalah pola tumpang sari. Ada pun pola tumpang sari dimaksud adalah suatu pola pertanian dengan cara menanam lebih dari satu jenis tanaman di atas sebidang lahan. Di bawah pohon manggis ditanami pohon salak, kopi, dan di sela-selanya juga ada tanaman kelapa, seperti tampak pada gamab 4.1 di bawah ini.



**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**



**Gambar 4.1 Pola Usaha Tani Dengan Sistem Tumpang Sari  
(Dok. Arta)**

### **4.3 Demografi Kecamatan Pekutatan**

Sesuai data yang ada dalam demografi Kecamatan Pekutatan, keadaan penduduk hanya diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan menurut agama. Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat dilukiskan kondisi kependudukan di Kecamatan Pekutatan tercatat seluruhnya sebanyak 30.067 orang yang terdiri atas laki-laki 14.942 orang, perempuan 15.125 orang, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani, khususnya petani perkebunan, dengan jumlah KK 7.636 KK yang terdiri atas 7.457 laki-laki dan 179 perempuan.

Untuk lebih jelasnya mengenai data penduduk di Kecamatan Pekutatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Jumlah KK dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Pekutatan Tahun 2015**

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>KK</b>	<b>Penduduk Laki-laki</b>	<b>Penduduk Perempuan</b>	<b>Jumlah L+P</b>
1.	Medewi	1.388	2.554	2.559	5113
2.	Pulukan	1.275	2.184	2.223	4.407
3.	Pekutatan	1.524	2.775	2.810	5.585
4.	Pangyangan	428	847	850	1.697
5.	Gumbrih	638	1.442	1.517	2.959
6.	Pengeragoan	966	1.975	2.189	4.164
7.	Asahduren	881	1.872	1.784	3.656
8.	Manggissari	536	1.293	1.193	2.486
	<b>Jumlah</b>	<b>7.636</b>	<b>14.942</b>	<b>15.125</b>	<b>30.067</b>

Sumber Data: Profil Kecamatan Pekutatan, 2015.

Jika mengacu pada table di atas, dapat dipahami bahwa Kecamatan pekutatan dengan delapan desa dinas memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak kalau dibandingkan

dengan luas wilayah mereka. Adapun Desa dinas yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pekutatan adalah (1) Desa Medewi; (2) Desa Pulukan; (3) Desa Pakutatan; (4) Desa Panyangan; (5) Desa Gumrih; (6) Desa Pangragoan; (7) Desa Asahduren; (8) Desa Manggissari.

#### **4.2.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur**

Jumlah penduduk di Kecamatan Pekutatan tahun 2015 tercatat 25,67 ribu jiwa dengan jumlah laki-laki 12,68 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 22,99 ribu jiwa (Profil Kecamatan pekutatan,2015). Bila dibandingkan luas Kecamatan Pekutatan yang mencapai 197, 19 km<sup>2</sup> dengan penduduk yang secara keseluruhan berjumlah 25, 67 ribu jiwa, maka kepadatan penduduknya mencapai angka 198 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kecamatan Pekutatan tahun 2017 dan 2018 adalah sebanyak 26,47 ribu jiwa dan 26,61 ribu jiwa (hasil proyeksi penduduk atau ada pertumbuhan penduduk kurang lebih 14 ribu jiwa.

Berikut Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Pekutatan Tahun 2017-2018:

**Tabel 4.2 Jumlah Pendudukan Kecamatan Pekutatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2017--2018**

Kelompok Umur	2017			2018		
	Laki	Perempuan	Laki dan perempuan	Laki	Perempuan	Laki & perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	0,93	0,98	1,91	0,92	0,97	1,89
5-9	1,03	1,02	2,05	1,01	1,00	2,01
10-14	1,08	1,04	2,12	1,08	1,03	2,11
15-19	0,93	0,88	1,81	0,95	0,90	1,85
20-24	0,69	0,72	1,41	0,58	0,71	1,39
25-29	0,87	0,86	1,73	0,87	0,86	1,73
30-34	0,89	0,83	1,72	0,89	0,83	1,72
35-39	0,94	1,01	1,95	0,92	0,99	1,91
40-44	1,12	1,17	2,29	1,11	1,17	2,28
45-49	1,22	1,23	2,45	1,23	1,24	2,47
50-54	0,99	1,04	2,03	1,02	1,08	2,10
55-59	0,79	0,77	1,56	0,82	0,80	1,62
60-64	0,59	0,68	1,27	0,62	0,71	1,33
65-69	0,40	0,48	0,88	0,42	0,49	0,91
70-74	0,29	0,32	0,61	0,29	0,33	0,62
75+	0,29	0,39	0,68	0,30	0,37	0,67
Jumlah	13,65	13,42	26,47	13,13	13,48	26,61

Sumber BPS Kabupaten Jembrana (Angka Proyeksi)

#### 4.2.2 Keadaan Penduduk Menurut Agama

Keadan penduduk menurut agama di Kecamatan Pekutatan tidak jauh berbeda dengan di wilayah lainnya di Indonesia yakni, beragam (multikultur). Meski, mereka memeluk agama yang berbeda-beda, kenyataannya; pemeluk satu agama dengan pemeluk agama lain hidup berdampingan,

dengan rukun serta saling menghormati satu sama lainnya. Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekutatan memeluk agama Hindu, Kristen, Islam, Katolik dan Budha. Guna menunjang peribatan mereka, maka dibangun prasarana beribatan yang terdiri atad Pura, Masjid, Gereja, dan Klenteng/ Vihara. Mayoritas penduduk di Kecamatan Pekutatan memeluk agama Hindu, maka Pura merupakan sarana peribatan terbesar dan terbanyak dibandingkan dengan sarana peribatan lainnya untuk di Kecamatan Pekutatan. Samoapai saat penelitian ini dilakukan diKecamatan tersebut tercatat ada 59 Pura, yang terdiri atas 21 *Kahyangan Tiga*, 8 *Pura Subak*, dan 30 Pura lainnya. Selain itu di Kecamatan Pekutatan ada 32 Mesjid/Musola. Guna mengetahui perkembangan penduduk di Kecamatan Pekutatanberdasarkan agama dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Pemeluk Agama Hindu laki-laki 12.696 orang dan perempuan 12.879 orang
2. Pemeluk agama Islam laki-laki 2.628 orang dan perempuan 2.658 orang.
3. Peemeluk agama Kristen laki-laki 22 orang dan perempuan 37 orang,
4. Pemeluk agama Katholik laki-laki 148 orang dan perempuan 153 orang
5. Pemeluk agama Budha laki-laki 1 orang dan perempuan 2 orang.
6. Pemeluk agama Konghuchu 0 orang
7. Pemeluk aliran kepercayaan laki-laki 2 orang.

#### **4.2.3 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia dinilai memiliki korelasi yang positif dengan keberhasilan atau kegagalan

pembangunan. Jika kualitas sumber daya manusianya berkualitas, maka ada kecenderungan pembangunan pada suatu negara berhasil. Demikian halnya dengan pembangunan di Kabupaten Jembrana, ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya. Peningkatan mutu sumber daya manusianya dapat diraih melalui pendidikan formal dan non formal. Berbagai terobosan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Diantaranya pemberian subsidi bagi anak-anak usia sekolah, serta subsidi biaya pendidikan tinggi dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Semua ini dimaksudkan untuk memotivasi agar masyarakat berpartisipasi melanjutkan sekolahnya, sehingga secara perlahan namun pasti kualitas sumber daya manusia Jembrana meningkat.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, tidak hanya melalui pendidikan formal saja, seperti sekolah dan perguruan tinggi, namun juga melalui pendidikan luar sekolah, seperti, kursus-kursus Pokjar dan Paud.

#### **4.4 Desa Adat dan Desa Dinas**

Manusia secara kodrati merupakan mahluk monodualisme, yakni selain sebagai mahluk individu sekaligus juga sebagai mahluk sosial (*homo socius*). Konsekuensi dari manusia sebagai mahluk sosial, maka mereka tidak bisa hidup sendiri, melainkan mereka selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sejalan dengan hal itu, Van Baal (1988:2) mengatakan bahwa manusia selalu bertempat tinggal di suatu tempat dan tidak pernah bertempat tinggal sendirian. Sehubungan dengan sifat dan naluri manusia seperti itu, maka berkembanglah bentuk dan pola-pola organisasi sosial, sebagai konfigurasi dari adanya pola-pola interaksi sosial di antara sesama mereka. Adanya pola-pola interaksi semacam inilah

kemudian melahirkan kebudayaan di mana antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian melalui pola-pola komunikasi dan interaksi yang intensif ini manusia meneruskan tata nilai, gagasan, keyakinan, pengetahuan, dan tradisi yang mereka miliki kepada para penerusnya.

Pola-pola organisasi sosial semacam ini dalam konteks masyarakat Hindu di Bali dikenal dengan berbagai sebutan, seperti *banjar*, *subak*, *desa*, dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan kesatuan-kesatuan kekerabatan, seperti keluarga inti (*kuren*) dan keluarga besar (*dadya*). Dalam kaitannya dengan organisasi sosial yang disebut *desa*, pada masyarakat Bali dikenal ada dua jenis *desa*, yakni *desa adat* dan *desa dinas*. *Desa adat* yang oleh Haar (1958) disebut masyarakat teritorial adalah suatu bentuk kesatuan sosial yang aktivitasnya selalu berhubungan dengan hal-hal yang berbau adat dan agama, sehingga kegiatan *desa adat* dipusatkan pada bidang upacara, baik upacara adat maupun upacara keagamaan. Sementara *desa dinas* aktivitasnya lebih ditekankan pada hal-hal yang berbau administrasi pemerintahan dan pembangunan (Budiana, 1995:5).

Dalam konteks Kecamatan Pekutatan kedua bentuk komunitas tersebut (baca: *desa adat* dan *desa dinas*) mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, sebab pembangunan fisik yang cenderung dilakukan oleh *desa dinas* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembangunan spiritual yang cenderung dilakukan oleh *desa adat*. Hal lain berkaitan dengan *desa adat*, bahwa status keanggotaan *desa adat* dimulai sejak seorang warga *desa adat* telah melangsungkan pernikahan (memulai kehidupan *grehasta asrama*). Berangkat dari realitas tersebut, pernikahan dalam hubungannya dengan tatanan kehidupan *desa adat* merupakan

sesuatu yang sangat penting. Batapa tidak sebab dengan pernikahan inilah seorang warga *desa adat* akan mulai mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga desa (*krama desa*), sebagai warga banjar (*krama banjar*), atau warga dari kelompok-kelompok sosial yang lebih khusus. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bagus (dalam Koentjaraningrat, 1995:294) bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan saat yang amat penting bagi warga masyarakat Bali, sebab melalui perkawinan barulah orang Bali dianggap memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat (sebagai *krama desa*) atau warga kelompok kekerabatan lainnya.

Di samping keterikatannya dengan upacara-upacara keagamaan di lingkungan keluarga, baik keluarga inti (*kuren*) maupun keluarga besar (*dadya*), warga *desa adat* juga terikat oleh kewajiban *nyungsung pura kahyangan tiga* (*Pura Dalam, Pura Desa, dan Pura Puseh*), termasuk pula *nyungsung pura subak*. Secara umum upacara-upacara yang diselenggarakan oleh warga *desa adat* atau oleh *krama subak* di pura-pura tersebut, selain sebagai cerminan wujud rasa *bhakti* warga desa terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan para roh leluhur, upacara demikian berfungsi pula sebagai wahana pengembangan rasa solidaritas dan rasa kebersamaan di antara sesama warga masyarakat.

Demikian pula, prosesi upacara keagamaan yang dilakukan di pura-pura tersebut juga berfungsi sebagai wahana untuk meneruskan nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda. Dikatakan demikian sebab melalui prosesi upacara anak-anak secara langsung dapat mempelajari berbagai aktivitas sosial dan aktivitas keagamaan melalui proses imitasi terhadap apa yang dilakukan oleh para tetua mereka. Misalnya, melalui sistem pengerahan tenaga secara



sukarela (*ngayah*) atau dengan menyumbangkan sedikit harta kekayaannya (*medana punia*) kepada *desa adat* dan atau organisasi subak, anak-anak dapat mengembangkan kesadaran sosialnya dalam konteks ber-*yadnya*.

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh *desa adat* secara organisatoris, dikoordinir oleh kepala *desa adat* yang disebut *Bandesa Adat*, dan dibantu oleh para pemimpin organisasi sosial lainnya, seperti *kelihan banjar*, *kelihan tempek*, dan beberapa orang *saye*, yakni warga desa yang ditunjuk secara bergilir untuk membantu menyiapkan berbagai keperluan upacara. Bukan hanya itu, peran pemuka dan tokoh-tokoh adat, seperti *jero mangku*, dan para sesepuh desa juga tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan upacara agama.

Selanjutnya organisasi banjar, merupakan organisasi sosial yang setingkat berada di bawah organisasi desa. Keberadaan *banjar* sebagai organisasi sosial yang berada di bawah organisasi desa, dalam konteks masyarakat Bali juga mengacu pada dua pengertian, yakni banjar dinas dan *banjar adat*. Dilihat dari segi ruang lingkup, keberadaan *banjar adat* lebih kecil dibandingkan ruang lingkup *desa adat*. Oleh karenanya, hubungan-hubungan sosial yang terjadi di antara anggota *banjar adat* lebih intensif dibandingkan organisasi *desa adat*. Adapun prinsip dasar yang melandasi hubungan sosial yang terjadi di wilayah *banjar adat* adalah *pasuka dukan*. Artinya, dibandingkan dengan di *desa adat* di tingkat *banjar adat* inilah warga masyarakat melaksanakan berbagai aktivitas, baik menyangkut aktivitas sosial maupun aktivitas keagamaan. Seperti, melakukan aktivitas gotong-royong mendirikan atau memperbaiki tempat-tempat peribadatan, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Sementara aktivitas dalam bidang upacara keagamaan

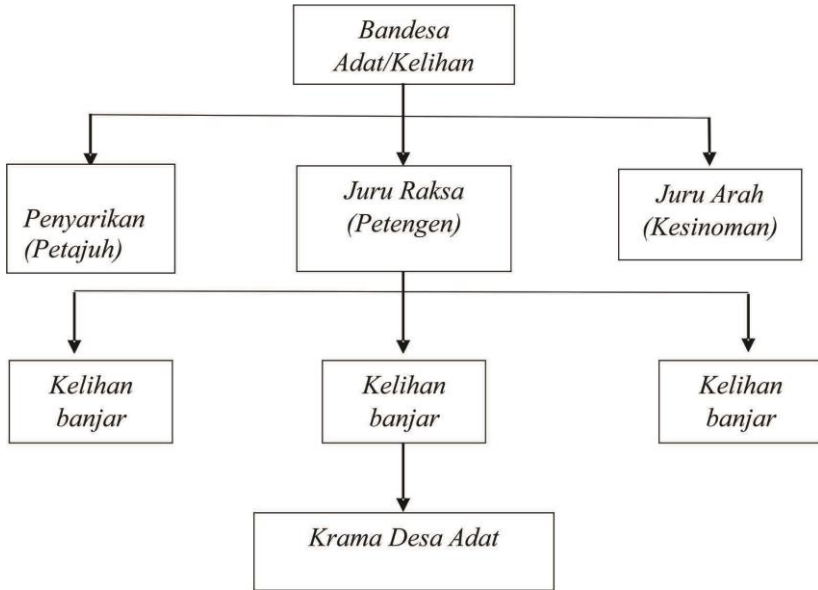
dilakukan dalam bentuk *ngodalin*, *upacara pecaruan*, *melaspas* fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lain.

Selain aktivitas sosial yang sifatnya kolektif warga *banjar adat* juga sering melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat individual, seperti upacara pernikahan, *nelubulanin*, *ngotonin*, dan lain-lain. Secara garis besar aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkup keluarga juga mengacu pada dua jenis aktivitas, yakni aktivitas yang bersifat duka, seperti kematian, kena musibah, dan lain-lain, serta aktivitas yang bersifat suka, misalnya upacara pernikahan, *nelubulanin*, *ngotonoin*, dan lain-lain.

Jika ada salah satu warga banjar yang mempunyai kematian atau keluarganya kena musibah, biasanya secara sukarela anggota banjar yang lainnya datang memberikan bantuan, baik berupa materi maupun berupa tenaga. Namun, sebaliknya jika ada anggota banjar yang mempunyai hajatan berupa pernikahan, *nelubulanin*, *mepandes* dan upacara lainnya yang bersifat suka, warga banjar baru akan datang membantu jika mereka diberi tahukan (diundang) terlebih dahulu oleh pihak yang mempunyai hajatan, sebaliknya jika tidak diberi tahu atau diundang mereka umumnya tidak datang. Inilah dua jenis aktivitas sosial yang biasa diselenggarakan, baik oleh warga desa maupun warga banjar yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagai sebuah organisasi sosial *desa adat* merupakan organisasi sosial yang bersifat otonom, yakni memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Terkait dengan mekanisme kelembagaan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka di bawah ini disajikan gambar bagan struktur *prajuru desa adat* sebagai berikut.

### Bagan 4.1 Struktur Prajuru Desa Adat



Berdasarkan gambar bagan di atas dapat didesripsikan bahwa *desa adat* sebagai sebuah organisasi sosial memiliki struktur oragnisasi yang terdiri atas, *Bandesa adat*, sebagai pemegang pucuk pimpinan di *desa adat* mempunyai tanggung jawab atas kelancaran jalannya berbagai aktivitas pembangunan di *desa adat* bersangkutan. Kemudian *penyarikan* atau *petajuh bandesa* mempunyai tugas membantu *Bandea Adat* dalam menjalankan berbagai kegiatan adat. Kemudian *petengan* atau *juru raksa* mempunyai tanggung jawab atas keluar masuknya keuangan *desa adat*. Sementara *sinoman* bertugas untuk membantu *Bandesa Adat* dalam melakukan sosialisasi atas berbagai program kegiatan demi

lancarnya proses kegiatan di lingkungan *desa adat* itu sendiri. Di bawah kedudukan *prejuru desa adat*, ada *kelihan banjar adat*, yang mempunyai tugas membantu *Bandesa Adat* dalam mempelancar jalannya berbagai aktivitas *desa adat* di banjar masing-masing.

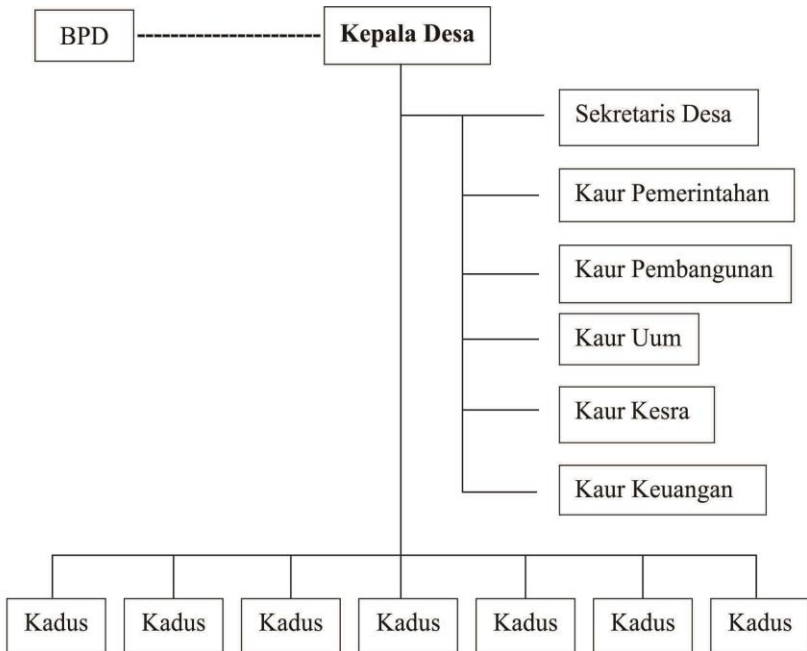
Sebagaimana disinggung dalam uraian di atas selain *desa adat* dalam komunitas masyarakat Hindu di Bali juga dikenal adanya desa dinas. Desa dinas merupakan kelompok sosial dalam masyarakat yang keanggotanya terikat secara administratif terhadap berbagai aktivitas terkait pembangunan fisik masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, maka yang dimaksud desa adalah desa dan *desa adat* atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa atau kepala kelurahan sebagai pemegang pucuk pimpinan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa atau kelurahan itu sendiri. Sekretaris desa atau sekretaris kelurahan bertugas membantu kepada desa atau kepala kelurahan melaksanakan tugas administratif sehari-hari. Sementara kepala-kepala urusan adalah kepala pada bidang-bidang tertentu berada di bawah koordinasi sekretaris desa atau kelurahan.

Kemudian berkedudukan sejajar dengan kepala desa atau kepala kelurahan adalah Badan Perwakilan Desa yang disingkat BPD adalah badan permufakatan desa yang keanggotaanya terdiri atas kepala-kepala dusun pimpinan lembaga kemasyarakatan dan perwakilan tokoh-tokoh

masyarakat yang ada di desa tersebut. Lembaga ini mempunyai tugas selain membantu kepala desa atau kepala kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan juga berfungsi sebagai badan kontrol yang bertugas mengontrol pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan. Sementara kepala dusun atau keala lingkungan bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam memperlancar jalannya proses pembangunan di lingkungan dusun atau lingkungannya masing-masing. Di bawah ini digambarkan mekanisme pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa dinas dalam bagan II sebagai berikut.

**Bagan 4.2. Struktur Pemerintahan Desa Dinas**



**BAB**  
**V**

**Penyebab Terjadinya Pergeseran  
Budaya Pertanian Subak Abian  
Di Kecamatan Pekutatan,  
Kabupaten Jembrana**

**5.1 Faktor Modernisme**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian landasan teori bahwa modernisme sebagai sebuah teori, telah dikembangkan oleh beberapa sosiolog terkemuka dunia, seperti Marx, Weber, Durkheim, Simel, dan yang lainnya yang melihat kemunculan dan pengaruh modernisme terhadap kehidupan masyarakat sangat kuat. Seperti yang dikatakan Marx misalnya, modernisme sangat ditentukan oleh ekonomi kapitalis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun Marx mengakui bahwa banyak kemajuan yang ditimbulkan oleh transisi masyarakat pramodern menuju ke masyarakat kapitalis (masyarakat modern), akan tetapi karya-karya Marx lebih banyak diarahkan untuk mengkritik sistem ekonomi kapitalis,

dibandingkan melihat sisi positif yang ditimbulkan oleh era modernisme itu sendiri. Misalnya, sistem ekonomi kapitalis menurut Marx banyak menimbulkan keterasingan (alienasi) dan eksploitasi bagi masyarakat di mana sistem ekonomi kapitalis tersebut diberlakukan.

Demikian Halnya Weber, mereka melihat bahwa kehidupan modern sangat menentukan perkembangan rasionalitas formal dengan mengorbankan tipe pemikiran irasionalitas. Lebih lanjut menurut Weber hidup di era modern, manusia ibarat terpenjara dalam sangkar besi kehidupan, sehingga tidak mampu mengungkapkan beberapa ciri kemanusiaan mereka yang paling mendasar. Pandangan yang sedikit berbeda mengenai modernisme disampaikan oleh Durkheim yang menegaskan bahwa modernisme sangat ditentukan oleh solidaritas organik dan mulai melemahnya kesadaran kolektif dalam masyarakat. Jadi, menurut Durkheim, dalam kehidupan masyarakat modern, hal-hal yang bersifat tradisi, adat, dan ikatan komunisme harus ditransformasikan, dimarjinalkan, bahkan disingkirkan, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan praksis.

Dalam konteks penelitian ini, gagasan modernisme yang dijadikan landasan dalam memecahkan permasalahan penelitian ini adalah gagasan yang dikembangkan oleh Geertz (2000). Menurut Geertz modernisasi yang melanda kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Bali mengarah pada konstruksi budaya global, terutama yang dianut oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini disebabkan Indonesia lama berada di bawah jajahan pemerintah kolonial Belanda. Kenyataan ini diperkuat oleh Dwipayana (2001) yang mengatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda menghegemoni dan mendominasi masyarakat Indonesia, khususnya orang Bali dengan modal pengetahuan dan

teknologi yang dimilikinya. Cara ini dilakukan oleh pemerintah Belanda dengan memanfaatkan mental hamba (*petani parekan*) yang dilembagakan oleh raja-raja Bali, melalui ideologi dewa-raja dan tautan tuan-hamba atau dalam konteks Hindu di Bali disebut *dhana-bhakti*.

Ketataan atau kepatuhan rakyat, terhadap raja-raja pada jaman kerajaan di Bali, tidak semata-mata disebabkan kekuatan fisik yang dimiliki oleh raja untuk memaksa rakyat untuk tunduk padanya, namun juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat Bali, yang menganggap raja itu adalah dewa mawujud (*dewa nyalantara*). Kondisi masyarakat Bali semacam ini ternyata dipahami betul oleh pemerintah kolonial Belanda, kemudian dengan pemahaman tersebut Belanda menjadikan raja-raja Bali sebagai tameng kekuasaan. Akibatnya, masyarakat Bali tidak saja menganggap raja sebagai tuan, tetapi orang Belanda yang berbudaya global putih juga dianggapnya sebagai wakil raja yang harus dihormati dan dipatuhi.

Dari kepatuhan masyarakat Bali terhadap penguasa kolonial seperti itu, sedikit demi sedikit berakibat masyarakat Bali mulai mengagumi kebudayaan yang di bawa oleh pemerintah Belanda. Atas kekagumannya tersebut masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Bali selalu ingin menginternalisasi dan meniru berbagai pola kehidupan masyarakat modern yang dibawa oleh orang Belanda ke Bali. Hal ini tampak jelas ketika pemerintah Orde Baru menerapkan kebijaksanaan modernisme di bidang pertanian di Indonesia yang disebut revolusi hijau. Terhadap program tersebut masyarakat subak, termasuk subak abian di Kecamatan Pekutatan menerima dengan senang hati kebijaksanaan tersebut, tanpa ada penolakan sedikit pun.



Istilah kebijaksanaan sering dipadankan dengan istilah *policy* (dalam Bahasa Inggris) yang artinya suatu pedoman yang dapat dijadikan dasar oleh sebuah lembaga atau institusi tertentu untuk melakukan sebuah tindakan (PBB, dalam Wahab, 2008:1—2). Hal senada disampaikan pula oleh Anderson (dalam Imron, 2008:13) yang menegaskan bahwa kebijaksanaan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pelaku kebijaksanaan itu sendiri dalam rangka memecahkan permasalahan (*apurposeive corse of matter of concern*). Berangkat dari kedua pandangan tentang kebijaksanaan tersebut, maka yang dimaksud kebijaksanaan pemerintah dalam menerapkan revolusi hijau adalah tindakan yang diambil oleh pemerinah Indonesia, khususnya Pemerintah Orde Baru, untuk melakukan antisipasi terjadinya kekurangan pangan bagi penduduk Indonesia, yang pada tahun 1969 (saat pertama kali diterapkan revolusi hijau) jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 111,8 juta jiwa (<https://www.google.com>).

Sementara menurut catatan H.S. Musa dalam “Implementasi Kebijakan Strategis untuk Peningkatan Produksi Padi Berwawasan Agribisnis dan Lingkungan” suntingan Suparyono, dkk. (2001:25) Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada dekade 1970-an. Lebih lanjut menurut H.S. Musa, Indonesia mengimpor 2 juta ton beras pada 1977 dan itu mencapai sepertiga dari beras yang tersedia di pasar internasional. Untuk mengurangi impor beras secara besar-besaran inilah kemudian pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terus menggalakan program revolusi hijau (*green revolution*), yakni program industrialisasi dan modernisasi pertanian yang menganut logika pertumbuhan. Menurut logika ini, pertanian tradisional harus dikembangkan ke arah pertanian

modern untuk meningkatkan produksi padi (beras), produksi perkebunan, dan palawija. Guna mendukung program tersebut, maka mau tidak mau, suka atau pun tidak suka, penggunaan teknologi hayati kimiawi dan teknologi mekanis merupakan sebuah kewajiban yang tidak mungkin dihindari.

Terkait dengan program revolusi hijau, tampaknya program ini tidak hanya diberlakukan pada areal pertanian basah (sawah) tetapi juga berlaku untuk lahan pertanian kering (subak abian). Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa tanaman padi memang masih menjadi tanaman utama di sektor pertanian, khususnya tanaman padi sawah, namun di samping menanam padi petani juga mengusahakan tanaman lain, seperti palawija, cengkeh, kopi, dan lain-lain dengan harapan selain menghasilkan padi sebagai bahan makanan pokok, petani juga memperoleh peluang untuk menghasilkan palawija yang dapat dikomersialkan (dijual) untuk mendapatkan uang tambahan. Suatu hal menarik dari perubahan ini adalah, apapun bentuk tanaman yang mereka budidayakan, kebutuhan akan teknologi kimiawi, pupuk buatan, dan aneka jenis insektisida untuk membasmi hama tanaman tetap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem bercocok tanam ala modernisme. Hal ini dibenarkan oleh informan I Wayan Sudiasa (39 tahun) seorang staf Desa Asah Duren yang juga kesehariannya adalah seorang petani tanaman kering. Di antra berbagai pernyataannya dia berucap:

...saya tidak bisa melepaskan diri dari pemakaian pupuk kimia (pupuk *unorganik*) sebab terbukti hasil yang diperoleh lebih banyak dibandingkan tanpa memakai pupuk kimia. Oleh karena itu, sebelum menanam tanaman produksi yang akan dijadikan komoditas, terlebih dahulu saya menaburkan pupuk di

lahan yang akan saya tanami. Saya lebih suka memakai pupuk kimia dibandingkan pupuk organik, karena pemakaiannya lebih praktis, harganya lebih murah, dan tidak perlu tenaga banyak untuk mengangkut pupuk ke lahan pertanian saya. Sedangkan jika saya memakai pupuk organik, tenaga yang diperlukan untuk menabur pupuk lebih banyak, proses pembuatannya lebih lama dan lebih rumit. Pendeknya, jika memakai pupuk kimia jauh lebih efisien dari segi biaya, dan lebih praktis dari segi pengerjaannya (wawancara, 20 Januari 2020).

Pernyataan senada disampaikan pula oleh Bapak I Ketut Suarjana (52 tahun), Perbekel Desa Manggisari sebagai berikut.

...di desa kami, yakni Desa Manggisari yang sebagian besar petaninya menanam tanaman kopi dan pisang hampir semuanya telah ketergantungan sama pemakaian pupuk kimia. Sebab sudah sejak lama kami terbiasa memakai pupuk urea (pupuk kimia), dan pembelian pupuk kimia itu disubsidi oleh pemerintah, maka petani tidak terlalu dibaratkan oleh biaya pembelian pupuk, di samping juga dari segi pemakaiannya sangat praktis. Oleh karena itu, sebagian besar petani lebih memilih menggunakan pupuk kimia dibandingkan pupuk organik, karena pertimbangan ekonomis, dan pemanfaatnya lebih praktis (wawancara, 20 Januari 2020).

Memang jika diperhatikan tanaman produksi yang ditanam oleh para petani subak abian di Kecamatan

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**

Pekutatan, khususnya di Desa Bading Kayu setelah diberikan pupuk urea, tampak sangat hijau dan seger, seperti tampak pada gambar 5.1 di bawah ini.



**Gambar 5.1** Tanaman pisang di sela-sela tanaman kopi, milik petani subak abian di Desa Badingkayu, Pekutatan, Jembrana. (Dok. Arta)

Hal ini menurut Atmadja (2010:11—12) apa pun yang dibudidayakan oleh para petani, baik dalam sistem pertanian basah, maupun pada sistem pertanian kering kebutuhan akan teknologi kimiawi atau pupuk buatan dan aneka jenis insektisida merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, tanpa pupuk apa pun yang mereka budi dayakan, baik di sawah maupun di ladang pasti akan mengalami kesulitan. Oleh karenanya, semakin hijau tanaman yang dibudi dayakan oleh petani, maka semakin besar pula ketergantungan mereka terhadap teknologi kimiawi atau terhadap pasar. Hal itu, juga membuat para petani menjadi semakin ketergantungan terhadap pupuk dan juga teknologi kimiawi atau terhadap pranata-pranata modernisme. Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan kedua pendapat informan di atas dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa masyarakat, termasuk masyarakat petani di zaman sekarang ini lebih suka bekerja atas dasar prinsip-prinsip rasional, efisien, efektif, dan praktis dibandingkan prinsip-prinsip manual, komunal, dan tradisional.

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam analisis ini dapat dideskripsikan bahwa hal-hal yang bersifat irasional, tradisional, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak praktis harus ditransformasikan, bahkan disingkirkan. Gejala ini mulai tampak pada kehidupan masyarakat Bali, era 1970-an setelah diterapkannya program revolusi hijau di bidang pertanian, yakni di era pembangunan lima tahun pertama (Pelita I, 1969--1974). Pada awal dilaksanakannya program revolusi hijau banyak hal-hal yang berbau tradisional, seperti peralatan dalam bidang pertanian mulai ditransformasikan. Misalnya, cangkul sebagai alat tradisional yang biasa digunakan petani untuk membajak sawah atau ladang diganti dengan traktor, sabit sebagai alat untuk membersihkan gulma tanaman diganti dengan mesin pencukur rumput, pupuk kandang yang biasa

diproduksi secara tradisional oleh para petani diganti dengan pupuk kimia, dan banyak lagi hal-hal yang berbau tradisional diganti dengan peralatan modern karena pertimbangan-pertimbangan rasional, seperti efektif, efisien, dan praktis.

Apa yang dialami oleh masyarakat subak abian di Kacamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana sejalan dengan terminologi Wilbert Moore (dalam Sztompka, 2004:152) yang menegaskan bahwa modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau masyarakat pra modern menuju masyarakat modern. Masyarakat modern dimaksudkan Wilbert Moore adalah tipe masyarakat yang telah mengenal teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia Barat, dengan ciri utamanya adalah ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil. Jika terminologi Wilbert Moore ini dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, termasuk Bali maka kita tidak bisa menutup mata akan posisi Indonesia sebagai negara yang lama berada di bawah jajahan pemerintah Belanda. Ketika Belanda menguasai Indonesia, maka orang Indonesia, termasuk masyarakat Bali secara langsung atau pun tidak telah terdominasi dan terhegemoni oleh bangsa Belanda, baik secara kultural, ekonomi, maupun secara politik.

Bermula dari dominasi dan hegemoni masyarakat Bali di bidang pengetahuan dan teknologi oleh orang-orang Belanda yang merepresentasikan budaya modern (budaya Barat), inilah kemudian masyarakat Bali sering memosisikan negara Barat sebagai negara yang maju, berkembang, dan modern. Sementara bangsanya sendiri, yakni bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Bali diposisikan sebagai negara atau masyarakat yang tidak maju, tidak berkembang, dan tradisional. Berangkat dari gagasan tersebut, maka tidak mengherankan jika kemudian orang Indonesia, termasuk orang Bali meletakkan negara Barat sebagai pusat, baik pusat orientasi

maupun pusat teladan. Artinya, apapun bentuk pengetahuan, teknologi, dan budaya yang datang dari negara Barat (baca: negara modern) harus dijadikan teladan, harus diikuti, dan harus dijadikan pusat orientasi. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa pengaplikasian pengetahuan dan teknologi Barat oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Bali adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, bila meminjam gagasan Foucault (2002), maka dapat ditegaskan bahwa hubungan antara dunia Barat dengan masyarakat Indonesia, termasuk Bali dalam konteks transfer ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sarat dengan kekuasaan.

Demikian halnya dengan penyerapan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian yang ditransformasikan melalui program revolusi hijau. Masyarakat Indonesia, dan juga masyarakat di areal subak abian, di Kecamatan Pekutatan tidak dapat melakukan resistensi terhadap kekuasaan pemerintah Orde Baru dalam penerapan program revolusi hijau tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan salah seorang petani, yakni Bapak Wayan Bali Kari (50 tahun) Perbekel Desa Pengraguan yang ditunjuk sebagai informan dalam penelitian ini. Di antara berbagai pernyataannya dia berucap.

...saya sebagai warga masyarakat dan warga negara tidak bisa menentang keputusan negara, apalagi keputusan tersebut dijargonkan untuk membantu kepentingan rakyat. Dengan dalih membantu kepentingan rakyat, maka sebagai rakyat yang merasa dibantu tentu tidak akan menolak kebijakan tersebut, apalagi di baliknya ada embel-embel untuk kesejahteraan rakyat. Jadi hampir semua masyarakat subak yang ada di Bali saat program ini diglontorkan oleh pemerintah tidak ada yang menolaknya. Lebih-

lebih saat itu kita tidak paham mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh program tersebut bagi kehidupan petani ke depannya. Asal program itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat ditambah adanya tujuan untuk kebaikan para petani, pasti diterima dengan senang hati oleh masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh program tersebut baru disadari oleh masyarakat setelah program tersebut berjalan puluhan tahun, baik dampak terhadap lahan pertanian maupun terhadap berbagai sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat (wawancara, 20 Januari 2010).

Mencermati pernyataan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru dalam mengembangkan kebijakan di bidang ekonomi, termasuk ekonomi pertanian lebih mempertimbangkan persepektif ekonomi terbuka yang mengarah pada pasar bebas dan berbasis pada prinsip-prinsip efisiensi, efektif, dan pencapaian keuntungan secara optimal. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rachbini (dalam Maliki, 1999:128) bahwa dalam lingkup kebijaksanaan negara, pemerintah Orde Baru dalam mengambil kebijaksanaan terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi, muncul persepektif baru tentang peran negara. Artinya, dalam bidang ekonomi, negara mempunyai peran yang sangat strategis dan dalam mengambil kebijakan lebih mempertimbangkan perspektif ekonomi terbuka yang mengarah pada pasar bebas, efisiensi, dan pencapaian keuntungan yang optimal dibandingkan pencapaian tujuan resmi yang bersifat normatif, netral, dan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Hal ini sejalan pula dengan apa yang dikatakan Atmadja (2010:65) bahwa nasionalisasi, bahkan modernisasi



yang diterapkan pemerintah Orde Baru, baik yang dimaksudkan untuk memperkuat akar-akar budaya nasional maupun dalam konteks Jawanisasi, ternyata menimbulkan masalah bagi kehidupan kebudayaan daerah di Indonesia, termasuk kebudayaan Bali. Misalnya, penerapan revolusi hijau telah mengakibatkan banyak pranata sosial, pengetahuan, dan teknologi tradisional yang termarjinalkan atau tersingkirkan. Sepintas tampak memang pergeseran yang terjadi akibat diterapkannya revolusi hijau itu, terfokus pada bidang pertanian, akan tetapi jika dicermati secara lebih mendalam, maka terlihat bahwa pergeseran tersebut menjalar pula ke berbagai bidang kehidupan sosial lainnya, sebab antara pranata yang satu akan selalu berkaitan dengan pranata lainnya. Misalnya, bergesernya sistem panen dari sistem memanen hasil kebun sendiri bergeser ke sistem *pajeg* (jual di tempat) tentu berpengaruh terhadap keberadaan organisasi sosial tradisional, seperti keberadaan berbagai *sekhe*. Misalnya, *sekhe manyi* dalam sistem subak basah diganti dengan sistem tebas dan jual padi di tempat. Demikian pula *skhe semal* yang dulu berfungsi sebagai organisasi sosial untuk membasmi hama tanaman kelapa, kini juga menjadi tergeser, akibat ditemukannya senapan angin yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mengusir hama tupai, dan demikian juga pranata sosial lainnya.

Berdasarkan data kaneah yang didapat, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengamatan lapangan, maka ditemukan ada beberapa organisasi tradisional sebagai pranata sosial yang keberadaannya hampir punah sama sekali di wilayah subak abian di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Ada pun organisasi tradisional dimaksud adalah, *sekhe manyi*, *sekhe numbeg*, *sekhe semal*, *sekhe panen*, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan uraian di atas pemahaman yang

dapat dikembangkan dalam konteks kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia, termasuk di Kecamatan Pekutatan adalah dalam menerapkan kebijakan di bidang pertanian, pemerintah, khususnya pemerintah Orde Baru senantiasa mendasarkan diri pada prinsip-prinsip modernisme. Artinya, berbagai aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat subak pada dasarnya berpegang pada prinsip efisien, efektif, dan praktis. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka tidak keliru jika paham modernisme, dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran budaya pertanian di subak abian Kabupaten Jembrana, khususnya di Kecamatan Pekutatan.

## **5.2 Faktor Ideologis**

Jika dicermati secara lebih dalam konsep ideologi memiliki sejarah yang cukup panjang dan kompleks. Hal ini terlihat jelas dari karya beberapa penulis buku sosiologi yang kemudian mewarnai pula beberapa disiplin ilmu sosial dan humaniora. Dari penggambaran istilah ideologi yang telah dipaparkan dalam beberapa karya penulis ilmu sosial, maka dapat dicermati bahwa istilah ideologi digunakan dalam dua cara yang sangat berbeda. *Pertama*, istilah ideologi digunakan oleh beberapa penulis dalam kapasitasnya sebagai istilah yang murni deskriptif. Artinya, ideologi dalam konteks ini dimaksudkan sebagai ‘sistem berpikir’, ‘sistem kepercayaan’, praktik-praktik simbolik’ yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Atau dengan bahasa lainnya, pemakaian istilah ini berhubungan dengan konsepsi netral (*neutral conception*) tentang ideologi. Hal ini mengandung arti bahwa

pada basis konsepsi ini, tidak ada upaya untuk memisahkan antara jenis-jenis tindakan dengan animasi ideologi. Maksudnya, ideologi dalam konteks ini hadir dalam setiap program politik, dan mengabaikan segala program yang dimaksudkan sebagai pemeliharaan dan transformasi tatanan sosial.

*Kedua*, dalam berbagai catatan tentang ideologi, justru istilah ideologi secara mendasar berhubungan dengan proses pembenaran hubungan kekuasaan yang bersifat asimetris (tidak simetris). Atau dengan istilah lainnya dapat pula dikatakan bahwa ideologi digunakan dalam rangka pembenaran dominasi oleh kelas dominan terhadap kelas subordinat. Penggunaan istilah model ini, menunjukkan bahwa ideologi juga sering digunakan sebagai konsepsi kritis ideologi (*critical conception of ideology*) (Thompson, 2007:17).

Namun, dalam rangka mengkaji berbagai fakta sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana sebagai faktor penyebab terjadinya pergeseran budaya pertanian, penulis akan mendasarkan diri pada konsepsi ideologi yang kedua, yakni ideologi sebagai alat pembenaran kebijaksanaan yang diterapkan oleh penguasa, khususnya oleh pemerintah Orde Baru. Hal ini dikarenakan penulis sangat meyakini bahwa di balik penerapan kebijaksanaan revolusi hijau ada tindakan dominasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu, dan masyarakat, khususnya masyarakat subak, harus menerima kebijaksanaan tersebut karena ideologi yang ada di balik kebijakan pemerintah yang dibalut dengan istilah revolusi hijau sangat halus. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak I Gede Sila Gunada (47 tahun) Perbekel Pekutatan yang ditunjuk sebagai informan. Di antara berbagai pernyataannya dia berucap.

...program pemerintah di bidang pertanian yang disebut revolusi hijau sebenarnya bagus, karena sifatnya memberikan subsidi kepada petani. Jadi dalam hal ini petani di desa kami sampai saat ini tidak ada yang protes tentang penerapan revolusi hijau tersebut. Misalnya, kami disuruh memakai pupuk urea ya masyarakat kami menerima dengan senang hati. Demikian pula dengan pemakaian traktor, diterima dengan senang hati karena dapat memudahkan pekerjaan petani di sawah atau di ladang (wawancara, 20 Januari 2020).

Apa yang dikatakan informan di atas, membuktikan bahwa di balik penerapan revolusi hijau sebenarnya ada ideologi yang tersembunyi sebagai alat pembenaran kekuasaan, yang bersifat asimetrisme. Artinya, di balik penerapan program revolusi hijau pemerintah sebenarnya memiliki kepentingan yang tersembunyi, yakni di samping secara politis untuk mendongkrak popularitas Negara Indonesia di mata dunia internasional, secara ekonomis negara juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan pupuk urea dan alat-alat pertanian modern tersebut kepada para petani. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Marx (dalam Althusser, 1984: x) bahwa ideologi merupakan piranti, yang oleh karenanya ide-ide dari kelas berkuasa dapat diterima dalam masyarakat sebagai sesuatu yang normal dan natural. Dalam konteks ini Marx menentang pemahaman mengenai ideologi, bahwa para anggota dari kelas subordinat, yakni kelas pekerja yang dalam konteks penelitian ini adalah para petani, dituntun untuk membayangkan pengalaman sosialnya, hubungan sosial, dan bahkan dirinya, melalui seprangkat ide yang bukan berasal dari

diri mereka sendiri. Akan tetapi datang dari suatu kelas yang tidak hanya memiliki kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda dengan mereka, tetapi juga acapkali mempunyai arah yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Jadi, menurut Marx ideologi borjuis mempertahankan para pekerja, yakni kaum proletar dalam status *false consciousness*. Dalam arti kesadaran masyarakat akan siapa dirinya, atau bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat lainnya, dan pengertian yang mereka bangun tentang pengalaman sosialnya, adalah diproduksi oleh masyarakat itu sendiri, bukan sesuatu yang alami dan biologis. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa kesadaran individu dideterminasi oleh masyarakat tempat di mana individu itu dibesarkan, dan bukan oleh watak atau pun psikologi individu bersangkutan.

Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Lois Althusser (1984: xi) yang mengatakan bahwa ideologi bukanlah sekadar seprangkat ide yang dipaksakan oleh suatu kelas terhadap kelas sosial lainnya. Akan tetapi dalam terminologinya Althusser menegaskan bahwa ketika segenap kelas berpartisipasi dalam praktik tersebut, hal itu bukan berarti bahwa praktik itu sendiri tidak lagi melayani kepentingan kelas dominan. Artinya, menurut Althusser ideologi itu, bersifat lebih efektif dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Marx. Hal demikian menjadi logis, sebab ideologi bekerja dari dalam, bukan dari luar dan secara mendalam telah menginskripsikan cara berpikir dan cara hidup tertentu pada segenap kelas. Dalam konteks pertanian subak abian di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, para petani secara tidak langsung dituntun oleh pihak penguasa untuk membayangkan pengalaman sosialnya, hubungan sosial, dan

bahkan dirinya, melalui seprangkat ide tentang modernisme pertanian yang secara ideologi dijargonkan akan membawa kesejahteraan hidup para petani itu sendiri. Padahal secara teoritik ide atau gagasan tersebut bukan berasal dari diri para petani itu sendiri.

Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Orde Baru dengan argumentasi bahwa Negara Indonesia baru saja mengalami krisis politik pada pertengahan tahun 1960-an. Berangkat dari argumen tersebut pemerintah kemudian ingin mengejar ketertinggalan dengan akselerasi yang tinggi. Terkait hal tersebut, dalam menjalin hubungan dengan masyarakat pedesaan, berdasarkan beberapa sumber dapat dikatakan bahwa pemerintah Orde Baru cenderung memilih perspektif klasik. Menurut Bates (dalam Maliki, 1999:34) perspektif klasik didasarkan atas asumsi bahwa pertumbuhan pembangunan hanya akan berlangsung jika masyarakat desa dipenetrasi (ditekan) dari luar, yakni dari kota, dari sektor industri, atau dari sektor modern lainnya.

Hal ini juga didasari oleh anggapan bahwa desa digambarkan sebagai kelompok tradisional, sehingga dengan demikian desa harus diposisikan sebagai pihak yang harus menerima kekuatan perubahan yang diprogram oleh pemerintah. Demikian halnya dengan kondisi masyarakat desa di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, juga harus rela menerima berbagai pembaharuan dalam bidang pertanian yang dikemas oleh pemerintah Orde Baru dalam bentuk revolusi hijau. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru dalam pembangunan pertanian secara konstan menempatkan masyarakat desa sebagai masyarakat yang statis, marjinal, dan boleh didominasi oleh kekuatan negara.

Berdasarkan urian tersebut secara ringkas dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa pemerintah Orde

Baru dalam konteks pembangunan pertanian bertindak sebagai aktor yang sangat penting dalam “panggung” kehidupan masyarakat, termasuk dalam formasi masyarakat petani di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Atau dengan istilah lainnya dapat ditegaskan bahwa pemerintah Orde Baru, memainkan peran yang sangat menonjol, yakni sebagai aktor yang banyak mengambil inisiatif dalam mengendalikan kehidupan masyarakat pedesaan, baik melalui akumulasi kekuasaan, pengendalian partai politik, maupun penguasaan ideologi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa kepala desa yang ditunjuk sebagai informan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak I Wayan Duwita (51 tahun) Kepala Desa Panyangan sebagai berikut.

Sekitar tahun 1970-an masyarakat Bali, khususnya para petani dihibau oleh pemerintah untuk menjalankan program-program baru dalam bidang pertanian, seperti pemakaian pupuk kimia, sebagai pengganti dari pupuk kandang atau pupuk hijau, penanaman komoditas pertanian sesuai kepentingan pasar, dan berbagai program lainnya. Semua kebijakan pemerintah seperti itu, diinstruksikan melalui pemerintahan desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah di Kecamatan. Jadi, semua program pemerintah terkait dengan bidang pertanian saat itu dilaksanakan secara serentak melalui instruksi pemerintahan desa (wawancara, 20 Januari 2020).

Mencermati pernyataan informan di atas, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa pemerintah Orde Baru dalam rangka mewujudkan stabilitas politik bagi kelangsungan pembangunan di bidang ekonomi, dan dengan

belajar dari pengalaman bahwa konflik ideologi di masa lalu telah melemahkan dan menjadikan birokrasi tidak efektif, maka langkah yang diambil pemerintah Orde Baru dalam konteks ini adalah menyehatkan birokrasi dari pusat hingga ‘akar rumput’, yakni birokrasi pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Maliki (1999:132) bahwa pemerintah Orde Baru mewarisi birokrasi dari pemerintah Orde Lama yang cenderung bersifat tidak efektif dan sangat terpolitisir. Artinya, pada zaman pemerintahan Orde Lama, birokrasi sering dijadikan ajang adu pengaruh antar berbagai kekuatan politik yang membawa aparatus birokrasi ke berbagai kutub ideologis dan golongan. Untuk memperbaiki kondisi inilah pemerintah Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik guna menopang kelangsungan pembangunan di bidang ekonomi dengan belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa konflik ideologi ternyata dapat melemahkan dan menjadikan birokrasi tidak efektif.

Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan stabilitas politik di bidang pembangunan ekonomi, maka pemerintah Orde Baru kemudian membuat UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Hal ini oleh pemerintah Orde Baru dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan desa, agar lebih mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif. Selain untuk memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan, dikeluarkannya UU No.5 tahun 1979 juga dimaksudkan untuk menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa yang lingkup kekuasaan wilayahnya meliputi dusun lama yang berada di bawah naungan tradisi lama dihapuskan. Sementara kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan



yang masih hidup tetap diakui, sejauh hal itu dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional (A.W., Widjaja, 1993:4-7).

Jika dicermati apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, dalam penerapan UU No. 5 tahun 1979 sesungguhnya telah kelihatan upaya-upaya pemerintah Orde Baru untuk menyingkirkan atau memarjinalkan hal-hal yang berbau tradisioal dan digantikan dengan hal-hal modern yang dibungkus dengan labeling pembangunan. Hal ini diperkuat oleh Atmadja (2010:65) yang mengatakan bahwa nasionalisasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, baik yang menguatkan akar-akar budaya nasional, maupun proses Jawanisasi, ternyata menimbulkan masalah bagi kehidupan kebudayaan daerah di Indonesia, termasuk kebudayaan Bali. Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, penerapan revolusi hijau di seluruh wilayah Indonesia, telah mengakibatkan banyak pranata, pengetahuan, dan teknologi tradisional tersingkirkan. Seperti tampak pada beberapa gambar di bawah ini.



Gambar 5.2 Gambar pacul dan traktor yang mempunyai fungsi untuk menggemburkan tanah pertanian (Dok. <https://www.google.com>)

Memang jika dicermati perubahan yang ditimbulkan oleh program revolusi hijau itu, terfokus pada kehidupan bidang pertanian. Namun, pada kenyataannya perubahan yang terjadi juga menyasar berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, sistem panen yang dulunya biasa dilakukan secara tradisional melalui *sekhe-sekhe* atau perkumpulan-perkumpulan, kini telah diganti dengan sistem *majeg* atau sistem kontrak. Demikian halnya dalam bidang pertanian basah, sistem panen padi yang menggunakan anianai (*anggapan*) yang melibatkan *sekhe manyi* dan *pederep*, yakni orang yang melakukan kegiatan *mederep* (sistem *bawon*) dengan tujuan untuk mendapatkan upah panen dalam bentuk padi (*derepan*) menjadi hilang, karena diganti dengan sistem *majeg*.

Perubahan yang terjadi karena digantinya sistem *sekhe* panen dengan sistem kontrak (*majeg*) tidak saja berakibat hilangnya sistem *sekhe* secara fisik, tetapi ada hal-hal yang tidak terlihat secara nyata yang juga ikut hilang yang sebenarnya menjadi roh dari *sekhe* itu sendiri. Adapun hal dimaksud adalah rasa kebersamaan yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan *skhe* panen tersebut. Misalnya, acara menyemblih babi pada saat *Hari Raya Galungan* dan *Kuningan* dengan menggunakan dana yang diperoleh secara bersama-sama oleh *sekhe* panen tersebut juga ikut menghilang. Akibatnya, masyarakat yang terlibat dalam *sekhe* itu pun harus berusaha menyediakan uang sendiri untuk membeli daging untuk keperluan upacara dalam merayakan hari suci agama Hindu, yakni *Galungan* dan *Kuningan*.

Kasus lain yang tidak kalah menariknya dengan diberlakukannya UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, adalah adanya penyeragaman tata pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Penyeragaman pemerintahan desa ini, jika

meminjam istilahnya Antlov dan Cederroth (2001) disebut Jawanisasi. Adanya penyeragaman model ini, khusus untuk Bali, telah menimbulkan dualisme sistem pemerintahan, yakni pemerintahan *desa adat* dan pemerintahan desa dinas. Pada tataran realitas ternyata hubungan antara keduanya tidak selamanya bersifat kemitraan yang setara, akan tetapi sering pula mengarah pada hubungan yang bersifat dominatif.

Dalam konteks hubungan demikian, ternyata desa dinas sering berada pada posisi yang bersifat superior, sementara *desa adat* sering diposisikan pada posisi imperior. Berbagai ilustrasi semacam itu, merupakan bukti nyata, bahwa masuknya program revolusi hijau ke wilayah subak di Bali, termasuk subak di Kecamatan Pekutatan tidak saja berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi sosial, budaya, dan agama. Berdasarkan gambaran di atas, dan berbagai data kaneah yang didapat di lokasi penelitian ini, maka dapat dideskripsikan bahwa memang secara nyata telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya pertanian di subak abian, Kecamatan Pekutatan yang disebabkan karena faktor ideologis.

### **5.3 Perkebangn Jaman dari Pra-Modern Menuju Era Modernisme**

Jauh sebelum Bangsa Belanda datang ke Indonesia, yakni 1596 masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali telah memiliki pengetahuan dan teknologi tradisional yang oleh Giddens (2003) disebut tradisi. Ada pun tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali dapat berupa kearifan sosial (adat kebiasaan yang memedomani hubungan antarmanusia), dan dapat pula berupa kearifan lingkungan (adat kebiasaan yang memedomani hubungan antarmanusia dengan lingkungannya). Kemudian masuknya

ekspedisi perdagangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis De Houtman ke Banten pada tahun 1596, semula dimaksudkan untuk mencari informasi tentang sumber rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropah pada saat itu. Namun, dalam perkembangannya kedatangan ekspedisi perdagangan Belanda ke Indonesia, tidak semata-mata bermaksud mencari informasi tentang keberadaan sumber rempah-rempah, melainkan dimanfaatkan pula oleh delegasi tersebut untuk mempelajari dan mendalami adat-istiadat serta kebudayaan Nusantara. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, tentu dibarengi pula dengan kebudayaan yang mereka miliki, yakni kebudayaan Barat yang sering pula disebut kebudayaan modern. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa awal abad ke-16 kebudayaan Eropa (baca: kebudayaan modern) telah masuk ke Indonesia di bawa oleh orang-orang Belanda dan mulai saat itu, pengaruh kebudayaan Barat (kebudayaan modern) telah memasuki kepulauan nusantara ini.

Berbekalkan pengetahuan dan teknologi Barat yang dibawa oleh para pedagang Belanda tersebut, ternyata Cornelis De Houtman berhasil memberikan pengaruh yang kuat terhadap sistem perdagangan yang ada di daerah Banten dan sekitarnya, dan dalam waktu yang relatif singkat mereka telah mampu memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya pedagang Belanda di bawah pimpinan Cornelis De Houtman mendirikan organisasi dagang pada 20 Maret 1602, yang diberi nama VOC (*Verenigde Oudische Compagnie*). Secara ideologi sebenarnya organisasi ini ingin mendirikan persekutuan dagang yang dapat memonopoli aktivitas perdagangan di kawasan Asia.

Sebagi tindak lanjut dari tujuan didirikannya organisasi tersebut, maka pada tahun 1603, VOC yang didirikan oleh para pedagang Belanda mendapatkan izin untuk mendirikan kantor

perwakilan di Banten. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya oleh Pieter Both, yakni Gubernur Jenderal VOC yang pertama, kantor perwakilan ini dipindahkan dari Banten ke Jayakarta (Batavia). Mulai saat itulah VOC memainkan pengaruhnya dalam bidang perdagangan ke seluruh wilayah Nusantara. Strategi yang ditempuhnya adalah dengan melakukan penetrasi (tekanan) terhadap bangsa non-Belanda yang mencoba berani melakukan aktivitas perdagangan dengan penduduk pribumi.

Dalam perkembangannya ternyata orang-orang Belanda di bawah naungan persekutuan dagang VOC tidak hanya menanamkan pengaruh di bidang perdagangan terhadap penduduk pribumi, tetapi juga mulai mencengkramkan kuku imperialismenya dalam bidang kebudayaan (*culture*). Pada awalnya kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali pemerintah Belanda, akan tetapi dikendalikan penuh oleh persekutuan dagang yang bernama VOC. Meski pun hanya merupakan usaha dagang tetapi oleh pemerintah Belanda VOC diberikan berbagai keistimewaan, salah satunya adalah kewenangan untuk membentuk tentara sendiri.

Namun, karena ketatnya persaingan dagang pada waktu itu, dan di sisi lain mahal biaya perang dan mahal gaji pegawai yang harus dibayar ditambah lagi adanya unsur korupsi yang dilakukan pegawai VOC itu sendiri, maka pada 31 Desember 1799 VOC mengalami kebangkrutan dan secara resmi dibubarkan (<https://nasional.kompas.com/>) (diakses, 13 Januari 2020). Setelah VOC dibubarkan, kemudian kendali terhadap kepulauan Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan sebutan pemerintah Hindia-Belanda. Mulai saat itulah, pengaruh di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan mulai ditanamkan

oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat pribumi, yang dikenal dengan pengaruh kebudayaan modern.

Pengaruh kebudayaan modern yang dibawa oleh orang-orang Belanda mulai tampak pada awal abad ke-20, seiring semakin intensifnya pengaruh kebudayaan Belanda terhadap kebudayaan Bali, yang oleh orang Belanda ditanamkan melalui penetrasi sistem pendidikan. Kondisi ini tampaknya terus berlanjut sampai saat ini, dan pada akhirnya membuat masyarakat Bali sangat mudah menerima pengaruh kebudayaan Barat yang dapat diidentikan dengan kebudayaan modern.

Menurut Fakih (2004:29—30) modernisasi dengan pola pikir *oposisi biner* ternyata berujung pada pemujaan kebudayaan global putih (kebudayaan Barat). Hal demikian berakibat, tidak saja memperkuat pengadopsian kebudayaan Barat oleh masyarakat Bali, tetapi juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tradisi itu sendiri. Artinya, kuatnya pengadopsian kebudayaan Barat oleh masyarakat Bali, termasuk masyarakat Jembrana berakibat banyak tradisi masyarakat Bali, termasuk tradisi dalam bidang pertanian yang diadaptasikan, dimarginalkan, bahkan disingkirkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar modernisme. Terjadinya marginalisasi terhadap berbagai tradisi yang dimiliki masyarakat Bali, tidak hanya karena pengetahuan dan teknologi Barat yang bersifat dominatif dan hegemonik, tetapi juga karena di dalam modernisasi, tradisi dipahami sebagai bagian dari masalah yang harus ditransformasikan.

Demikian pula terjadinya modernisasi dalam bidang pertanian yang berproses melalui program revolusi hijau, juga tidak bisa dipisahkan dari adanya pemarjinalan, peminggiran, dan pergeseran budaya pertanian di lingkungan subak abian, termasuk di subak abian Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Seperti yang dikatakan Bapak Camat Pekutatan, saat

diwawancarai di Kantor Camat Pekutatan, 17 Januari 2020 sebagai berikut.

...dulu masyarakat Pekutatan, masih biasa melakukan berbagai aktivitas, khususnya di bidang pertanian dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Misalnya, mengerjakan lahan perkebunannya biasa dilakukan dengan sistem gotongroyong, tolong-menolong, dan dengan sistem *ngunun* (yakni membantu tetangga mengambil pekerjaan di kebun atau di ladang tanpa dibayar, tetapi melalui sistem barter tenaga). Hal ini sudah mengakar pada kehidupan petani, khususnya di subak abian yang ada di wilayah Kecamatan Pekutatan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sistem pertukaran tenaga seperti itu tampak mulai bergeser ke sistem upah, di mana ketika para petani ingin meminta bantuan tetangga dalam mengerjakan pekerjaan di lahan perkebunannya harus dibayar dalam bentuk uang yang disebut dengan sistem upah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya modern yang mula-mula pengaruh ini di bawa oleh orang-orang Belanda saat Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Kolonial Belanda (wawancara, 25 Januari 2020).

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**



**Gamabr. 5.3** Bapak Camat Pekutatan saat memberikan arahan kepada Kepala Desa dan Kelihan Subak se Kecamatan Pekutatan sebelum wawancara kepada masing-masing informan dilakukan. (Dok. Gde Arta).

Apa yang dikatakan Bapak Camat Pekutatan, dibenarkan oleh salah seorang informan yang juga seorang petani subak abian yang sekaligus Perbekel Desa Pulukan, yakni Bapak I Wayan Warsa (umur 47 tahun). Di antara berbagai pernyataannya dia berucap.



...dulu ketika masih kecil saya sudah biasa diajak oleh orang tua untuk membantu pekerjaan kecil di ladang, seperti menyabit rumput, untuk pakan ternak, membersihkan gulma tanaman, dan pekerjaan kecil lainnya. Waktu itu sekitar tahun 1970-an di desa saya masih lumrah saya lihat para petani untuk saling membantu dalam hal mengerjakan pekerjaan di ladang atau di kebun, seperti membersihkan gulma tanaman, memanen hasil kebun, melakukan pemupukan dan pekerjaan lainnya. Akan tetapi semenjak ada program pemerintah memberikan subsidi pupuk urea kepada para petani, mulailah sistem tolong-menolong atau sistem gotong-royong itu semakin menipis dalam kehidupan sektor pertanian. Bahkan kalau sekarang hampir semua pekerjaan di kebun dilakukan secara mandiri oleh para petani, dalam arti jika ada petani yang ingin mendapatkan bantuan dari tetangga, atau orang lain mereka harus memakai sistem buruh atau sistem upah (wawancara, 25 Januari 2020).

Berdasarkan kedua pendapat informan di atas, maka dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa pengusaan wilayah Nusantara oleh pemerintah Hindia Belanda ternyata tidak saja membawa pengaruh di bidang politik terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, termasuk masyarakat petani di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Hal ini terbukti dalam kehidupan bidang pertanian misalnya, setelah masuknya pengaruh budaya Barat yang dibawa oleh orang-orang Belanda ke Indonesia, termasuk Bali banyak nilai-nilai budaya pertanian yang semula dijadikan barometer ketinggian

nilai oleh masyarakat petani, kini telah ditransformasikan, dimarjinalkan, bahkan disingkirkan.

Hal ini menurut Giddens (2005:43) dikarenakan penerimaan terhadap modernisme berarti masyarakat harus mengontraskan, bahkan membenturkan dirinya dengan tradisi. Menurut asumsi penganut aliran modernisme revolusioner, ketertinggalan negara-negara sedang berkembang justru disebabkan oleh sistem sosial dan kelembagaan tradisional yang dimilikinya. Sebab cita-cita modernisasi menurut Rich (1999:276) adalah mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan melalui transformasi kultural untuk mewujudkan nilai-nilai efisiensi, ekonomis, efektif, dan rasional, serta terbebas dari tradisi, adat, dan ikatan komunalisme.

Demikian halnya yang terjadi di lingkungan subak abian, di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Semenjak diterapkannya program revolusi hijau banyak nilai tradisional, nilai-nilai kearifan lokal menjadi bergeser, seperti slogan *sagalak-sagalik, salunglung sabayantaka, paras paros sarpenaya* telah bergeser menjadi slogan *mati iba hidup kae*. Masyarakat Jembrana, khususnya masyarakat petani subak di kawasan subak abian, Kecamatan Pekutatan, dulu biasa menjalani kehidupan dengan budaya kebersamaan dengan prinsip *saling runguang, saling asah, saling asuh, dan saling asih*, kini telah berubah menjadi kehidupan modern yang berbasis pada sifat-sifat eksklusifisme, egoisme, dan individualisme.

Terjadinya penggeseran terhadap berbagai tradisi yang dimiliki masyarakat, akibat masuknya arus modernisasi ke daerah Bali, berakibat pula banyak organisasi tradisional yang berbasis kearifan lokal masyarakat Bali, seperti *sekhe-sekhe* mengalami kematian. Seperti *sekhe numbeg, sekhe semal,*

*sekhe manyi*, dan lain-lain digeser oleh sistem yang lebih praktis dan ekonomis, yakni sistem buruh. Bergesernya berbagai organisasi tradisional dan beraneka kebudayaan masyarakat Bali akibat serangan arus modernisasi, ternyata tidak saja menyangkut kehidupan bidang pertanian, tetapi juga dalam konteks kehidupan berkesenian. Misalnya, masuknya pesawat TV sebagai bagian dari produk kebudayaan modern mampu menyajikan berbagai hiburan kepada masyarakat yang mempunyai daya tarik yang sangat tinggi, sehingga organisasi tradisional yang bergerak dalam bidang kesenian, seperti *sekhe arja*, *sekhe drama gong*, *sekhe janger*, dan berbagai jenis *sekhe* tradisional yang bergerak di bidang seni mengalami kebangkrutan, karena tidak mampu bersaing dengan hiburan yang disajikan oleh kotak ajaib yang bernama televisi tersebut.

Padahal jika dicermati secara mendalam apapun pesan yang disampaikan oleh media komunikasi kebudayaan yang disebut TV itu, merupakan konstruksi informasi yang mengandung ideologi, dalam arti apa pun bentuk hiburan yang ditampilkan di televisi sebenarnya mengandung unsur kepentingan, niat untuk memperoleh keuntungan, dan kekuasaan (Noorman, 2003). Memang gejalanya tidak tampak secara nyata, tetapi acapkali diselipkan secara tersembunyi di balik tayangan iklan atau gaya para selebriti yang dengan penuh percaya diri melenggak-lenggok di layar televisi. Ketika masyarakat menyaksikan gaya hidup yang ditampilkan oleh para selebriti di layar TV, tentu masyarakat penontonya ingin mengikuti apapun gaya hidup yang ditampilkan oleh para selebriti tersebut. Pada umumnya gaya hidup yang ditampilkan para selebriti tersebut adalah gaya hidup modern yang berkiblat pada kebudayaan Barat.

Jika, secara terus-menerus masyarakat disuguhi gaya-gaya hidup seperti itu, maka lama-kelamaan, disadari atau pun

tidak mereka akan cenderung mengikutinya. Dalam konteks teori psikologi inilah yang disebut proses internalisasi, yakni proses pemilikan sikap moral dari sikap moral heterogen ke sikap moral autonom (Ahmadi, 1991:19). Keterjeratan orang Bali terhadap kebiasaan nonton TV di ruang keluarga secara eksklusif, dapat pula menggeser berbagai kebiasaan tradisional yang umum dilakukan oleh masyarakat Bali sebelumnya. Misalnya, tradisi berkumpul di ruang publik, seperti di *bale banjar*, di warung kopi, atau ruang publik lainnya untuk sekadar ngobrol atau *ngorta* menjadi semakin langka, bahkan tidak ada sama sekali.

Berkaitan dengan kebiasaan nonton TV di ruang keluarga secara eksklusif, dan berdasarkan data kaneh yang diperoleh di lapangan selama peneliti melakukan penelitian lapangan, maka dapat diketahui bahwa hampir seluruh keluarga di Kecamatan Pekutatan telah memiliki pesawat TV, paling sedikit satu unit di setiap keluarga. Adanya pengaruh TV seperti itu, membuat generasi muda jaman sekarang enggan untuk mengambil pekerjaan petani. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Medewi Bapak Nengah Wirama dengan mengatakan sebagai berikut.

Memang saya akui anak-anak sekarang tidak ada yang tertarik dengan pekerjaan pertanian, termasuk di desa kami Desa Medewi. Hal ini dikarenakan pekerjaan pertanian tidak menjanjikan secara finansial. Dalam arti, sangat jarang ada orang yang kaya dengan mengandalkan pekerjaan di sektor pertanian murni. Selain itu, pekerjaan pertanian identik dengan pekerjaan berat dan kotor, oleh karena itu banyak juga orang tua sekarang yang tidak mengizinkan anak-anaknya terjun menjadi petani (wawancara, 25 Januari 2020).

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**



**Gambar 5.5 Kepala Desa Medewi, sesaat setelah diwawancarai  
Di Kantor Camat Pekutatan (Dok. Arta)**

Apa yang dikatakan Kepala Desa Medewi di atas, membuktikan bahwa melalui siaran TV masyarakat, termasuk masyarakat Pekutatan dapat memperoleh berbagai informasi yang kadang-kadang dapat berpengaruh positif, tetapi juga tidak tertutup kemungkinannya membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menurut Atmadja, (2020:105)

apa pun bentuk tayangan TV, terutama tayangan iklan tidak dapat dilepaskan dari gaya hidup para selebriti dan desain barang yang diiklankan tersebut. Hal ini diperkuat Aldin (dalam Atmadja, 2010:105) bahwa desain tidak bisa dilepaskan dari persoalan ideologi, yakni individualisme dan eksklusifisme. Ketika, ideologi individualisme dan eksklusifisme merasuk jauh ke dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, maka hal ini dapat menggeser pola kehidupan kolektivisme atau dalam konteks lokal disebut budaya *rungu* (kepedulian sosial kepada tetangga), ke arah pola hidup individualisme dan eksklusifisme.

Padahal budaya *rungu* merupakan modal sosial yang sangat penting bagi upaya pengembangan solidaritas sosial dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan di lokasi penelitan ini, dapat digambarkan bahwa betapa kuatnya budaya modernisme telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali pada umumnya, dan masyarakat Pekutatan pada khususnya dewasa ini. Hal ini terlihat jelas dari solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat mulai bergeser, dari pola hidup saling *runguan* telah bergeser ke arah kehidupan individualisme dan eksklusifisme dengan jargon "*mati iba hidup kae*".

Pola kehidupan semacam ini ditandai dengan mulai tergesernya sistem tolong-menolong atau sistem gotong-royong dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan telah diganti dengan sistem upah atau sistem buruh. Demikian pula tergesurnya berbagai nilai kearifan lokal sebagai perekat sosial kehidupan masyarakat dan diganti dengan nilai-nilai modern, terutama dalam kehidupan bidang pertanian membuktikan bahwa betapa budaya pertanian di subak abian, di Kecamatan Pekutatan, telah bergeser ke arah kebudayaan modern.

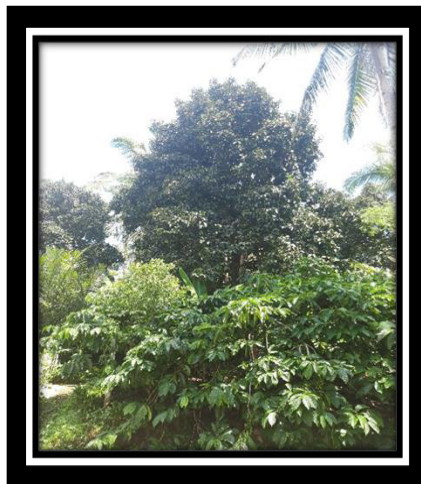
#### 5.4 Faktor Orientasi Pembangunan Ekonomi

Orientasi pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah atau suatu negara biasanya ditandai dengan menguatnya relasi antara kekuasaan politik dengan ekonomi. Dalam konteks Kecamatan Pekutatan pembangunan ekonomi masyarakatnya diorientasikan berdasarkan sumber-sumber kehutanan, pertanian sawah, dan yang paling utama adalah dari perkebunan tanaman keras yang terorganisir dalam subak abian. Menurut Dharmika (2019:76) orientasi pembangunan seperti itu, telah menempatkan manusia sebagai subjek dan makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang memanfaatkan sumber daya perkebunan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sebagai manusia. Berkenaan dengan hal itu, dan berdasarkan bukti-bukti sejarah, sejak tahun 1908 kerajaan-kerajaan di Bali di bawah koordinasi Pemerintahan Belanda di Kabupaten Jembrana telah melakukan pengalihfungsian hutan lindung menjadi areal tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi yang sangat tinggi, yakni tanaman kopi, cengkeh, durian, manggis, dan coklat (kakao). Bukti pengalihfungsian hutan menjadi tanaman keras di wilayah subak abian Kecamatan Pekutatan, dapat dilihat dari beberapa gambar di bawah ini.

**MODERNISASI PERTANIAN:  
PERUBAHAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA**



**Gambar 5.6** Jenis tanaman keras yang dibudi dayakan para petani di Subaka Abian Kecamatan Pekutatan, Kab. Jembrana, (Dok Arta)



**Gambar 5.7** Tanaman manggis yang ditanam di sela-sela pohon kopi di Subak Abian Badingkayu, Kec. Pekutatan, Jembrana, (Dok. Arta)



Lebih lanjut menurut Dharmika pengetahuan masyarakat Bali tempo dulu tentang hutan telah dikongkritkan dalam bentuk penetapan kawasan hutan Bali Barat seluas 20.600 ha pada tahun 1917 sebagai tanaman perlindungan alam (*natuur park*). Sebagai tindak lanjut dari pengimplementasian pengetahuan masyarakat Bali tentang fungsi hutan, maka pada tahun 1924 hutan-hutan di Bali telah ditetapkan sebagai hutan tutupan. Dalam arti masyarakat mulai saat itu tidak diperkenankan lagi untuk melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian tanaman perkebunan, atau untuk keperluan pemukiman. Kebijakan penatabatasan kawasan hutan merupakan bagian dari politik teritorialisasi yang dilanjutkan oleh pemerintahan kolonial dan juga oleh pemerintahan negara merdeka. Pada kenyataannya, pelaksanaan teritorialisasi ditandai dengan pembagian wilayah-wilayah menjadi zona-zona politik dan ekonomi. Hal ini mengandung strategi untuk mengatur kembali penduduk, mengontrol sumber daya, dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah tersebut dapat dimanfaatkan.

Namun, seiring berkembangnya waktu dan semakin menguatnya pengaruh modernisme, membuat pengetahuan tradisional masyarakat Bali semacam itu mulai mengalami pergeseran, termasuk pengetahuan tradisional dalam bidang pertanian. Pasalnya, menurut Atmadja, (2020:84) modernisasi atau westernisasi yang menerpa kehidupan masyarakat Bali, tidak saja mengakibatkan perubahan atau pergeseran kebudayaan fisik, dan sistem sosial, tetapi juga pada sistem budaya. Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh adanya pergeseran budaya semacam itu adalah, masyarakat Bali terlibat dalam suatu persaingan, yakni persaingan untuk mendapatkan uang, kekuasaan, dan prestise. Jika hal ini

dikaitkan dengan kerangka pemikiran Marx, maka tampak ada kesepahaman, seperti tampak pada uraian berikut ini.

Dalam kerangka pemikiran Marx, individu membeli sesuatu barang dengan memperhatikan nilai guna dan harga barang tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak juga orang yang terkadang tidak tahu untuk apa dia membeli suatu produk, yang penting membeli dulu. Entah nantinya berguna atau tidak bukan masalah. Orang membeli suatu produk dengan harapan nantinya, dia menjadi siapa dan bukan untuk mendapatkan apa atas produk yang dibelinya itu. Akhirnya, orang dalam memilih barang lebih mempertimbangkan nilai simbolik dibandingkan nilai guna (nilai utilitas) atas barang yang dibelinya (Liestyasari, 2005:89).

Berangkat dari pandangan Marx tersebut, dan jika dikaitkan dengan kondisi nyata yang terjadi di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, maka tampak ada kesesuaian. Seperi yang dikatakan oleh salah seorang informan, yakni Bapak Ketut Suarjana (52 tahun) seorang petani dan juga Kepala Desa Manggissari sebagai berikut.

...hidup di jaman sekarang memang serba sulit, karena persaingan hidup semakin ketat, terutama dalam bidang ekonomi. Kadang-kadang saya bingung karena hampir segala kebutuhan hidup membutuhkan uang. Sementara mencari uang sangat susah. Akan tetapi di satu sisi kita juga kurang selektif dalam hal membeli barang. Misalnya, kadang-kadang kita belum mendesak sekali

untuk membeli sesuatu, tetapi karena tetangga kita membeli kita juga ikut-ikutan membeli. Atau kita sudah punya tetapi adanya di ladang, lalu kita lebih suka membeli dari pada memetik di kebun sendiri (wawancara, 25 Januari 2020).

Apa yang dikatakan informan di atas menunjukkan bahwa masuknya pengaruh modernisme ke dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Bali telah menimbulkan orientasi baru di bidang pembangunan ekonomi. Artinya, selain meningkatnya libido masyarakat dalam hal berbelanja, ada semacam orientasi masyarakat bahwa segala sesuatu bisa dibuat memiliki nilai ekonomi. Oleh karenanya di jaman sekarang apa pun bisa dijual asal mendapatkan uang. Bergesernya orientasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi semacam itu dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat petani.

Misalnya, sistem gotong-royong dan tolong-menolong telah bergeser ke sistem upah, sistem memanen hasil pertanian yang semula dilakukan sendiri oleh petani, kini telah bergeser ke sistem *pajeg* (yakni, para pedagang membeli hasil pertanian para petani secara langsung di pohonnya). Artinya, sistem panen yang dulu dilakukan secara tradisional, yakni para petani memanen hasil pertaniannya dan membawa hasil panennya sendiri ke rumah untuk kemudian dijual ke pasar. Kini cara-cara seperti itu telah dikonversikan dengan cara yang lebih praktis, yaitu untuk sebagian komoditas pertanian para petani dijual secara langsung di pohonnya, sehingga mereka tidak perlu repot-repot ngurusi proses produksi pasca panen, atau petani tinggal terima uang di tempat. Seperti yang dikatakan Jero Mangku I Nengah Simpang (umur 65 tahun) yang juga

seorang Petani kopi dan diselang-selingi dengan pohon manggis sebagai berikut.

Kalau sekarang petani lebih suka memanen kebunnya dengan sistem *pajeg* dari pada harus memetik dan memasarkan sendiri hasil kebunnya. Memang dengan cara memanen sendiri kadang-kadang hasilnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan sistem *pajeg*, tetapi repotnya juga bukan main. Oleh karena itu saya lebih suka menjual hasil kebun langsung di ladang dengan sistem *pajeg*, dibandingkan memetik dan memasarkan sendiri hasil kebun saya. Sebab di samping sudah pasti mendapat uang, kalau dibawa ke pasar juga belum tentu laku. Oleh karenanya cara ini menurut saya yang paling mudah dan paling praktis dilakukan (wawancara, 17 Januari 2020).

Ketika ditanya sampai berapa laku setiap pohonnya untuk tanaman manggis, sambil tersenyum sedikit malu-malu dia menjawab sebagai berikut.

Itu sangat tergantung dari banyak sedikitnya, dan bagus tidaknya buah manggis yang ada di pohonnya. Biasanya kalau buah manggisnya banyak dan kondisinya bagus, maka satu pohon bisa laku sampai Rp 625.000/pohonnya. Atau biasanya saya menjualnya dengan cara setiap 4 pohon saya jual buahnya saja seharga Rp 2.500.000 rupiah. Tetapi kalau buahnya tidak terlalu banyak dan kondisinya juga tidak terlalu bagus bisa mencapai Rp 1.500.000 sampai 2.000.000 per pohon untuk buahnya saja untuk satu musim (wawancara 25 Januari 2020).

Apa yang dikatakan informan di atas, dan jika dikaitkan dengan gagasan Ritzer (2002:2), maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Bali, termasuk masyarakat Pekutatan telah terjerat pada apa yang disebut ideologi *McDonaldisasi*. Dalam konteks kajian ini penulis memakai istilah *McDonaldisasi* tidak dalam rangka untuk membahas *McDonald's* sebagai bisnis waralaba makanan cepat saji secara substantif. Melainkan, untuk menggambarkan bahwa masyarakat Bali di era sekarang telah terpengaruh oleh pola-pola kehidupan instan (cepat saji), sebagai akibat bergesernya berbagai nilai kearifan lokal masyarakat Bali, oleh prinsip-prinsip dasar restoran waralaba *fast-food*, sebagai cerminan budaya Amerika (budaya Barat).

Bergesernya pola-pola kehidupan masyarakat semacam ini berdampak sangat luas terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Misalnya, penjualan hasil panen produksi pertanian dengan sistem *pajeg* berakibat berkurangnya kontak sosial yang terjadi antarmanusia, yang dalam konteks ini telah terjadi apa yang disebut dengan istilah dehumanisasi. Artinya, dalam sistem panen yang dilakukan secara gotong-royong atau tolong-menolong antaranggota subak, di mana para petani sambil memanen hasil pertaniannya dapat kesempatan untuk saling bercerita, saling bertukar informasi, dan saling bertukar pengalaman dengan sesama anggota subak. Akan tetapi ketika panen dilakukan dengan sistem *pajeg* komunikasi yang terjadi antar tukang *pajeg* dengan pemilik kebun hanya berlangsung seadanya sesuai keperluan proses transaksi.

Hal ini terjadi menyerupai proses transaksi yang dilakukan antara pegawai *McDonald's* dengan para pelanggan, di mana hakikat dari restoran *fast-food* adalah menjadikan hubungan antara pegawai restoran dengan pelangganya berlangsung begitu cepat. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa

pembeli ingin segera bisa menikmati makanan yang dipesannya, sementara di sisi lain pelayan restoran juga segera ingin melayani pesanan dari pelanggan berikutnya. Terkait dengan eksistensi perusahaan restoran wara laba *McDonald's*, masyarakat Bali dapat dikatakan sangat menggemari suguhan ala *McDonald's*, dengan alasan selain karena praktis, *McDonald's* merupakan simbol dari paham modernisme. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika *desa adat*, *banjar adat*, dan *sekhe teruna-teruni* banyak yang rela menjadi agen *McDonaldisasi*, sebagai orientasi dari pembangunan ekonomi. Semua ini bermuara pada persoalan ekonomi, yakni untuk menggali sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desa.

Hal ini juga membuktikan betapa kuatnya pengaruh modernisme telah merasuk dalam kehidupan masyarakat Bali, termasuk masyarakat di Kecamatan Pekutatan. Sampai-sampai berbagai nilai kearifan lokal, telah digerus oleh masuknya paham modernisme, terutama prinsip-prinsip restoran waralaba *McDonald's*. Masuknya sikap instan, pragmatisme, dan sikap efektif, serta efisien dalam kehidupan masyarakat saat ini, secara tanpa disadari sebenarnya telah mengusur sikap penyabar, asketis, dan melakukan sesuatu sesuai prosedur yang di zaman dulu dijadikan barometer ketinggian nilai oleh masyarakat Bali itu sendiri, tetapi kini kenyataannya telah dimarjinalkan, dipinggirkan, bahkan disingkirkan.

### **5.5 Faktor Pengetahuan dan Teknologi**

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ada berbagai batasan tentang pengetahuan yang dikemukakan oleh para ahli sesuai sudut pandangnya masing-masing. Seperti yang dikatakan Burhanuddin (1988:6) pengetahuan adalah produk penalaran. Batasan yang sedikit berbeda disampaikan

oleh Mohamad Hatta (1979:9) yang menegaskan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, baik berdasarkan pengalaman sendiri maupun berdasarkan keterangan. Jadi pengetahuan pada intinya adalah produk penalaran yang membuat seseorang mengetahui sesuatu, baik berdasarkan pengalaman sendiri maupun berdasarkan keterangan dari orang lain. Dalam konteks kajian ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan.

Menurut Suriasumantri (2003:3) ilmu merupakan salah satu dari buah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada diri manusia itu sendiri. Atau dengan istilah lainnya, ilmu adalah salah satu dari pengetahuan manusia. Terkait hal tersebut dan untuk bisa memahami dan menghargai ilmu pengetahuan, maka manusia harus memahami hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebab dengan memahami hakikat dari sebuah ilmu pengetahuan yang sering disebut aspek ontologi ilmu, maka bukan saja bermanfaat bagi upaya peningkatan apresiasi manusia terhadap keberadaan ilmu, tetapi juga dapat membuka mata manusia atas berbagai kekurangan dari ilmu pengetahuan tersebut.

Maksud dari paparan di atas adalah untuk memberi pemahaman yang benar terhadap keberadaan ilmu pengetahuan, sebab selama ini ada orang yang begitu mendewa-dewakan ilmu sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Sementara di sisi lain ada pula orang yang memalingkan muka terhadap kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Atau dengan bahasa lainnya sampai saat ini masih ada orang yang tidak mau melihat kenyataan betapa sebenarnya ilmu telah membentuk peradaban seperti yang dapat dilihat pada realitasnya sekarang ini. Sebagai seorang

ilmuan, melihat dua pandangan yang berbenturan secara diametral tersebut, maka peneliti mengambil posisi di tengah-tengah, yakni meski pun ilmu memang memberikan kebenaran, akan tetapi kebenaran keilmuan bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran dalam kehidupan di dunia ini.

Secara faktual dalam kehidupan manusia banyak sumber kebenaran lain yang masih diyakini kebenarannya oleh umat manusia di bumi ini, selain kebenaran ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia terlalu rumit untuk dianalisis hanya dengan satu jalan pemikiran. Oleh karenanya, menurut Suriasumantri adalah ketinggian yang tidak memiliki dasar sama sekali, bila ada orang yang beranggapan bahwa ilmulah *alpha* dan *omega* dari kebenaran tersebut. Sebab dalam kehidupan manusia ini, tetap ada ruang bagi kebenaran falsafah, seni, agama, dan sebagainya di samping kebenaran ilmu pengetahuan. Terkait hal tersebut, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks penelitian ini dapat dipandang sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pergeseran budaya pertanian subak abian, di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh orang-orang Belanda ke Indonesia pada saat pemerintah Kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak telah memengaruhi berbagai pengetahuan dan teknologi tradisional yang telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia saat itu, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Bali, termasuk masyarakat Jembrana.

Akibatnya, banyak pengetahuan dan tradisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali yang mengalami pamarjinalan, pelenyapan, dan pergeseran yang disebabkan oleh dinamika pengetahuan masyarakat modern. Seperti yang



dikatakan Jero Mangku Wayan Mertha, yakni Jero Mangku Desa, Desa Panyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana sebagai berikut.

Kalau jaman dulu saat saya masih kecil saya ingat betul dalam pelaksanaan upacara agama terkait dengan upacara subak semua sarana *upakara*-nya dibuat secara gotong-royong oleh *krama* subak. Jadi, kalau dulu orang-orang tua hampir semuanya bisa membuat berbagai macam *banten* untuk keperluan upacara. Tetapi sekarang sebagian sarana upacara diperoleh oleh *krama* subak dengan cara membeli. Akibatnya, tidak semua warga masyarakat sekarang bisa membuat *banten*, karena jaman sekarang *banten* juga bisa dibeli di tukang *banten* (wawancara 25 Januari 2020).

Berkaitan dengan bergesernya pengetahuan petani dalam bidang pertanian di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, seorang informan yang bernama Jero Mangku Wayan Madik (umur 63 tahun) yang juga seorang petani tanaman kering dari Banjar Pasut, Desa Pengragoan menyatakan sebagai berikut.

Di wilayah subak saya sekarang banyak tradisi baru yang diterapkan oleh petani terkait dengan sistem usaha pertanian. Misalnya, untuk tanaman cengkeh atau durian, kalau jaman dulu petani biasa memanen hasil pertaniannya sendiri, setelah dipanen lalu dibawa ke rumah untuk kemudian dipasarkan sendiri. Namun, sekarang dengan teknologi baru, pengetahuan baru tentang sistem usaha tani, para

petani tidak lagi memanen hasil pertaniannya sendiri, tetapi mereka lebih suka memilih sistem panen yang praktis, yakni dengan sistem *pajeg* (kontrak). Dengan sistem ini petani lebih gampang dan lebih praktis, tinggal terima uang di tempat, sehingga tidak perlu repot-repot lagi membawa hasil panen ke rumah untuk kemudian dijual ke pasar. Mereka cukup terima uang di tempat selesai urusan ucapnya sambil tersenyum (wawancara, 25 Januari 2020).

Berangkat dari kedua pernyataan informan di atas dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa bekembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, ternyata berakibat terjadinya pergeseran berbagai pranata sosial, dan pranata budaya dalam bidang kehidupan petani di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Jika meminjam gagasan (Rich, 1992:76) maka dapat dikatakan bahwa pamarjinalan, pelenyapan, pergeseran, atau apa yang disebut dengan detradisionalisasi yang terjadi dalam masyarakat, sebenarnya berkaitan erat dengan ciri dinamis masyarakat modern, yang disebut reflektivitas. Menurut Giddens (2005) reflektivitas merupakan ‘praktik sosial yang terjadi secara terus-menerus, diuji, dan diubah berdasarkan informasi yang baru masuk, yang paling praktis. Berangkat dari gagasan tersebut, dalam konteks sosial kemasyarakatan apa pun bisa direfleksikan apakah hal tersebut merupakan hal yang bersifat tradisional atau hal yang bersifat modern, semua bisa direfleksivaskan dan diganti dengan hal yang baru, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai kepraktisan yang lebih tinggi.

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka tidak mengherankan jika banyak pengetahuan masyarakat Bali, termasuk masyarakat petani di Kecamatan Pekutatan,

Kabupaten Jembrana mengalami reflektivitas, dan digantikan dengan nilai-nilai baru, yakni nilai-nilai modernisme yang sifatnya lebih praktis, sehingga masyarakat memperoleh kenikmatan hidup secara lebih optimal. Akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya reflektivitas ini, khususnya bagi masyarakat Pekutatan adalah hilangnya modal kultural dan modal sosial yang sebenarnya sangat berharga bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dari aspek sosiokultural kondisi demikian tentu bisa mendatangkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat. Sebab menurut (Dove, *ed.*, 1985) tidak semua modal kultural dan modal sosial menghambat jalannya pembangunan. Misalnya, dongeng sebagai media pendidikan yang keberadaannya saat ini telah terpinggirkan, bahkan telah tersingkirkan dari kehidupan keluarga masyarakat Bali, termasuk masyarakat Kecamatan Pekutatan. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan yang disampaikan oleh Jero Mangku I Nengah Simpang, Jero Mangku Pura Pengulu Desa, *Desa Adat Badingkayu* sebagai berikut.

*Yen mangkin indik mesatua olih para pengelingsir majeng ring cucun-cucun ipun utawi, majeng ring pianak-pianak ipune ring krama Desa Badingkayu, pamekas, sampun jarang pisan. Santukan para orang tua alit-alite mangkin pada sibuk ring kekaryane soang-soang. Siosan ring punika alit-alite mangkin taler ten wenten sane tertarik ring satuasatua kunone. Napi mawinan, santukan mangkin sampun akeh wenten hiburan untuk alit-alite, sekadi TV, HP, radio, tur sane tiosan. Metiosan banget ring kawentenan jagate imaluan, rintajekan titiang kari alit-alit, sadurung sirep ipekak, idadong, utawi*

*ibapa lan imeme sering pisan ngicenin satua mangde alit-alite gelis sirep.* (Jaman sekarang para orang tua sangat jarang memberikan ceritra dongeng kepada cucunya atau kepada anak-anaknya sebelum mereka tidur. Pasalnya jaman sekarang orang tua pada sibuk dengan urusan pekerjaannya masing-masing, di samping juga anak-anak jaman sekarang tidak tertarik mendengarkan ceritra dongeng, karena sudah ada hiburan yang lebih menarik, yakni TV, HP, radio, dan lain-lain) (wawancara, 27 Januari 2020).

Mencermati pernyataan informan di atas, dapat dikembangkan sebuah kerangka pemikiran bahwa di jaman sekarang sudah sangat jarang orang tua sempat memberikan ceritra dongeng (*folklore*) kepada anak-anak atau cucunya sebelum mereka tidur. Hal ini disebabkan, selain karena faktor kesibukan orang tua dalam urusan ekonomi keluarga, anak-anak juga kurang tertarik untuk mendengarkan ceritra dongeng dari orang tuanya, karena sudah ada hiburan dalam bentuk TV, HP, dan hiburan lainnya, yang lebih menarik karena kecanggihan teknologinya. Padahal menurut Giddens (3003), pendidikan dengan media dongeng sangat berguna untuk mengembangkan hubungan yang murni (*pure relationship*), yakni komunikasi emosional berdimensi kasih sayang dan cinta orang tua terhadap anaknya. Selain itu, Menurut Danandjaja (dalam Atmadja, 2010:33) dongeng juga mengandung aspek hiburan dan pendidikan, berupa sosialisasi kearifan tradisional. Di mana, *satua Bali* (ceritra rakyat orang Bali) di dalamnya diwarnai oleh konsep *rwa bhineda* yang berisi penggambaran tentang baik dan buruk, yang dikaitkan dengan konsep *karma phala*.

Jadi, masuknya pengetahuan dan teknologi Barat (modern) ke Indonesia, termasuk di Kecamatan Pekuatan, Kabupaten Jembrana, ternyata berakibat tergusurnya berbagai tradisi masyarakat, seperti sistem gotong-royong sebagai pranata sosial masyarakat agraris, sistem panen hasil produksi pertanian, termasuk cerita dongeng sebagai media pendidikan yang dalam konteks kebudayaan Bali disebut *masatua* juga ikut tergusur. Padahal *satua Bali* sebenarnya sangat efektif untuk membentuk keperibadian (karakter) anak-anak sebab di dalam cerita Bali, selalu digambarkan tentang kehidupan dua aktor yang mewakili kebaikan dan keburukan.

Terkait dengan penokohan aktor dalam cerita tersebut biasanya diakhir cerita, dikisahkan bahwa aktor yang berperilaku baik memperoleh *karma phala* positif, sedangkan aktor yang berperilaku jahal (tidak baik) akan mendapat pahala yang buruk (negatif). Oleh sebab itu, penggunaan cerita dongeng sebagai media pendidikan di lingkungan keluarga masyarakat Bali, sebenarnya mempunyai makna penting bagi proses penerusan berbagai nilai kearifan sosial masyarakat Bali, dengan penekanan pada etika hitam-putih, dalam konteks *karma phala*.

Berdasarkan data kaneah yang diperoleh di lokasi penelitian, sampai saat ini proses pendidikan melalui dongeng keberadaannya sudah sangat langka. Hal ini dikarenakan peran dongeng sebagai media pendidikan telah digantikan oleh TV sebagai media kebudayaan yang mampu menampilkan berbagai aneka kartun dengan animasi yang sangat canggih. Jadi, secara faktual anak-anak lebih menyukai kartun dibandingkan dongeng, karena aspek hiburan dan kecanggihan teknologinya. Padahal jika dianalisis secara lebih mendalam di balik tayangan film kartun mengandung ideologi negara yang membuat film kartun tersebut.

Demikian pula jika diperhatikan, ketika anak-anak menonton film kartun, tentu ada tayangan lain yang juga ikut ditonton oleh anak-anak itu sendiri. Misalnya, di sela-sela tayangan film kartun, produser TV juga sering menayangkan iklan, yang di baliknya juga terselip ideologi, yakni ideologi kapitalis. Artinya, melalui tayangan iklan di TV anak-anak secara bersamaan juga mengonsumsi berbagai ideologi yang ada di balik tayangan iklan tersebut. Tanpa disadari alam bawah sadar anak, langsung ataupun tidak akan disasar oleh pelbagai pengetahuan tentang budaya global, di balik produk yang diiklankan oleh produser TV tersebut. Dengan sistem demikian tradisi dan budaya lokal yang seharusnya ditransformasikan oleh orang tua sebagai guru yang pertama dan utama di lingkungan keluarga pun akhirnya tergusur. Jadi dengan demikian sangat beralasan, jika ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, ikut menjadi faktor penyebab terjadinya pergeseran budaya pertanian subak abian di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember.

**BAB  
VI**

**Perubahan Budaya  
Pertanian Subak Abian Di  
Kecamatan Pekutatan,  
Kabupaten Jembrana**

**6.1 Perubahan Imprastruktur Material**

**6.1.1 Terjadinya Perubahan Teknologi**

Secara umum perubahan sosio-kultural masyarakat manusia cenderung dimulai dari perubahan pada aspek infrastruktur material, kemudian mempengaruhi perubahan pada aspek struktur sosial, dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap perubahan pada aspek superstruktur ideologis. Menurut Sanderson (1993:60) aspek infrastruktur material berisi bahan-bahan baku dan bentuk-bentuk sosial dasar yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Infrastruktur sebuah masyarakat adalah komponen yang paling dasar dalam

kehidupan masyarakat. Artinya, tanpa komponen tersebut, manusia tidak akan mungkin bisa bertahan hidup secara fisik.

Secara garis besar aspek infrastruktur sebuah masyarakat terdiri atas empat unit dasar, yakni (1) teknologi; (2) ekonomi; (3) ekologi; dan (4) demografi. Menurut Lenski, (1970) teknologi terdiri atas informasi, peralatan, dan teknik yang dengannya manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Lebih lanjut menurut Lenski, teknologi tidak hanya berisi peralatan (objek) yang bersifat fisik atau kongkrit, tetapi juga berisi pengetahuan yang dapat diaplikasikan oleh manusia dengan cara tertentu. Dengan mengacu pada Lenski, maka dapat digambarkan bahwa teknologi tersebut dapat meliputi benda-benda artepak, dan dapat pula berupa pengetahuan atau cara melakukan sesuatu. Misalnya, kursi, meja, mobil, dan peralatan lainnya dapat dikategorikan sebagai unsur teknologi, tetapi pengetahuan tentang bagaimana menjinakan dan memelihara tanaman dan binatang liar juga termasuk unsur teknologi.

Dalam konteks analisis penelitian ini yang dimaksud teknologi adalah menyangkut benda-benda artepak yang dapat membantu memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan, khususnya di bidang pertanian seperti traktor, mesin pencukur rumput, alat penyemprotan hama tanaman, dan lain-lain. Di sisi lain teknologi dapat pula berupa pengetahuan dalam bidang pertanian yang dapat mempercepat dan mempermudah proses peningkatan hasil pertanian. Perubahan teknologi di bidang pertanian yang berkaitan dengan artepak adalah cangkul untuk menggemburkan tanah diganti dengan traktor, sabit untuk membersihkan rumput diganti dengan mesin pencukur rumput, dan peralatan lainnya. Teknologi sebagaimana dijelaskan Lenski di atas, selain berupa peralatan bisa juga berupa



informasi, dan teknik yang dengannya manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

Teknologi dalam suatu masyarakat berkembang, karena inovasi yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut (Lauer, 1989) Inovasi sering dipelopori oleh orang yang memiliki virus pembaharuan atau orang yang memiliki motif berprestasi tinggi. Selain itu, perubahan juga bisa terjadi karena adanya kontak sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga menimbulkan difusi kebudayaan. Atau bisa jadi pula perubahan sosial itu karena sengaja dirancang oleh sebuah negara yang lazim disebut “pembangunan” (Lauer, 1989: Suparlan, 1986). Dalam konteks penelitian ini, perubahan atau pergeseran budaya, khususnya dalam bidang pertanian itu terjadi karena sengaja dirancang oleh pemerintah Orde Baru dalam rangka penerapan program revolusi hijau untuk memacu laju pembangunan bidang pertanian guna menjamin ketersediaan pangan bagi 111,8 juta jiwa penduduk Indonesia, pasca terjadinya krisis politik pada tahun 1965 (<https://www.google.com>).

Selain untuk melakukan antisipasi bagi berlangsungnya ketahanan pangan masyarakat Indonesia setelah mengalami krisis politik di tahun 1965, program revolusi hijau sebagai salah satu program pembangunan juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh modernisme. Dikatakan demikian sebab menurut Myrdal (dalam Rich, 1999:276) tujuan dilakukannya pembangunan secara ideal adalah untuk menuju masyarakat modern (*modernization ideals*). Terkait dengan hal tersebut banyak negara di dunia ini yang mendambakan dan menyelenggarakan pembangunan sebagai suatu cara untuk mencapai kehidupan yang modern.

Berangkat dari uraian di atas, dan jika dicermati secara lebih mendalam, maka inovasi, difusi, dan pembangunan

merupakan suatu rangkaian proses perubahan sosial, bahkan sering tumpang tindih satu dengan yang lainnya, sehingga secara faktual sulit dibedakan. Demikian pula terjadinya pergeseran budaya pertanian di subak abian, Kecamatan Pekuatan, Kabupaten Jembrana sering tidak dipahami oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Pekutatan itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Komang Suarna (umur 50 tahun) Kelian Subak Abian Medewi, ketika ditanya bagaimana awalnya bisa terjadi perubahan tradisi atau adat kebiasaan dalam kehidupan pertanian di subak abian yang dipimpinnya. Di antara berbagai pernyataannya dia berucap.

...saya tidak tahu persis bagaimana awalnya pergeseran itu terjadi, ketika itu saya masih kecil, perubahan itu terjadi begitu saja. Tiba-tiba ada keinginan masyarakat untuk memakai pupuk kimia yang sebelumnya orang tua saya memakai pupuk kandang atau pupuk hijau. Demikian pula dalam hal jenis tanaman yang ditanam, sebelumnya petani di sini hanya menanam jenis tanaman lokal, seperti kopi, pisang, kelapa, dan tanaman lokal lainnya. Setelah itu, sejak tahun 1970-an baru mulai dikembangkan tanaman cengkeh, vanili, dan coklat (kakao). Semua ini berjalan begitu saja, tanpa terlalu disadari oleh masyarakat (wawancara, 27 Januari 2020).

Mencermati pernyataan informan di atas dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa masyarakat pada umumnya sangat terbuka menerima perubahan, apa pun bentuk perubahan tersebut. Apakah itu berupa perubahan informasi, peralatan, ataupun perubahan dalam bentuk teknik yang dengannya dapat mempermudah manusia dalam menjalani

kehidupannya. Oleh karenanya, di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, pembangunan dinilai sebagai resep mujarab yang dapat mengobati segala bentuk penyakit yang dianggap menghambat cita-cita negara menuju masyarakat yang adil, makmur, dan modern. Tolok ukur masyarakat adil, makmur, dan modern menurut Sianipar (2004) adalah kebudayaan Barat (kebudayaan modern).

Hal ini seturut dengan gagasan Wibert Moore (dalam Sztompka, 2004:152) yang menegaskan bahwa modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern menuju ke bentuk masyarakat yang memiliki teknologi, dan organisasi sosial yang ekonominya makmur, rakyatnya sejahtera, dan sistem politiknya stabil. Hal ini seiring dengan rumusan visi Pemerintah Kecamatan Pekutatan yang berbunyi "Terwujudnya masyarakat Pekutatan yang berbahagia dan sejahtera, berkeadilan dan berbudaya yang dilandasi iman dan takwa serta didukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta memiliki semangat *mekeprung* untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan".

Visi ini oleh Pemerintah Kecamatan Pekutatan kemudian di jabarkan lagi ke dalam bentuk misi agar visi tersebut dapat dioprasionalkan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan. Adapun misi Pemerintah Kecamatan Pekutatan adalah (1) mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan; (2) membangun semangat persatuan dan kesatuan, gotong-royong, serta harmoni dalam hetrogenitas agama, suku, dan adat istiadat; (3) peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat; (4) mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa (Profil Kecamatan Pekutatan, 2007:3).

Apa yang menjadi visi Pemerintah Kecamatan Pekutatan, merupakan harapan ideal yang dapat dijadikan inspirasi dan arah pengembangan pembangunan Pemerintah Kecamatan Pekutatan ke depannya. Sementara penetapan misi merupakan implementasi dari apa yang akan dilakukan, siapa yang menerima manfaat dari program pembangunan tersebut, serta sasaran utama yang ingin dicapai dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Dari rumusan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Pekutatan dapat dipahami bahwa arah pengembangan pembangunan tersebut tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip modernisme. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan di Kecamatan Pekutatan, termasuk pembangunan di bidang pertanian senantiasa juga dilandasi oleh nilai-nilai modernisme yang proses perubahannya terjadi secara linier dimulai dari perubahan pada aspek infrastruktur material, kemudian mempengaruhi perubahan pada aspek struktur sosial, dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi perubahan pada aspek superstruktur ideologis. Misalnya, keberhasilan para petani di Subak Abian, Kecamatan Pekutatan dalam mengikuti perubahan di bidang teknologi tentu hal ini akan mempengaruhi pula kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Demikian pula keberhasilan petani dalam meniti kehidupan bidang ekonomi akan berpengaruh pula terhadap kehidupan bidang pendidikan dan begitu seterusnya.

### **6.1.2 Perubahan Aspek Ekonomi**

Jika mengacu pada Sanderson (1993:60) maka yang dimaksud ekonomi masyarakat adalah sistem yang teratur mengenai pengadaan suatu barang atau pun jasa, berikut proses pendistribusian atau proses pertukaran barang atau jasa tersebut yang dilakukan di antara anggota masyarakat. Produksi dimaksudkan dalam konteks ini adalah menyangkut berbagai

hal. Di antaranya, barang apa yang diproduksi atau dihasilkan, siapa yang menghasilkan, alat dan teknik apa yang digunakan, termask siapa yang memiliki bahan-bahan dasar yang masuk ke dalam proses produksi.

Dalam konteks penelitian ini pengadaan barang atau pun jasa yang dimaksud adalah pengadaan barang atau pun jasa dalam kaitannya dengan produksi pertanian tanaman kering (*subak abian*) yang ada di wilayah *subak abian* Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Berdasarkan data kaneah yang diperoleh selama penelitian ini dilakukan, maka dapat diidentifikasi jenis tanaman yang dibudi dayakan oleh para petani lahan kering di *subak abian* Kecamatan Pekutatan adalah, tanaman cengkeh, manggis, kopi, durian, vanili, coklat, bahkan menurut penuturan beberapa informan, tanaman lahan kering yang sangat tren saat ini adalah tanaman kopi dan pisang.

Menurut penuturan Kepala Desa Manggisari, yakni Bapak I Ketut Suarjana (umur 52 tahun) yang juga seorang petani kopi dan pisang bahwa:

Sekarang di desa saya jenis tanaman yang sedang trennya ditanam oleh para petani adalah tanaman kopi dan pisang. Sebab di samping cara menanamnya mudah pisang dan kopi juga menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bali, dan juga oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Katakanlah pisang misalnya, kalau petani itu kreatif perbulan untuk lahan seluas 1,00 ha bisa mendapatkan penghasilan antara 2—4 juta rupiah. Sebab di Bali hampir setiap saat masyarakat membutuhkan pisang untuk keperluan upacara agama. Sampai-sampai petani kuwalahan untuk menyiapkan produksi pisang

untuk keperluan upacara agama (wawancara, 27 Januari 2020).

Ketika ditanya apakah menanam pohon pisang juga membutuhkan pemeliharaan/perawatan, dengan tegas dia menyatakan ya. Di antara berbagai pernyataannya dia berucap.

Apapun jenis tanaman yang kita budi dayakan pasti memerlukan perawatan atau pemeliharaan. Misalnya, setiap saat tanah dari tanaman pisang itu harus digemburkan, harus diberikan pupuk, anaknya yang terlalu banyak harus dipindahkan biar sat-sat makanan yang dibutuhkan oleh tanaman pisang itu cukup untuk menghasilkan buah yang banyak dan besar. Demikian pula jika ada tanaman liar yang mengganggu juga harus dibersihkan, biar tanaman pisang tidak diserang oleh hama penyakit. Jadi, pemeliharaan dan perawatan tetap harus dilakukan, jika hal itu tidak dilakukan, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal (wawancara, 27 Januari 2020).

Berangkat dari pernyataan informan di atas, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa apa pun jenis tanaman yang dibudi dayakan oleh para petani di jaman sekarang ini, ujung-ujungnya adalah bermuara pada upaya peningkatan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan gagasan Steger (2005) yang mengatakan bahwa globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai oleh bangkitnya ideologi pasar, atau terbentuknya suatu tatanan ekonomi baru, yakni ekonomi global. Menurut Lull (1993), ekonomi global tidak semata-mata ditandai oleh arus komoditas yang terkait

dengan citra dan uang pada tataran global, melainkan dicirikan pula oleh bisnis jaringan yang mengglobal.

Lebih lanjut menurut Lull, fenomena ini ditandai oleh tiga karakteristik, yakni *pertama*, produktivitas baru yang didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memungkinkan informasi diolah secara serentak, baik dalam produksi, distribusi, maupun manajemen. *Kedua*, bersifat global artinya para produsen mampu bekerja sebagai satu unit dalam waktu bersamaan, baik menyangkut teknologi, institusi, maupun organisasi. *Ketiga*, para produsen saat ini juga dituntut mampu untuk membangun jaringan pada intern perusahaan, atau pun antarperusahaan yang didukung oleh teknologi internet, sehingga unit operasi dan perekonomiannya bukan lagi dalam bentuk perusahaan atau firma, melainkan berupa proyek bisnis yang sangat fleksibel dan produktif (Castells dalam Tumengung, 2005:14).

Berangkat dari uraian di atas dan jika dikaitkan dengan proses terjadinya perubahan budaya pertanian subak abian di wilayah Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, tampaknya juga mengikuti proses sebagaimana digambarkan Sanderson (1993:60). Dalam arti adanya perubahan dalam bidang teknologi, pada intinya akan bermuara pula pada perubahan di bidang ekonomi. Misalnya, munculnya berbagai teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, secara langsung atau pun tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Contoh, dengan teknologi transportasi yang lebih modern, yakni setelah ditemukannya mobil sebagai alat transportasi, maka masyarakat termasuk petani akan mampu mengangkut hasil pertaniannya dalam kapasitas yang lebih banyak dan dalam kurun waktu yang lebih cepat.

Misalnya, jika jaman dulu petani mengangkut hasil pertaniannya dengan cara memikul atau menggendong hasil dari ke rumah atau ke pasar tentu beban yang bisa diangkut dengan cara memikul atau menggendong tersebut relatif sedikit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, dengan ditemukanya teknologi modern dalam dalam bidang angkutan berupa mobil, maka para petani akan bisa mengangkut hasil pertaniannya dalam jumlah yang lebih banyak dan dalam kurun waktu yang lebih singkat. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang petani yang sekaligus Kelihan Subak Abian Gumrih, yakni I Ketut Sukayadnya (umur, 45 tahun) sebagai berikut.

Sekarang dalam melakukan proses produksi pertanian pasca panen jauh lebih mudah dibandingkan jaman dulu. Sebab kalau dulu untuk membawa hasil pertanian ke rumah atau ke pasar butuh tenaga yang cukup banyak, karena kurangnya teknologi dalam bidang transportasi. Karena semuanya dikerjakan dengan tenaga manusia, tentu memerlukan biaya yang sangat tinggi dan butuh waktu yang sangat lama. Tetapi sekarang teknologi sudah canggih, hasil pertanian tidak perlu diangkut dengan tenaga manusia, tetapi sudah ada tenaga mesin, oleh karena itu dalam proses produksi kita bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak, karena selain proses produksinya cepat karena dibantu oleh mesin, kapasitasnya pun bisa lebih banyak (wawancara, 3 Pebruari 2020).

Apa yang dikatakan oleh informan di atas, membuktikan bahwa teknologi apa pun bentuknya, langsung atau pun tidak pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan



perekonomian masyarakat. Selain, teknologi transportasi teknologi informasi juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Misalnya, sebagai informasi terkait dengan pemasaran bisa diperoleh oleh masyarakat melalui berbagai saluran informasi, seperti melalui televisi, *handphon*, radio, surat kabar, dan lain-lain, termasuk masyarakat petani dalam konteks memasarkan produksi pertaniannya. Jadi semakin tinggi teknologi yang digunakan oleh petani, maka semakin besar pula kemungkinan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh teknologi itu sendiri. Misalnya, makin canggih teknologi transportasi yang digunakan, semakin efektif pula proses produksi hasil pertanian yang dilakukan para petani, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan keluarga petani itu sendiri. Namun, di sisi lain semakin besar pula biaya yang dibutuhkan oleh petani itu untuk membiayai proses produksi yang dilakukan.

Hal ini sangat wajar, karena menurut pepatah orang Bali, *“sayan gede ombake sayan gede masih angin”*. Terjemahan bebasnya kurang lebih, semakin besar keberadaan ombak di laut, maka semakin besar pula angin yang menepa kita. Jika dimaknai dalam konteks ekonomi, semakin besar uang yang dihasilkan dari proses produksi tersebut, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai proses produksi itu sendiri. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa pada esensinya perubahan dalam bidang teknologi, termasuk teknologi pertanian, akan berpengaruh pula terhadap perubahan dalam bidang ekonomi.

### **6.1.3 Perubahan Ekologi**

Ekologi dalam konteks kajian ini meliputi seluruh lingkungan fisik yang terhadapnya manusia harus beradaptasi denganya. Adapun lingkungan dimaksud meliputi sifat-sifat

tanah, sifat iklim, pola hujan, sifat kehidupan tanaman dan binatang, serta ketersediaan sumber daya alam. Dalam terminologi yang ketat, ekologi bukanlah bagian dari sistem sosiokultural, akan tetapi ia merupakan lingkungan eksternal yang terhadapnya sistem sosiokultural harus menyesuaikan diri dengannya (baca: lingkungan). Namun, karena faktor ekologis sering kali merupakan determinasi krusial bagi berbagai aspek kehidupan sosial, maka ekologi sering diperlakukan sebagai komponen dasar sistem sosiokultural (Sanderson, 1993:61).

Berangkat dari pandangan Sanderson tersebut, dan jika dikaitkan dengan data kencana yang didapat di lokasi penelitian ini, maka tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintahan, khususnya pemerintahan Orde Baru. Dikatakan demikian sebab tuntutan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya merupakan gugatan terhadap konsep pembangunan adil dan merata yang selama lebih dari tiga dasawarsa dipatok sebagai ideologi pembangunan Orde Baru (Nurrochmat, 2005:45). Padahal secara politis konsep pembangunan yang merata acapkali dijadikan alat legitimasi atas dominasi pemerintah pusat terhadap alokasi dan distribusi manfaat sumber daya alam yang ada di tiap-tiap daerah. Kenyataan ini tentu sangat melukai rasa keadilan berbagai daerah, terutama penghasil sumber daya alam. Bagaimana tidak, kehidupan masyarakat di sekitar ladang minyak dan di sekeliling hutan yang sumber daya alamnya dikuras, mereka tetap hidup miskin dan terpinggirkan.

Kemiskinan dan keterpinggiran mereka terjadi melalui proses politik yang dikemas dengan jargon demi persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan sasaran ini pemerintah Orde Baru menerapkan politik kebudayaan dengan sasaran utamanya adalah bagaimana kebudayaan daerah bisa berkembang dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Namun, dalam tataran realitas

ternyata cita-cita ideal ini tidak selamanya dapat berjalan mulus, akan tetapi acapkali menimbulkan permasalahan bagi keberadaan kebudayaan daerah itu sendiri. Permasalahan ini kemudian menjadi semakin kompleks, karena kebudayaan daerah tidak saja bersentuhan dengan kebudayaan daerah lainnya, tetapi dalam kurun waktu yang bersamaan bersentuhan pula dengan kebudayaan global. Persoalan lain yang muncul ketika pemerintah Orde Baru ingin mewujudkan Persatuan Indonesia, sesuai yang diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila yang bercorak *Bhineka Tunggal Ika*, yakni masyarakat Indonesia yang pluralistik. Hal ini diperkuat oleh catatan Hidayah (1996) yang mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 656 suku bangsa dengan berbagai kekayaan adat budayanya masing-masing.

Akan tetapi dengan politik pemerintah Orde Baru yang dibungkus dengan jargon persatuan dan kesatuan, banyak pengetahuan dan teknologi masyarakat tradisional Bali yang harus diadaptasikan demi persatuan dan kesatuan. Misalnya, citra lingkungan masyarakat Bali, yang sesungguhnya selain bersumber pada pengetahuan lokal, juga bersumber pada ajaran Agama Hindu, juga ikut diadaptasikan. Menurut Atmdja (2010:400) citra lingkungan masyarakat Bali mengarah pada citra lingkungan *ekosentrisme*. Artinya, masyarakat Bali memandang manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan satu sama lainnya. Artinya, mengerti tentang sesuatu hal berarti mengetahui pula kaitannya dengan yang lainnya. Berangkat dari apa yang dikatakan Atmadja, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bali dulunya menganut citra lingkungan holistik dalam melihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Soemarwoto, (1989:95) bahwa:

Dalam pandangan holistik, yang penting bukanlah masing-masing unsur, melainkan keseluruhan sebagai sebuah sistem. Walaupun dalam sistem ini unsur yang satu berkaitan dengan unsur yang lainnya, namun tidaklah berarti “semua berkaitan dengan semua atau seperti banyak ditulis dalam buku ekologi yang berbahasa Inggris, “*everything is connected with everything*”. Hubungan itu adalah tertentu, karena itu, citra lingkungan walaupun kompleks tetapi tidak ruwet.

Dengan mengacu pada Atmadja (2010; dan Soemarwoto, 2005), maka dapat dideskripsikan bahwa betapa masyarakat Bali tempo dulu dalam melihat lingkungannya memakai pandangan yang holistik, dalam arti melihat sesuatu tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Misalnya, orang Bali dalam memandang lingkungannya, tidak hanya berhenti pada penglihatan yang bersifat biofisikal (biologik dan fisikal), tetapi juga berwujud lingkungan alam supranatural (dewa, roh leluhur, dan makhluk demonik). Pandangan ini menurut orang Bali disebut alam *sekala* (alam nyata) dan alam *niskala* (alam tidak nyata).

Dalam konteks penelitian ini masyarakat, khususnya masyarakat petani di subak abian, Kecamatan Pekutatan juga memandang lingkungan alamnya secara *sekala* dan *niskala*. Secara *sekala* diwujudkan dalam bentuk berbagai aktivitas pertanian, khususnya pertanian tanaman kering, untuk memperoleh penghasilan guna mempertahankan kehidupan mereka. Mereka menghargai lingkungan alamnya dengan cara merawat tanaman dengan baik, melalui pemupukan,

pemeliharaan tanaman, dan pengolahan lahan pertanian secara periodik. Misalnya, mereka menggemburkan tanah sebelum ditanami, membersihkan gulma tanaman terhadap berbagai tanaman liar agar tidak mengganggu tanaman.

Sedangkan secara *niskala* diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap berbagai makhluk lain di luar dirinya. Sebab menurut keyakinan orang Bali, ruang dan waktu ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tumbuhan, dan binatang secara *sekala*, tetapi juga oleh aneka makhluk supernatural (*niskala*). Konsekuensi adanya pandangan masyarakat seperti itu, maka terhadap beraneka makhluk supernatural manusia harus bersikap baik dalam setiap tindakannya, baik pada tataran struktur sosial, maupun pada saat mereka berhubungan dengan lingkungannya. Sebab menurut keyakinan orang Bali, makhluk supernatural ini bisa melakukan apa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini menurut Gunadha dan Dharmika (dalam Suda, 2019:5) secara konseptual sebenarnya umat Hindu sangat menghargai hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya.

Terkait hal itu, dan berdasarkan data kancah yang diperoleh di lokasi penelitian ini, baik dari hasil wawancara dengan beberapa informan maupun berdasarkan hasil observasi lapangan, maka dapat dideskripsikan bahwa masyarakat petani di lingkungan subak abian, di Kecamatan Pekuatan selalu merawat dengan baik berbagai jenis tanaman yang ditanam di lahan pertaniannya baik secara *sekala* maupun *niskala*. Secara *sekala* perawatan tanaman dilakukan dengan cara memelihara tanaman secara fisik, misalnya memberi pupuk kepada tanaman, sehingga dapat tumbuh dengan subur, membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman, dan menjaga agar tanaman terhindar dari berbagai macam hama yang dapat mengganggu kesuburan tanaman. Sedangkan secara *niskala*

perawatan tanaman dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai jenis upacara agama terkait dengan keberadaan tanaman, seperti upacara *ngodalin*, *nangluk merana*, *tumpek bubuh*, *pecaruan*, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan Jero Mangku Wayan Madik (umur 63 tahun) sebagai berikut.

*...ngantos mangkin makudang-makudang upacara ring subak kantun memargi kadi sane sampun-sampun. Krama subake deriki ten purun ngirangin aci sane sampun ketamiang oleh para lelingsire dumun. Yadian aab jagate sampu maju kadi mangkin, upacara ring sajeroning subak kantun ajeg memargi kadi sane sampun-sampun.* (Sampai saat ini berbagai upacara terkait dengan organisasi subak, masih berjalan sebagaimana biasa, seperti yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Biar pun jaman sudah maju seperti sekarang ini, dalam kaitannya dengan upacara di lingkungan subak masih tetap berjalan sebagaimana biasanya (wawancara 3 Pebruari 2020).

Hal senada disampaikan juga oleh Jero Mangku Wayan Mertha (umur 74 tahun) dengan mengatakan sebagai berikut.

*...nganenin indik upacara agama, ring subak wenten makudang-kudang upacara sekadi, upacara piodalan, nangluk merana, ngusaba, pecaruan, lan sane tiosan. Yen indik pemargin upacara kantun memargi kadi sane sampun-sampu, krama subak ten purun nguangin indik pemargin upacara ring subak. Nika mawinan pemargin upacarani kantun ajeg kadi sane dumun-dumunan.* (Mengenai keberadaan upacara agama di lingkungan subak abian, ada berbagai jenis upacara, seperti upacara

*ngodalin, nagluk merana, ngusaba, pecaruan*, dan lain-lain. Mengenai pelaksanaan upacara di lingkungan subak abian Pekutatan sampai saat ini masih berjalan seperti yang dilaksanakan para tetua kita dulu. Kami tidak berani mengurangi proses pelaksanaan upacara di lingkungan subak, itu sebabnya keberadaan upacara agama di lingkungan subak masih tetap *ajeg* seperti jaman dulu (wawancara, 3 Pebruari 2020).

Mencermati pernyataan kedua informan di atas, dapat dibangun sebuah pemahaman baru bahwa manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial (*homo socius*), selalu hidup dalam suatu unit sosial atau sistem sosial tertentu. Unit sosial yang terkecil dan paling utama dalam kehidupan masyarakat Bali adalah *kuren* dan *dadia*. Kemudian lingkup unit sosial yang lebih luas dalam masyarakat Bali adalah berupa *desa adat* dan *subak*. Di dalam unit-unit sosial seperti inilah masyarakat Bali melakukan berbagai aktivitas, baik berupa aktivitas fisik maupun aktivitas spiritual. Dalam konteks subak abian aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat adalah menyangkut berbagai aktivitas pertanian, seperti membajak sawah, menanam tanaman produksi, membersihkan gulma tanaman, menjual hasil pertanian dan lain-lain. Sedangkan aktivitas supranatural meliputi, pelaksanaan berbagai upacara keagamaan terkait dengan aktivitas pertanian yang dilakukan oleh *krama subak*, baik secara kolektif maupun secara individu. Misalnya, upacara *Tumpek Bubuh* yang jatuh setiap enam bulan (210 hari) sekali merupakan salah satu wujud upaya pemeliharaan tanaman secara *niskala* yang dilakukan masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Pekutatan pada khususnya.

Upacara ini dilakukan dalam rangka memuja Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasinya sebagai *Dewa Sangkara*, yakni dewanya tumbuh-tumbuhan. Dasar filsafat dilaksanakannya upacara ini adalah pemikiran filosofi untuk ‘memberikan sebelum menikmati’. Pada masyarakat Hindu di Bali, ada semacam pemikiran filsafat lokal yang menandakan bahwa secara prinsip, manusia sebelum menerima harus memberi terlebih dahulu. Filosofi ini selain bermakna sosio-religius juga mengandung makna pelestarian lingkungan, artinya dalam konteks pelestarian sumber daya hayati, manusia sebelum menikmati hasil alam yang berlimpah hendaknya didahului dengan upaya persembahan dalam bentuk upacara (*yadnya*) yang berarti korban suci.

Di lingkungan keluarga, organisasi *subak*, *banjar adat*, dan *desa adat* inilah masyarakat Bali melakukan berbagai aktivitas sosial yang diatur berdasarkan norma-norma sosial dan dijalankan oleh struktur sosial dalam bingkai sistem kepolitikan. Dengan mengacu pada Sanderson (1993:60), maka dapat dikatakan setiap struktur sosial memiliki sistem kepolitikan, yakni hubungan kekuasaan yang mengatur interaksi antara struktur dengan bawahnya guna mengefektifkan pencapaian tujuan sistem sosial, seperti pembagian pekerjaan atas dasar sex atau jenis kelamin.

Artinya, dalam setiap sistem sosial yang ada di Bali, termasuk pada organisasi *subak*, selalu ada pembagian pekerjaan yang didasarkan atas sex atau jenis kelamin. Misalnya, pekerjaan apa yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki dan pekerjaan apa yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Dalam konteks pertanian, para lelaki, biasanya cenderung mengerjakan pekerjaan yang secara fisik memerlukan tenaga yang besar, seperti mencangkul (*neraktor*), memetik hasil pertanian seperti, *ngalap duren*, *ngalap*



*manggis, ngalap cengkeh* dan pekerjaan berat lainnya. Sementara untuk kaum perempuan cenderung mengerjakan pekerjaan yang lebih ringan secara fisik, tetapi biasanya memerlukan kecermatan dan ketelitian.

Misalnya, menjual hasil pertanian, mengangkut hasil pertanian ke rumah atau ke pasar, dan pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan sarana upacara agama (*banten*). Hal menarik berkaitan dengan perubahan sosiokultural masyarakat dalam konteks ini, adalah tentang pendidikan, yakni menyangkut tata cara mereproduksi, membudayakan dan menyosialisasikan manusia agar menjadi makhluk sosiobudaya yang mampu menjaga kelangsungan hidup sistem sosial maupun superstruktur ideologi (Sanderson, 1993). Berangkat dari apa yang dikatakan Sanderson di atas, maka dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa apa pun bentuk sistem sosial yang dikembangkan oleh masyarakat manusia, dalam mengelola lingkungannya mereka pasti memerlukan atau terikat pada infrastruktur material, yakni teknologi (meliputi peralatan dan cara), sistem ekonomi, termasuk keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

#### **6.1.4 Perubahan Demografi**

Demografi dimaksud dalam konteks kajian ini adalah meliputi sifat dan dinamika penduduk. Di dalam istilah demografi termasuk pula unsur jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan, kemerosotan, serta komposisi penduduk menurut umur, dan jenis kelamin. Dalam konteks penelitian ini perubahan atau pergeseran nilai-nilai budaya, termasuk budaya petanian bisa pula berproses melalui perubahan aspek demografi (kependudukan). Misalnya, bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dapat berakibat terjadinya perubahan-perubahan sosiobudaya

masyarakat, baik pada aspek infrastruktur material, struktur sosial, bahkan perubahan itu bisa pula menyentuh tataran superstruktur ideologis.

Berbicara soal kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1984:5) setidaknya memiliki tiga wujud, yakni (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya; (2) wujud kebudayaan sebagai kompleksitas aktivitas kelakuan manusia berpola dalam masyarakat; dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artepak). Kebudayaan sebagai wujud pertama, memiliki sifat-sifat abstrak, tidak bisa diraba, dan juga tidak bisa difoto. Adanya dalam alam pikiran manusia di mana kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Ketika warga masyarakat menyatakan ide-idenya itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan tersebut ada di dalam buku-buku hasil karya manusia, yang di jaman sekarang banyak juga disimpan dalam bentuk *flesdish*, *tape*, *computer*, dan juga di dunia maya dalam bentuk *yutub* dan lain-lain. Wujud kebudayaan dalam bentuk kompleksitas ide-ide atau gagasan-gagasan ini oleh masyarakat biasanya difungsikan sebagai tata-kelakuan manusia yang bersifat mengatur, mengendalikan, dan memberi arah bagi perilaku dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

Proses perubahan budaya pada wujud yang pertama di lokasi penelitian ini berupa perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan sistem hukum yang bersandar pada norma-norma, baik norma-norma sosial maupun norma-norma agama. Misanya, terjadinya perubahan pada aspek infrastruktur material yang mencakup teknologi pertanian, baik dalam hal peralatan maupun mengenai teknik yang digunakan para petani dalam mengolah lahan pertaniannya, secara langsung atau pun tidak berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat subak

itu sendiri. Misalnya, ketika traktor mulai digunakan oleh masyarakat Pekutatan untuk membajak lahan pertaniannya, maka beberapa sistem nilai yang sebelumnya berlaku di lingkungan masyarakat subak abian, Pekutatan mulai bergeser. Contoh, sebelumnya ketika proses membajak lahan pertanian masih menggunakan pacul atau cangkul, maka sistem tolong-menolong dan sistem barter (pertukaran) tenaga lumrah ditemui di lingkungan *krama* subak tersebut.

Akan tetapi ketika traktor mulai masuk ke areal persubakan di Kecamatan Pekutatan, maka sistem nilai tolong-menolong, gotong-royong, dan sistem barter tenaga mulai menipis, bahkan cenderung menghilang. Hal ini diakui oleh Nyoman Nada Wibawa (umur 62 tahun) kelihan subak, yang sekaligus juga seorang petani perkebunan di Subak Abian Pengeraguan dengan mengatakan sebagai berikut.

*...sesukat wenten traktor krama subak deriki sampun jarang nunas tulung sareng semeton subak sane tiosan rintanjekan mekarya ring carik utawi ring tegal ipune. Napi mawinan, santukan sampun wenten mesin utawi traktor, dadosne kramane aluhan nika mekarya. Nika mawinan ten perlu malih nunas tulung sareng semeton. Tiosan ring punika mangkin masyarakate pada repot ngurusin pekaryan soang-soang, mawinan kramane mepikayun becikan sampun nyewa traktor bandingan nunas tulung teken semeton, santukan lebih praktis, lebih enggal, tur ebih aluh.* (Semenjak ada traktor di lingkungan subak di sini, sistem tolong-menolong atau sistem gotong-royong dalam proses mengerjakan pekerjaan di ladang sudah sangat jarang. Sebab masyarakat sudah dibantu oleh mesin, yakni mesin traktor dalam hal membajak ladangnya. Oleh

karenanya, mereka lebih suka menyewa traktor dibandingkan meminta tolong kepada tetangga. Selain itu, masyarakat sekarang sangat sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing, sehingga mereka berpikir lebih baik nyewa traktor dibandingkan minta tolong kepada tetangga, sebab dengan menyewa traktor bisa lebih cepat, lebih praktis, dan lebih mudah melakukannya (wawancara, 3 Pebruari 2020).

Mencermati pernyataan informan di atas, maka dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa masyarakat Bali saat ini, termasuk masyarakat petani di Subak Abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana telah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran modern, seperti, berpikir praktis, ekonomis, efektif, dan efisien. Padahal jika meminjam gagasan Chambers (1983:106—118), masyarakat tradisional termasuk masyarakat Bali, sebenarnya memiliki pengetahuan dan teknologi tradisional yang disebut “pengetahuan mayarakat pedesaan”. Pengetahuan tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga membentuk suatu tradisi (Giddens, 2003).

Lebih lanjut menurut Giddens, tradisi memiliki karakteristik tersendiri, misalnya terkait dengan memori kolektif dan melibatkan ritual sebagai strategi pemertahanannya. Sementara yang terkait dengan gagasan kebenaran formulatif, tradisi dianggap memiliki penjaga, serta muatan normatif atau moral yang merupakan pembentuk karakter pengikat. Oleh karenanya masyarakat biasanya mengikuti tradisi tanpa memerlukan pemikiran alternatif. Dalam arti, tradisi dipandang telah menyediakan acuan bertindak yang senantiasa dianggap benar oleh masyarakat,

sehingga ketika mereka bertindak atas nama tradisi orang tidak perlu mempertanyakannya lagi.

Namun, dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, banyak nilai-nilai tradisi yang mulai tergeser, terpinggirkan, bahkan tersingkirkan, termasuk nilai-nilai budaya pertanian di subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember. Misalnya, budaya tolong-menolong digeser oleh sistem upah (sistem buruh), prinsip hidup *sagalak-sagilik, salung-lung, sabayantaka, paras-paros sarpenaya* (hidup dalam kebersamaan) digeser oleh prinsip hidup *mati iba hidup kae* (biarlah orang lain mati, yang penting saya tetap hidup). Hal demikian tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosiokultural yang melanda kehidupan masyarakat di mana pun mereka hidup dan berkembang. Hal ini diperkuat oleh Atmadja (2010:7) yang mengatakan bahwa setiap masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari perubahan sosial yang terjadi di sekitar dirinya. Perubahan sosial budaya bisa juga terjadi karena adanya kontak sosial suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga menimbulkan difusi kebudayaan.

Demikian pula perubahan budaya yang terjadi di Subak Abian, Kecamatan Pekutatan adalah akibat adanya kontak sosial antara masyarakat Pekutatan dengan masyarakat lainnya, seperti masyarakat Jawa, Madura, Sulawesi, dan lain-lain melalui migrasi atau melalui kontak dagang. Adanya kontak sosial semacam itu tentu berakibat terjadinya perubahan sosiokultural masyarakat subak abian itu sendiri. Jika meminjam gagasan Martyn J. Lee (2006:85) dapat dipahami bahwa *cultural studies* memandang bentuk-bentuk kultural sebagai tempat bertarungnya berbagai kelompok sosial untuk mendefinisikan batas-batas makna sosialnya.

Misalnya, masyarakat petani dipedesaan, termasuk petani subak abian di Kecamatan Pekutatan pada jaman dahulu

cenderung memberikan makna sosial terhadap berbagai ide atau gagasan yang berkembang dalam masyarakat apa adanya. Tetapi ketika modernisme mulai merambah kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat Pekutatan, maka masyarakat mulai memberikan makna terhadap ide-ide atau gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan fenomena yang ada. Katakanlah misalnya dalam konteks memaknai konsumsi, kalau dulu orang atau masyarakat mengonsumsi suatu barang atau jasa, semata-mata didasarkan atas nilai utilitas atau nilai guna dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa seseorang mengonsumsi sesuatu, karena memang tubuh mereka membutuhkan apa yang mereka konsumsi.

Namun, di era modernisme sekarang ini dan jika mengacu pada pandangan Martyn J. Lee di atas, maka barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat justru memiliki nilai ganda. Dalam arti, *pertama*, barang yang dikonsumsi seseorang dapat berfungsi sebagai agen kontrol sosial bagi tingkah laku manusia di mana mereka mengonsumsi barang atau pun jasa tersebut. *Kedua*, barang yang dikonsumsi itu juga dapat difungsikan sebagai objek yang digunakan oleh orang-orang kebanyakan untuk mengonstruksi kebudayaannya. Artinya, kalau jaman dulu orang mengonsumsi barang atau jasa *pure* sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Tetapi jaman sekarang orang mengonsumsi barang atau jasa, bukan lagi semata-mata didasari atas keinginan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, melainkan juga untuk menentukan status sosialnya dalam masyarakat.

Berangkat dari gambaran tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa dalam konteks konsumsi secara ideologis dan estetis masyarakat modern, didikte oleh hal-hal tertentu, seperti iklan, disain barang, pemasaran, dan berbagai bentuk

promosi lainnya. Atau dengan bahas lainnya dapat dikatakan bahwa komoditas di jaman sekarang acapkali dipandang sebagai sebuah “teks” yang dapat mengundang bentuk pembacaan atau literasi tertentu, yang bertujuan memproduksi hubungan sosial yang bersifat dominatif (Dharmika, 2019:120).

Jika meminjam gagasan Atmadja (2009:2) maka dapat dikatakan keterjebakan manusia pada perilaku konsumerisme (*kamaisme*), sangat terkait dengan kecerdikan negara-negara kapitalis (pengusaha) untuk mendorong manusia memenuhi nafsunya (*kama-nya*) untuk selalu mengonsumsi sesuatu barang atau jasa. Hal demikian tentu dapat mempengaruhi sistem sosial dan sistem budaya di mana konsumsi itu dilakukan. Pola konsumsi masyarakat, termasuk masyarakat Pekutatan menjadi semakin kuat, ketika para juru bicara kaum kapitalis dengan lihainya memainkan media iklan, baik yang ditayangkan oleh TV, surat kabar, majalah, maupun media sosial lainnya untuk mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pola kehidupan masyarakat seperti itulah yang kemudian membuat berbagai sistem budaya, sebagai wujud dari kompleksitas ide, gagasan, dan norma-norma, serta tradisi yang berlaku dalam masyarakat akhirnya mengalami pergeseran.

Selanjutnya wujud kedua dari kebudayaan yang menurut Koentjaraningrat (1984:6) sering disebut sistem sosial, yakni menyangkut kelakuan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini meliputi berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan interaksi, pergaulan, dan hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya yang dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari dan akhirnya dari tahun ke tahun selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan manusia itu sendiri. Proses perubahan budaya yang terjadi pada sistem sosial masyarakat, khususnya di subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, meliputi

pergeseran pola-pola perilaku masyarakat petani yang didasarkan atas masuknya nilai-nilai modernisme ke dalam pola kehidupan mereka. Misalnya, masuknya berbagai peralatan (teknologi) pertanian ke dalam kehidupan masyarakat subak, dapat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas *krama subak* itu sendiri. Seperti, traktor masuk, berakibat bergesernya perilaku masyarakat dalam hal membajak tanah, yang semula memakai cangkul atau pacul kini memakai mesin yakni traktor.

Perubahan semacam ini ternyata tidak hanya membawa perubahan pada tataran teknik mereka mengolah lahan pertaniannya, tetapi juga berpengaruh pula terhadap cara-cara mereka memanfaatkan ruang dan waktu. Arinya, ruang-ruang publik, seperti *bale banjar*, *bale desa*, dan ruang-ruang publik lainnya yang sebelumnya biasa dijadikan tempat untuk sekadar bertukar informasi, bercengkrama seusai menjalani rutinitas, kini mulai bergeser. Demikian pula dari aspek waktu, dulu waktu itu banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengisi acara-acara sosial, seperti gotong-royong membersihkan jalan, membuat saluran air, dan membangun fasilitas umum lainnya, kini hampir semua aktivitas seperti itu diambil alih oleh tenaga buruh atau tenaga khusus yang sengaja dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

Jadi, berangkat dari uraian tersebut, dapat dikembangkan sebuah pemahaman baru bahwa masuknya berbagai peralatan (teknologi) modern ke wilayah subak abaian di Kecamatan Pekutatan, ternyata tidak saja mempengaruhi kompleksitas ide, gagasan, nilai, dan norma-norma kehidupan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pola-pola aktivitas masyarakat, dan bahkan telah menggeser pola-pola perilaku masyarakat yang semula berlandaskan tradisi masyarakat pertanian, kini mulai bergeser ke pola-pola aktivitas yang berlandaskan nilai-nilai modernisme. Misalnya,



dulu para petani biasa memanen hasil kebunya sendiri kemudian menjualnya ke pasar juga secara sendiri-sendiri, kini telah bergeser ke sistem *pajeg*, yakni model penjualan hasil pertanian langsung dipohonnya. Oleh karenanya, dapat dikatakan perubahan aktivitas pertanian dari model pertanian tradisional bergeser ke model pertanian modern, juga berpengaruh terhadap sistem sosial atau kompleksitas manusia berpola dalam masyarakat bersangkutan.

Wujud ketiga dari kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah kebudayaan fisik atau sering disebut artepak. Wujud kebudayaan ini memerlukan keterangan yang banyak, sebab merupakan totalitas fisik dari hasil aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Proses terjadinya perubahan budaya dalam wujudnya yang ketiga ini, sangat mudah dikenali, karena sifatnya yang sangat nyata (kongkrit). Misalnya, yang paling sederhana adalah perubahan dari teknologi cangkul ke teknologi traktor, dari teknologi sabit untuk membersihkan rumput bergeser ke teknologi mesin pencukur rumput dan berbagai peralatan teknologi lainnya. Adanya pergeseran wujud kebudayaan yang ketiga ini ternyata berpengaruh pula terhadap perubahan sistem nilai, dan sistem sosial di mana perubahan itu terjadi. Contoh berubahnya peralatan teknologi pertanian dari cangkul ke traktor, dari sabit ke mesin pencukur rumput, ternyata berpengaruh baik terhadap berbagai aktivitas sosial dalam masyarakat sebagaimana disinggung dalam uraian sebelumnya, maupun terhadap cara berpikir masyarakat di mana perubahan itu terjadi. Seperti yang dikatakan oleh I Wayan Sumadiyasa (umur 55 tahun) kelihan subak abian Pulukan. Di antara berbagai pernyataanya dia berucap.

Semenjak masuknya peralatan teknologi pertanian modern, seperti traktor, mesin pencukur rumput, mesin semprot hama tanaman, dan lain-lain banyak aktivitas *krama subak* mulai bergeser. Demikian pula cara berpikir masyarakat juga ikut berubah. Kalau dulu ketika saya masih kecil, saya ingat betul masyarakat dalam mengolah lahan pertaniannya masih sangat tergantung pada peralatan seadanya. Dalam suasana kehidupan petani seperti itu, rasa kekeluargaan di antara kami masih sangat tinggi. Mengerjakan pekerjaan sering dilakukan dengan cara gotong-royong, jika ada salah satu anggota subak yang peralatan pertaniannya rusak masih biasa saling pinjam satu sama lainnya. Tetapi sekarang semua pola kehidupan seperti itu sudah sangat tipis, bahkan sudah hilang sama sekali. Sekarang hampir semua jenis pekerjaan di kebun dilakukan dengan sistem upah, tidak ada lagi sistem tolong-menolong, dan sistem gotong royong (wawancara, 3 Pebruari 2020).

Mencermati pernyataan informan di atas, dan dengan mengacu pada pandangan Koentjaraningrat (1984:7), maka dapat dideskripsikan bahwa ketiga wujud kebudayaan sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak terpisahkan satu sama lainnya. Dalam batasan yang sangat sederhana dapat dikatakan bahwa kebudayaan ideal dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Artinya, ide-ide, pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, perbuatan, dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Sebaliknya, kebudayaan fisik itu membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga dapat

mempengaruhi pola-pola perilaku, bahkan mempengaruhi pula cara berpikir manusia itu sendiri.

Berdasarkan data kaneah yang diperoleh selama peneliti melakukan pengumpulan data lapangan, ternyata apa yang dikatakan Koentjarningrat tersebut terjadi pula di lokasi penelitian ini. Misalnya, di Desa Badingkayu yang sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian tanaman perkebunan, jaman dulu masyarakat sangat mendasarkan diri pada cara-cara berperilaku dan berpikir yang berlandaskan nilai-nilai kehidupan masyarakat agraris. Seperti hidup dalam kebersamaan (kolektivisme), saling *runguang*, melakukan aktivitas pertanian berdasarkan peralatan seadanya, dan teknik bertani yang sangat sederhana dan alamiah. Tetapi setelah masuknya peralatan pertanian yang modern, semua aktivitas masyarakat dalam bidang pertanian juga ikut bergeser. Baik menyangkut cara berpikir, tata nilai, norma-norma, maupun berbagai perilaku masyarakat hampir semuanya tidak lagi didasari atas nilai-nilai kehidupan masyarakat agraris, tetapi cenderung didasari atas nilai-nilai kehidupan masyarakat industri yang berbasis pada nilai-nilai modernisme.

## **6.2 Perubahan pada Aspek Struktur Sosial**

Struktur sosial dalam konteks kajian ini menyangkut pola perilaku aktual yang dilakukan oleh masyarakat, bukan konsepsi-konsepsi mental yang dimiliki masyarakat tentang pola-pola tersebut. Misalnya, struktur sosial itu berisi apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan nyata, bukan apa yang mereka katakan dan mereka pikirkan secara ideal. Secara teoritis menurut Sanderson (1993:61) struktur sosial suatu masyarakat terdiri atas enam elemen, yakni (1) ada tidaknya stratifikasi sosial, yakni kelompok-kelompok masyarakat yang tidak sama kekayaan dan kekuasaannya. Pada kenyataannya

tidak semua masyarakat memiliki stratifikasi sosial; (2) ada tidaknya startifikasi etnis dan rasial, artinya dalam melihat keberadaan suatu masyarakat perlu dicermati apakah di dalam masyarakat tersebut ada kelompok-kelompok masyarakat yang dibedakan berdasarkan karakteristik rasial atau etnis; (3) sistem kepolitikan, artinya dalam mengkaji suatu masyarakat dengan teori perubahan sosiokultural perlu dicermati pula mengenai cara-cara masyarakat tersebut mengorganisasikan masyarakatnya dalam memelihara hukum, dan aturan secara internal termasuk di dalamnya cara-cara mengatur dan melakukan hubungan antar masyarakat.; (4) pembagian kerja berdasarkan seksual dan ketidaksamaan secara seksual. Artinya, di dalam suatu masyarakat perlu juga dilihat apakah ada cara-cara di mana laki-laki dan perempuan dialokasikan pada tugas dan peran tertentu dalam pembagian kerja sosial dalam masyarakat bersangkutan; (5) keluarga dan kekerabatan, sepanjang sejarah peradaban umat manusia semua masyarakat mempunyai sistem keluarga dan sistem kekerabatan, atau pola-pola sosiokultural yang teratur yang mengatur pelaksanaan perkawinan dan reproduksi. Akan tetapi pada kenyataannya, sifat khas sistem keluarga dan kekerabatan pada setiap masyarakat berbeda satu dengan yang lainnya; dan (6) pendidikan, yang mencakup sistem pengajaran kultural atau intelektual baik yang bersifat formal maupun semi formal. Berangkat dari pemahaman tentang struktur sosial sebagaimana diuraikan di atas, maka proses perubahan yang terjadi pada masing-masing elemen struktur sosial adalah sebagai berikut.

### **6.2.1 Proses Perubahan pada Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial dalam kajian ini merujuk pada adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tidak sama kekayaan dan kekuasaannya. Berbicara soal kekuasaan, Piliang

(2004:97) mengatakan bahwa dalam wacana politik, sosial, dan budaya kapitalisme global, kekuasaan tidak lagi sekadar bersumber dari apa yang oleh Michel Foucault disebut sebagai kuasa pengetahuan (*power/knowledge*). Akan tetapi juga bersumber dari kuasa kecepatan (*power/speed*). Artinya, di dalam masyarakat modern saat ini, proses perubahan yang terjadi berlangsung sangat cepat. Cepat atau lambatnya suatu masyarakat mengalami perubahan sangat tergantung pada cepat atau lambatnya masyarakat bersangkutan dalam hal memperoleh informasi, mengantisipasi kebutuhan pasar, dan kemampuan masyarakat dalam mengejar *trend*.

Dalam menjalani tempo kehidupan yang sangat cepat dewasa ini, masyarakat akan terkena seleksi alamiah berdasarkan kecepatan. Maksudnya, siapa pun di antara anggota masyarakat yang tidak mampu mengejar kecepatan, maka mereka akan terlindas oleh deru kecepatan tempo kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam menjalani kehidupan bertani, di jaman sekarang ini para petani tampaknya juga perlu mengikuti irama percepatan, jika tidak mau tergilas oleh deru percepatan kehidupan tersebut. Misalnya, jika ada petani yang masih tetap bertahan dengan peralatan manual, dengan teknik bertani tradisional, dan dengan sistem pemasaran yang tidak berorientasi pasar, mereka pasti tidak akan bisa bertahan hidup.

Oleh karena itu, masyarakat termasuk masyarakat petani di subak abian Pekutatan suka atau tidak jika mereka ingin tetap eksis harus mengikuti perubahan yang terjadi. Seperti dikatakan oleh Bapak Nengah Wirama (umur 55 tahun), Kepala Desa Medewi sebagai berikut.

Sebagai petani di jaman sekarang kita harus peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Artinya, apapun bentuk perubahan yang ada di sekitar

kita harus diikuti, sebab jika tidak mau mengikuti perubahan kita akan tergilas oleh kemajuan jaman. Misalnya, kalau kita dulu berkebun kelapa, tetapi harga kelapa saat ini sangat jatuh, dimainkan oleh para tengkulak, maka kita harus berani mengganti tanaman kelapa dengan tanaman produksi lainnya yang kira-kira dibutuhkan oleh pasar. Hal ini memang terjadi di lingkungan *krama subak* kami. Misalnya, dulunya dia bertani cengkeh, ketika harga cengkeh turun, maka mereka beralih ke tanaman lain yang lebih dibutuhkan oleh pasar. Misalnya, kalau sekarang masyarakat lebih suka menanam tanaman parong yang dalam bahas Balinya disebut ‘*suweg*’, karena tanaman itu yang sekarang disukai oleh para pelaku pasar (wawancara, 3 Februari 2020).

Pernyataan yang sedikit berlawanan disampaikan oleh Bapak Wayan Riasa (umur 53 tahun), Kelihan Subak Pangyangan dengan menyatakan sebagai berikut.

Memang benar jaman sekarang kita harus peka terhadap perubahan, tetapi dalam menghadapi perubahan yang terjadi di sekitar kita, tampaknya perlu sikap sabar. Misalnya, ketika buah cengkeh mengalami penurunan harga di pasar, jangan langsung pohon cengkehnya ditebang dan diganti dengan tanaman produksi lainnya. Sebab yang namanya harga pasar pasti berpluktuasi. Pernah ada kejadian begitu harga cengkeh turun, salah seorang petani langsung menebang pohon cengkehnya dan diganti dengan tanaman lainnya. Pada kenyataannya mereka juga perlu waktu untuk menunggu agar tanaman yang baru ditanam bisa

menghasilkan. Ketika tanaman yang baru mulai menghasilkan saat musim panen tiba, ternyata harga produksi tanaman yang baru itu juga turun, karena banyak petani yang mengikuti trend pasar, akhirnya petani juga mengalami kerugian (wawancara, 3 Pebruari 2020).

Mencermati kedua pendapat informan di atas, maka dapat dikembangkan sebuah kerangka pemikiran bahwa proses perubahan di dalam masyarakat memang tidak bisa dihindari. Misalnya, pada saat *desa adat* masih bersifat agraris, terutama pada masa sebelum pemerintahan Orde Baru, mata pencaharian warga desa saat itu relatif sama, yakni bertani. Demikian pula dilihat dari aspek pendidikan masyarakat pada saat itu juga belum begitu berkembang. Hal demikian berdampak terhadap pola berpikir masyarakat yang juga relatif setara. Akibat dari tingkat pendidikan yang setara, adalah tingkat mobilitas sosial dan mobilitas geografis mereka pun masih relatif rendah. Difrensiasi sosial atau stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat *desa adat* saat itu memang sudah ada. Ada pun basis dari stratifikasi sosial yang ada saat itu didasarkan atas *wangsa*, dan *soroh*.

Menurut Dwipayana, (2001) difrensiasi sosial atas dasar *wangsa* dan *soroh*, terkonfigurasi dalam masyarakat berupa *Tri Wangsa* (*Brahmana*, *Kastya*, dan *Wesya*) ditambah *jaba wangsa* (*sudra*). Sementara difrensiasi sosial atau stratifikasi sosial atas dasar *soroh* terbagi ke dalam beberapa jenis antara lain, ada *Soroh Pasek* (ada *Pasek Gelgel*, *Pasek Tangkas*, *Pasek Pegatepan*, dan lain-lain). Demikian pula pada *Wangsa Brahmana* (ada *Brahmana Mas*, *Brahmana Manuaba*, *Brahmana Keniten*, dan lain-lain). Lebih lanjut menurut Dwipayana, meski pun pada masyarakat *desa adat* di Bali

terdapat difrensiasi sosial yang didasarkan atas *wangsa* dan *soroh*, tetapi difrensiasi sosial berdasarkan kelas tidak dapat diabaikan. Misalnya, difrensiasi sosial yang didasarkan pada kepemilikan tanah dan atau kekayaan lainnya.

Dalam perkembangan masyarakat, termasuk masyarakat Pekutatan pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi peningkatan jumlah dan jenjang pendidikan formal yang dimiliki oleh anggota masyarakat *desa adat*. Terjadinya peningkatan jenjang pendidikan formal masyarakat *desa adat* semacam itu, ternyata berpengaruh terhadap terjadinya difrensiasi sosial masyarakat dalam bidang pekerjaan. Hal ini dikarenakan banyak anggota masyarakat *desa adat* yang memperoleh pendidikan formal yang tinggi tidak lagi mau mengambil pekerjaan di sektor pertanian. Akan tetapi mereka lebih memilih pekerjaan di luar pekerjaan sebagai petani, misalnya menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta, menjadi pedagang, dan ada pula yang menjadi wiraswatawan. Mereka-mereka yang mengambil pekerjaan di luar sektor pertanian, banyak yang berhasil, sehingga melahirkan kelas baru atas dasar kekayaan atau kekuasaan (Magnes-Suseno, dalam Atmadja, 2010:48).

Orang-orang sukses yang mengambil pekerjaan di luar sektor pertanian ini kemudian dikenal dengan sebutan orang kaya baru (OKB) yang mendasarkan hidupnya pada tradisi kehidupan non-pertanian (tradisi masyarakat modern). Orang-orang model ini merupakan lawan dari orang kaya lama (OKL) yang mendasarkan hidupnya dari tradisi pertanian atau berdasarkan atas kepemilikan tanah (lahan pertanian). Demikian halnya mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Pekutatan, banyak warga masyarakat Pekutatan yang melakukan mobilitas geografi ke kota, dengan tujuan menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Akibatnya,



banyak orang Pekutatan yang berhasil meraih pekerjaan di luar sektor pertanian karena tingkat pendidikan formal yang dimilikinya sangat memungkinkan.

Hal menarik dari kemunculan orang-orang kaya baru di Kecamatan Pekutatan adalah, tidak saja berasal dari orang-orang yang benar-benar mengalami mobiltas sosial vertikal, tetapi ada juga yang memang berasal dari orang kaya lama (OKL). Kondisi ini bisa terjadi sebab dengan kecerdikan yang dimiliki orang kaya lama mereka tidak mau ketinggalan dalam menempuh jenjang pendidikan formal yang tinggi pula. Dengan demikian posisi kelas sosial mereka tetap eksis, bahkan menjadi semakin kokoh. Bukan hanya itu, mobilitas geografi masyarakat, termasuk masyarakat Pekutatan sangat tinggi, sebab didukung oleh revolusi transportasi ditambah lagi dengan dukungan media komunikasi kebudayaan (seperti TV, surat kabar, radio, dan lain-lain), membuat orang-orang Pekutatan menjadi semakin kosmopolitan.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa modernisasi di bidang pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui program revolusi hijau, ternyata telah menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat, termasuk perubahan atau pergeseran dalam bidang struktur sosial, khususnya mengenai kelas sosial dalam masyarakat. Akibat lain dari terjadinya mobilitas penduduk, baik mobilitas sosial maupun mobilitas geografi adalah perubahan atau pergeseran berbagai tradisi atau budaya masyarakat lokal tidak bisa dihindari. Hal ini disebabkan banyaknya warga desa yang karena pendidikannya meningkat lalu mereka mencari pekerjaan di luar desanya, kemudian kelompok masyarakat model ini tidak jarang mempunyai keinginan untuk mengubah taradisi masyarakat desanya sesuai dengan tradisi yang mereka alami di tempat mereka

menjalankan pemerintahan. Sementara ada kelompok lain yang ingin tetap mempertahankan tradisinya karena mereka menganggap budaya yang dimiliki masyarakat desanya masih relevan atau sesuai dengan kepentingannya.

Kondisi semacam inilah yang sering menggiring masyarakat *desa adat* ke arah perpecahan. Perpecahan yang terjadi tidak jarang pula bermuara pada lahirnya konflik antar warga *desa adat*, sebagai dampak dari adanya refleksivitas terhadap tradisi dan tidak jarang juga diwarnai oleh konflik atas dasar *soroh*, *wangsa*, kelas, dan atau partai, sehingga konflik yang terjadi di lingkungan *desa adat* tidak jarang berdimensi sangat kompleks. Jadi, berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dinarasikan bahwa proses terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya, termasuk budaya pertanian subak abian di Kecamatan Pekutatan, bermula dari adanya mobilitas sosial, kemudian berlanjut pada mobilitas geografi, sehingga berakibat banyak nilai-nilai budaya masyarakat harus ditransformasikan, dimarginalkan, bahkan disingkirkan, karena masyarakat yang telah melakukan mobilitas sosial dan mobilitas geografi mempunyai cara pandang dan cara berpikir yang sangat progresif terhadap kemajuan desanya, sehingga pergeseran-pergeseran nilai-nilai budaya dalam kehidupan pertanian (agraris) sangat sulit dihindari.

### **6.2.2 Perubahan Sistem Kepolitikan**

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya, sistem kepolitikan merujuk pada cara-cara mengorganisir sebuah masyarakat, khususnya dalam hal memelihara hukum dan aturan internal atau menyangkut cara-cara mengatur dan melakukan hubungan antar anggota masyarakat. Dalam konteks penelitian ini yang akan banyak dikaji terkait dengan sistem kepolitikan masyarakat subak

abian di Kecamatan Pekutatan adalah proses perubahan budaya subak abian, yang bersumber dari sistem kepolitikan yang berlaku dalam masyarakat di mana kehidupan subak itu berlangsung.

Berbicara soal sistem kepolitikan, terutama dalam kaitannya dengan politik pertanian, maka tidak bisa dilepaskan dari lingkup kebijakan negara khususnya pemerintah Orde Baru. Adapun arah kebijakan pemerintah Orde Baru dalam prioritas pembangunan adalah lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial, budaya, dan yang lainnya. Berbeda dengan peran sosial dalam politik yang bersifat monolitik, maka dalam bidang ekonomi pemerintah Orde Baru lebih mempertimbangkan perspektif ekonomi terbuka yang mengarah pada pasar bebas, yang menekankan aspek-aspek efisien, dan pencapaian keuntungan yang optimal, dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Kemudian dalam bidang kehidupan politik, dengan berpegang pada ideologi developmentalisme, dalam upaya mengatasi krisis ekonomi yang dialami negara Indonesia pada pertengahan 1960-an, maka pemerintah Orde Baru berusaha menarik lokus kendali kepolitikan pada negara. Artinya, pemerintah berusaha melakukan depolitisasi terhadap masyarakat pedesaan, dengan cara menerapkan strategi masa mengambang. Dalam arti pemerintah melarang masuknya berbagai aktivitas dan organisasi politik ke wilayah pedesaan. Semua ini dimaksudkan agar secara nasional pemerintah bisa menerapkan sistem kepolitikan mayoritas tunggal (Maliki, 1999:138).

Alhasil, pemerintah Orde Baru berhasil membangun sistem kepolitikan mayoritas tunggal dengan memberikan dukungan kepada partai Golkar. Dengan sistem seperti itu dalam kurun waktu yang cukup lama pemerintah Orde Baru berhasil memegang kekuasaan di Republik tercinta ini, dengan

program-program pembangunan yang bersifat *top-down planning*. Akibatnya, dalam kurun waktu yang cukup lama pula sistem kepolitikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Pekutatan relatif stabil. Dalam arti dengan sistem kepolitikan mayoritas tunggal dan melalui dukungan yang diberikan kepada parati Golkar, membuat partai Golkar pada saat itu, mampu menguasai sumber-sumber dan kelompok-kelompok strategis yang ada di daerah-daerah pedesaan.

Akibatnya, hampir semua aparatur desa dapat dimanfaatkan oleh partai Golkar saat itu untuk mendukung program-program pembangunan di desa. Selain itu, para penguasa di tingkat supradesa dipegang oleh anggota masyarakat yang memiliki kedekatan dengan para petinggi partai Golkar. Namun, seiring dengan keberhasilan sebagian anggota masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi membuat sistem kepolitikan di desa akhirnya bergeser juga. Hal ini terjadi, karena setelah warga *desa adat* banyak yang berhasil mengenyam pendidikan formal yang tinggi, akhirnya mereka pun mengalami mobilitas sosial, dan tidak jarang di antara mereka yang berhasil meduduki posisi penting dalam masyarakat, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat pusat.

Hal ini membuat struktur sosial dalam masyarakat juga ikut bergeser, di mana anggota masyarakat yang dulunya tergolong miskin dan tingkat pendidikannya rendah, kini banyak di antara mereka yang telah berhasil meduduki posisi struktur sosial kelas atas. Struktur sosial atau kelas masyarakat dalam konteks ini, tidak saja didasarkan atas *wangsa, soroh*, jenjang pendidikan, dan jumlah kekayaan yang dimiliki, akan tetapi didasarkan pula atas sistem kepartaian yang diikuti oleh anggota masyarakat bersangkutan. Dengan mengacu pada Svalastoga (1989), kondisi demikian megakibatkan

heterogenitas masyarakat desa menjadi semakin kompleks, sebab kasta, strata, kelas, dan model kontinum menjadi tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Hal ini diakui oleh I Wayan Warsa (umur, 50 tahun) Kepala Desa Pulukan dengan menyatakan sebagai berikut.

Sekarang masyarakat di desa memang kondisinya berbeda dengan masa lalu, terutama menyangkut pendidikan masyarakat. Kalau dulu tingkat pendidikan masyarakat di desa kami rata-rata rendah. Tetapi sekarang banyak anak muda yang sudah berhasil menempuh jenjang pendidikan yang tinggi di kota, sehingga di antara mereka jarang yang mau bekerja sebagai petani. Sebab banyak pula di antara mereka yang berhasil mendapat pekerjaan di kota, yang lebih baik dari pada menjadi petani. Tetapi walaupun demikian mereka juga masih tetap menjadi warga *desa adat* di desa kami (wawancara, 3 Pebruari 2020).

Mencermati pernyataan informan di atas, dan jika dikaitkan dengan gagasan Atmadja (2010:49) maka dapat dikatakan bahwa ketika heterogenitas *desa adat* masih rendah, maka penjagaan tradisi atau adat budaya terasa lebih mudah. Sebaliknya, pada saat heterogenitas *desa adat* meningkat, penjagaan tradisi, adat budaya, termasuk budaya pertanian di subak abian menjadi semakin sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan, setiap kelompok, kelas, atau strata yang ada di *desa adat* bersangkutan bisa melakukan perubahan atas tradisi yang ada di desa kelahirannya sesuai harapan, kepentingan, dan keinginan masing-masing kelompok yang ada. Hal ini sesuai pula dengan esensi manusia sebagai mahluk *homo esparan*. Akibat, semua itu maka terjadilah perbedaan dalam memaknai

suatu tradisi, adat, atau budaya yang pada akhirnya bermuara pula pada terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat, termasuk budaya subak abian.

Jadi, secara politis warga desa yang tinggal di perantauan karena dia mendapatkan pekerjaan di luar desanya dan ingin melakukan perubahan tradisi dan adat budaya di desa kelahirannya sesuai yang dialami di tempat tinggalnya yang baru selalu bisa terjadi. Sebaliknya, banyak pula di antara mereka yang ingin tetap mempertahankan tradisi, adat, dan budaya yang diwariskan oleh para leluhurnya, karena dianggap masih relevan atau karena terkait dengan kepentingannya. Adanya kepentingan dan keinginan yang berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok lainna bisa berlanjut pada pemaknaan tradisi, sehingga bisa menimbulkan perpecahan di *desa adat* bersangkutan. Hal ini bisa berlanjut menjadi kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan, sehingga bisa bermuara pada munculnya konflik adat di lingkungan *desa adat* itu sendiri. Meski di lingkungan desa adat-desa adat yang ada di Kecamatan Pekutatan, tidak ditemukan adanya konflik semacam itu, namun pada dasarnya potensi konflik yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat selalu ada. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat, khususnya tokoh-tokoh adat perlu melakukan antisipasi atas kemungkinan terjadinya konflik yang dilandasai oleh perbedaan kepentingan sebagaimana digambarkan di atas.

### **6.2.3 Pembagian Kerja dan Ketidaksamaan secara Seksual**

Pembagian kerja dan ketidaksamaan secara seksual dimaksudkan dalam kajian ini adalah cara-cara di mana lelaki dan perempuan dialokasikan pada tugas dan peran tertentu dalam pembagian kerja sosial. Misalnya, dalam kehidupan

sosial kemasyarakatan ada tugas-tugas dan peran-peran yang harus dimainkan oleh kaum laki-laki dan ada pula tugas-tugas dan peran-peran khusus yang biasa dilakoni oleh kaum perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patriarkhi*, laki-laki secara sosiokultural dikonstruksi berbeda dengan kaum perempuan. Dalam konteks ini laki-laki berada dalam posisi yang dominan, sedangkan perempuan berada dalam posisi yang subordinat. Hal inilah kemudian disebut dengan istilah *gender* yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stole (dalam Nugroho, 2008:2). Istilah *gender* sebenarnya digunakan untuk membedakan status laki-laki dan status perempuan dari ciri-ciri fisik biologis dan dari segi sosiobudaya. Artinya, *gender* itu merupakan atribut yang diberikan kepada seseorang yang dikonstruksi berdasarkan kebudayaan manusia.

Definisi yang sedikit berbeda mengenai *gender* dikemukakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2001:6) yang mengatakan bahwa *gender* adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Pandangan lain tentang *gender* dikemukakan pula oleh Judith Butler (dalam Alimi, 2004:52—53) yang menegaskan bahwa *gender* atau seksualitas merupakan struktur imitatif yang terjadi akibat proses imitasi, pengulangan, dan performativitas. Berangkat dari uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa konstruksi identitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat *patriarkhi* dapat menimbulkan *bias gender* (*gender differences*), yakni penempatan laki-laki pada posisi yang memiliki kuasa dan acapkali merasa lebih unggul dibandingkan perempuan, padahal dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu.

Apa yang digambarkan para sosiolog di atas pada kenyataannya terjadi pula di lokasi penelitian ini. Terbukti di

wilayah subak abian Kecamatan Pekutatan, peran-peran *gender* ini masih nampak pada kehidupan sektor pertanian. Misalnya, kaum laki-laki seakan mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan dibudidayakan di kebun mereka tanpa pernah melibatkan kaum perempuan. Demikian pula dalam hal menentukan sistem panen, pemanfaatan hasil produksi pertanian setelah diuangkan, dan lain-lain seringkali hanya dilakukan kaum laki-laki. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kategori hierarkhi yang ditentukan oleh bermacam-macam ukuran. Misalnya, ukuran sosial-ekonomi, posisi kerja, usia, dan kategori *gender*.

Menurut Sendratari (2016:126) dalam konteks organisasi keluarga yang bersifat hierarkhis secara umum laki-laki dewasa memiliki posisi sosial dan kekuasaan yang sangat besar di lingkungan keluarganya. Oleh karenanya, sebagai suatu kelompok sosial, laki-laki mempunyai kekuasaan ekonomis, fisik, dan politis lebih besar dari kalangan perempuan. Adanya kondisi demikian membuat laki-laki dewasa acapkali memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksakan kehendak terhadap istri dan anak-anaknya. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan keluarga manusia yang sering disebut evolusi keluarga. Menurut Bachopen dalam bukunya *Das Mutter Recht* (1986) sebagaimana dikutip Suda (2008:35) bahwa keluarga manusia di seluruh dunia berkembang melalui empat tingkat evolusi. Keempat tingkat evolusi tersebut meliputi, (1) masa *promiskuitas*, yakni suatu masa di mana manusia hidup bagaikan kawan binatang berkelompok, di mana antara laki-laki dan perempuan bebas melakukan hubungan suami-istri dan bebas melahirkan keturunan tanpa ikatan perkawinan. Oleh karenanya apa yang disebut kelompok keluarga batih pada masa itu belum dikenal. Dalam perkembangannya, manusia



kemudian sadar akan hubungan antara ibu dengan anak-anaknya sebagai kelompok keluarga inti dalam masyarakat. Dengan model kekerabatan semacam itu, anak-anak hanya mengenal siapa ibunya, dan sama sekali tidak mengenal siapa ayahnya. Dalam kelompok-kelompok keluarga inti semacam itu, ibulah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya dan perkawinan antara ibu dengan anak laki-laki dihindari, dengan demikian timbulan adat perkawinan *exogami*.

Dalam perkembangannya adat perkawinan *exogami* mengalami perluasan, sebab garis keturunan untuk selanjutnya diperhitungkan berdasarkan garis ibu, yang kemudian sistem kekerabatan seperti ini disebut sistem *matriarchate*. Lama-kelamaan sistem kekerabatan model ini membuat kaum laki-laki merasa tidak puas, akhirnya dalam melakukan perkawinan mereka mulai mengambil calon-calon istri dari kelompok-kelompok lain dan membawa gadis-gadis itu ke dalam kelompok mereka sendiri. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri seperti itu pun tetap tinggal dalam kelompok laki-laki. Sistem seperti inilah kemudian disebut sistem kekerabatan *patriarchate*, di mana laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dan sistem ini merupakan tingkat ketiga dalam perkembangan evolusi keluarga manusia. Kemudian tingkat keempat dan sekaligus tingkat terakhir dari evolusi keluarga manusia menurut Bachopen adalah berubahnya sistem perkawinan *exogami* menjadi sistem perkawinan *endogami*, karena dalam perkembangannya anak-anak sekarang senantiasa berhubungan langsung, baik dengan anggota keluarga ayah maupun anggota keluarga ibu. Dengan demikian lama-kelamaan sistem kekerabatan *patriarchate*, semakin berkurang dan digeser oleh sistem kekerabatan *parental*.

Namun, berdasarkan data kancah yang diperoleh dari lokasi penelitian ini, ternyata sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Pekutatan adalah sistem kekerabatan *patriarkhi* yang sering pula disebut sistem *patrilinial*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Budiana (1995:56) bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali adalah sistem *patrilineal*, yakni garis keturunan selalu ditarik melalui garis laki-laki (*purusa*) menurut garis lurus. Artinya, dalam keluarga Hindu di Bali anak laki-laki (*purusa*) berkedudukan sebagai pihak yang mempunyai kewajiban meneruskan keturunan, dan sebagai penerus hak dan kewajiban dalam keluarga. Sementara anak perempuan tidak dituntut hak dan kewajiban seperti itu, karena mereka akan keluar dan memasuki keluarga orang lain setelah mereka menikah.

Dalam konteks warisan, anak laki-laki juga mempunyai hak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya dan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk memelihara *sanggah* (*pemerajan*) atau kuil keluarga, baik secara fisik maupun secara spiritual. Tanggung jawab anak laki-laki terhadap keberadaan *pemerajan* secara fisik, mengandung arti bahwa anak laki-laki harus bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan fisik bangunan *sanggah* keluarga, agar selalu berada dalam keadaan bersih, baik dan tidak mengalami kerusakan. Sementara pemeliharaan secara spiritual mengandung arti bahwa anak laki-laki harus selalu siap melaksanakan upacara keagamaan, baik pada saat upacara *piodalan*, maupun upacara yang dilakukan pada hari-hari suci agama Hindu, seperti pada hari *puinama*, *tilem*, *kajeng keliwon*, *tumpek*, *anggarkasih*, dan hari-hari suci lainnya. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak dan kewajibannya sebagai penerus keturunan dan sebagai penerima harta wasisan, maka anak laki-laki juga mempunyai kewajiban untuk memelihara orang

tuanya selama masih hidup dan bertanggung jawab pula atas pelaksanaan upacara *pitra yadanya* (*ngaben*) setelah orang tuanya meninggal dunia.

Dalam sistem kekerabatan semacam ini, anak perempuan (*predana*) dalam keluarga di mana dia dilahirkan tidak memiliki hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimiliki oleh anak laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh keluarga Hindu di Bali, termasuk di Kecamatan Pekutatan, ada perlakuan yang bersifat dikotomis antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini diakui oleh I Made Sumendra (umur 48 tahun) Kelihan Subak Abian Pengraguan dengan mengatakan sebagai berikut.

Menurut tradisi masyarakat di sini dalam hal pembagian waris, memang hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Tetapi bagi orang tua yang mengerti dan sudah maju ekonominya banyak juga yang memberikan harta bawaan (*tatadan*) kepada anaknya yang perempuan. Harta bawaan yang diberikan bukan berupa tanah, tetapi bisa berupa harta yang diperoleh oleh kedua orang tuanya, seperti sepeda motor, mobil, dan perhiasan atau bisa pula dalam bentuk uang (wawancara, 3 Pebruari 2020).

Mencermati pernyataan informan di atas, dapat deskripsikan bahwa pada masyarakat Jembrana, khususnya di Kecamatan Pekutatan masyarakatnya masih menganut sistem kekerabatan *patriarkhi*, yakni memposisikan kaum laki-laki (*purusa*) sebagai pihak yang dominan atau pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan anggota keluarganya. Hal

ini sejalan dengan apa yang tersurat dalam Kitab *Mānawa Dharma Śāstra* (IX.3) yang menegaskan sebagai berikut.

*pitā rakṣati kaumāre  
bharttā rakṣati yauvane,  
rakṣanti sthavire putrā  
na strī svātantryam arhati.*

Artinya:

Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan melindungi putra-putranya setelah ia tua, wanita tak pernah layak bebas (Pudja dan Sudharta, 2010:439).

Masih dalam kitab *Mānawa Dharma Śāstra* (IX.9) juga disebutkan:

*yādṛśam bhajate hi strī  
sutam sūte tathā vidham  
tasmāt prajā viśuddyarthaṁ  
stryam rakṣet prayatnataḥ*

Artinya:

Sebagaimana laki-laki tempat istri menggantungkan dirinya, demikian pula anak laki-laki yang ia lahirkan; demikianlah hendaknya ia harus menjaga istrinya agar supaya terpelihara kesucian keturunannya.

Kedua isi sloka di atas menunjukkan bahwa menurut ajaran Hindu sebenarnya kaum laki-laki memang dilahirkan untuk bertanggung jawab atas keberadaan keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Implementasi sloka ini dalam kehidupan masyarakat Bali juga terlihat dari hasil penelitian

yang dilakukan Sendratari (2016:126) yang mengatakan bahwa anggota keluarga masyarakat Bali dalam kesehariannya hidup dalam kategori hierarkhis. Dalam hierarkhi tersebut secara umum laki-laki dewasa memiliki posisi sosial dan kekuasaan yang sangat besar dalam keluarga. Oleh karenanya, Di dalam keluarga laki-laki memiliki kekuasaan ekonomi, fisik, dan politis yang lebih besar dari pada perempuan. Hal ini membuktikan betapa kuatnya sistem kekerabatan *patriarkhi* dalam kehidupan keluarga Hindu di Bali, termasuk di Kecamatan Pekutatan masih berlaku hingga saat ini.

#### **6.2.4 Perubahan bidang Pendidikan**

Pendidikan dimaksud dalam kajian ini adalah pendidikan formal, yang menurut UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan sebenarnya merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, karena melalui pendidikan dan kebudayaan derajat suatu bangsa dapat ditingkatkan di mata dunia internasional. Seturut dengan hal itu Daoed Yosoef (dalam Susilo, 2006:13) mengatakan bahwa ‘pendidikan merupakan alat yang sangat menentukan dalam rangka mencapai kemajuan segala bidang kehidupan, termasuk memilih dan membina hidup yang baik sesuai martabat manusia’.

Betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia telah ditegaskan dalam kitab Sarasamusccaya 27 sebagai berikut.

*Yuvaiva dharmmanvicched yuva vittamyuva srutam  
Tiryyagbhawati vai dharba utpatam na cavidyati*

Artinya:

Karenanya perilaku seseorang; hendaklah digunakan sebaik-baiknya masa muda, selagi badan sedang kuatnya, hendaklah dipergunakan untuk usaha menuntut *dharma*, *artha*, dan ilmu pengetahuan, sebab tidak sama kekuatan orang tua dengan kekuatan anak muda; contohnya ialah seperti ilalang yang telah tua itu menjadi rebah, dan ujunnya itu tidak tajam lagi.

Sloka dari *Sarasamusccaya* di atas sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya pendidikan menurut pandangan Hindu. Demikian pula pandangan masyarakat di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Hal ini terbukti dari apa yang dikatakan oleh I Nyoman Diarta (umur, 51 tahun) Kelihan subak abian Pekutatan dengan mengatakan sebagai berikut.

*Yen manut dewek tiang, kekaryan petani nika berat pisan, nika mawinan tiang melid ngorahin pianak tiang, mangde seleg-seleg masekolah mangde preside ngerereh kakaryan di luar pertanian. Boye ja tiang ngorahang dados petani nika jelek, sekemaon berat. Yan mekarya di kantoran kan ten je bes berat nika.* (Menurut saya bekerja di sektor pertanian adalah sangat berat, terutama secara fisik. Oleh karenanya berkali-kali saya beritahu anak saya agar mau rajin belajar, agar bisa mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, sebab pekerjaan di kantor misalnya, tidak terlalu berat secara fisik, seperti pekerjaan di bidang pertanian. (wawancara, 3 Pebruari 2020).

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa masyarakat Pekutatan telah menyadari bahwa pendidikan itu mempunyai arti penting bagi upaya peningkatan taraf kehidupan. Hal ini tampaknya juga disadari oleh para generasi muda Hindu di Kecamatan Pekutatan, sehingga banyak anak muda di sana yang mencoba mengadu nasib ke kota untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Alhasil banyak anak-anak muda Hindu Pekutatan yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang pendidikan tinggi dan banyak pula di antaranya yang berhasil mendapatkan pekerjaan di kota. Kondisi demikian tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Pekutatan, yakni ‘etos kerja’. Masyarakat Pekutatan sampai saat penelitian ini dilakukan memiliki ‘etos kerja’ yang disebut ‘*rasa jengah*’, artinya masyarakat di sana akan merasa sangat malu (*jengah*) apabila dirinya tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, ketika ada salah satu anggota masyarakat yang bisa sukses dalam menjalani pendidikannya di kota, maka hal ini akan membawa pengaruh yang positif bagi anggota masyarakat yang lainnya.

Menurut Suda (2008:52) orang yang memiliki rasa *jengah* apakah dia orang tua atau anak muda, laki-laki atau perempuan, dan dewasa atau anak-anak pasti akan terdorong hatinya untuk melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain di sekitarnya. Hal inilah yang kemudian menjadi embrio dari terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya di lingkungan subak abian, di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Berhasilnya anak-anak muda menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kota tentu akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku mereka dalam memandang hidup dan kehidupan mereka. Misalnya, berhasilnya anak-anak muda untuk

menamatkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, membuat terjadinya pergerakan difrensiasi sosial ke arah diversifikasi pekerjaan.

Artinya, warga desa yang berhasil meraih pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, mereka tidak akan mau lagi bekerja sebagai petani, akan tetapi banyak yang menekuni pekerjaan di bidang non-pertanian. Misalnya, ada yang menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, pebisnis, dan lain-lain. Mereka yang berhasil meraih pekerjaan di luar sektor pertanian banyak yang sukses dari segi finansial, sehingga melahirkan kelas-kelas baru dalam masyarakat. Berhasilnya warga masyarakat melakukan mobilitas kelas secara vertical, membuat mereka juga terpaut dengan kebudayaan baru sesuai kelas yang ditempati. Mereka tidak saja mengalami mobilitas sosial, tetapi juga mobilitas geografi. Artinya, mereka tidak saja berhasil meningkatkan jenis pendidikan formalnya, tetapi juga banyak di antara mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan di luar desanya dan bertempat tinggal di kota.

Di sisi lain mereka juga masih tetap menjadi anggota (*krama*) *desa adat* di desa kelahirannya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya, pada masyarakat Pekutatan, dari budaya pertanian tradisional menuju budaya pertanian modern melalui mekanisme revolusi hijau. Berangkat dari uraian di atas, maka dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa proses terjadinya pergeseran budaya pertanian tradisional ke budaya pertanian moderna, selain berproses melalui mekanisme revolusi hijau, juga terjadi melalui mobitas penduduk, baik mobiltas sosial maupun mobilitas geografi.

Adanya mobiltas sosial, baik mobiltas kelas maupun mobilitas geografi membuat difrensiasi sosial masyarakat *desa adat*, termasuk di Kecamatan Pekutatan menjadi semakin



kompleks. Pasalnya, warga *desa adat* dengan demikian terbagi menjadi dua golongan, yakni warga desa yang bermukim di *desa adat* kelahirannya (tidak merantau), dan warga desa yang merantau. Jika mereka merantau di kota-kota yang ada di Bali, mereka masih tetap menjadi warga *desa adat* di desa kelahirannya dan sekaligus juga menjadi warga desa di mana dia merantau. Dengan demikian setiap saat mereka akan kembali ke desa kelahirannya, tentu dengan adat budaya yang mereka dapati di daerah tempat tinggalnya yang baru. Ketika heterogenitas desa masih rendah, maka pergeseran budaya, adat istiadat, dan tradisi mungkin masih lebih mudah untuk mengontrolnya, tetapi ketika heterogenitas masyarakat menjadi sangat kompleks, maka proses perubahan bahkan pergeseran nilai-nilai budaya, termasuk budaya pertanian di subak abian, Kecamatan Pekutatan sangat sulit dihindari.

### **6.3 Perubahan pada Aspek Superstruktur Ideologis**

Superstruktur ideologis dimaksud dalam kajian ini meliputi beberapa sub komponen di antaranya, (1) ideologi umum; (2) agama; (3) ilmu pengetahuan; (4) kesenian; dan (5) kesustraan. Adapun jabaran masing-masing sub komponen adalah sebagai berikut.

#### **6.3.1 Perubahan pada Ideologi Umum**

Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya bahwa istilah ideologi dapat mengacu pada dua pengertian antara lain (1) ideologi sebagai suatu sistem berpikir, sistem kepercayaan atau praktik-praktik simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik; (2) istilah ideologi juga digunakan dalam rangka pembenaran hubungan kekuasaan yang bersifat asimetris (tidak simetris) atau dengan istilah lainnya disebut pembenaran dominasi. Dengan mengacu pada

Sanderson (1993) Geertz (1977; 1999) dan Spradley (1972) apapun tindakan manusia, termasuk aktivitas dalam bidang pertanian tidak terlepas dari suprastruktur ideologis. Jika dicermati ketiga pandangan sosiolog di atas, maka dapat dipahami bahwa superstruktur ideologis berfungsi sebagai resep bertindak atau pola dari dan pola untuk bertindak bagi seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara ideologi menurut Montero (2005:220) adalah suatu sistem gagasan yang mengembangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini secara khusus dibenarkan oleh pengembangan gagasan-gagasan di mana fakta-fakta dan proses sejarah diubah, diingkari, atau disembunyikan. Selain itu, ideologi mengonstruksi realitas dengan suatu cara di mana orang-orang menginternalisasi atribut-atribut negatif tentang dirinya sendiri sebagai sesuatu yang alamiah dan sah. Melalui proses pemenuhan diri sendiri, orang bertindak sesuai dengan persepsi-persepsi negatif ini.

Berangkat dari gagasan tentang ideologi di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa ideologi merupakan gagasan yang di dalamnya mencakup nilai dan norma yang diyakini benar oleh penganutnya. Oleh karena itu, gagasan tersebut, diartikulasikan sebagai praktik material untuk melakukan penataan terhadap kenyataan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Takwin (2003:21) kenyataan sosial tidak saja berupa tindakan sosial, tetapi juga bahasa verbal dan bahasa tubuh.

Namun, dalam praktik ideologi bagi kehidupan masyarakat, aspek-aspek yang bertentangan dengan ideologi

itu sendiri sengaja disembunyikan guna memberikan pembenaran terhadap gagasan yang tercakup dalam ideologi yang mereka anut. Oleh karenanya, terjadinya pergeseran ideologi dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana sangat sulit dikenali hanya dengan melihat praktik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di sana. Hal ini dikarenakan, ideologi tidak saja berupa ide-ide yang menghasilkan akibat-akibat yang melekatkan dan mengikat manusia pada tatanan sosial yang ditandai oleh kesejahteraan, tetapi bisa pula menghasilkan *gap* status, dan jurang kekuasaan yang sangat menonjol, tetapi tidak disadari oleh masyarakat, karena mereka telah terbius secara ideologis.

Berangkat dari gagasan tersebut, peneliti agak kesulitan dalam menemukenali apakah perubahan pada aspek infrastruktur material dan struktur sosial pada masyarakat petani di subak abian, Kecamatan Pekutatan, akibat masuknya nilai-nilai modernisme dalam kehidupan sektor pertanian telah mengakibatkan perubahan atau pergeseran ideologi atau tidak. Namun demikian, secara garis besar jika mengacu pada Marx (dalam Kurniawan, 1999) perluasan sistem ekonomi kapitalis pada masyarakat, termasuk masyarakat Bali, secara umum memengaruhi unsur superstruktur ideologis, termasuk di dalamnya aktivitas dalam bidang pertanian, baik pertanian subak abian, maupun subak basah.

Dikatakan demikian sebab pekerjaan pertanian, berdasarkan tradisi yang berlaku selama ini, sebenarnya memuat ‘ungkapan-ungkapan simbolik yang memiliki nilai estetika, religious, dan emosional, atau intelektual (Sanderson, 1993:63). Jika gagasan Sanderson dikaitkan dengan kondisi masyarakat subak di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, tampak ada kesesuaian di situ. Akan tetapi, dengan

masuknya paham modernisme ke lingkungan subak abian, maka ungkapan-ungkapan simbolik yang memiliki nilai estetika, religious, dan emosional atau intelektual kemudian berubah menjadi nilai-nilai komersial dalam bentuk komoditas yang lebih menekankan keuntungan secara finansial dibandingkan aspek-aspek lainnya. Seperti yang dikatakan I Wayan Sama (umur 45 tahun) Kelihan Subak Abian Asahduren yang mengatakan sebagai berikut.

Sekarang dalam hal melakukan aktivitas pertanian, khususnya di areal perkebunan, sasaran utamanya adalah bagaimana para petani bisa menghasilkan produksi pertanian yang sebanyak-banyaknya. Apapun teknologi, baik menyangkut peralatan, teknik, bibit, dan pengetahuan baru tentang pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah atau siapa pun, masyarakat pasti menerima dengan senang hati, asal tujuannya dapat meningkatkan produksi pertanian yang digeluti para petani. Sampai saat ini para petani di wilayah subak kami, cenderung menerima berbagai ide, gagasan, dan teknologi yang secara nyata dapat meningkatkan produksi pertanian para petani (wawancara 3 Pebruari 2020).

Berangkat dari pernyataan informan di atas, dapat dibangun sebuah krangka pemikiran bahwa para petani di lingkungan subak abian, di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dalam melakukan aktivitas bertani lebih mengutamakan nilai tukar dibandingkan nilai-nilai estetika, nilai emosional, dan nilai religious. Artinya, masyarakat subak di lokasi penelitian ini dalam melakukan aktivitas pertanian, tidak lagi terlalu mendasarkan diri pada nilai-nilai kearifan

lokal masyarakat setempat, melainkan memiliki pula latar belakang ideologis. Artinya, apa yang dilakukan oleh para petani dalam konteks aktivitas pertaniannya, tidak saja merupakan pengaplikasian sebuah ideologi, tetapi juga ada upaya untuk pemertahannya. Apa yang terjadi di lokasi penelitian ini sejalan dengan gagasan Althusser (2004; 2007) yang mengatakan bahwa ideologi menyelip pada setiap aktivitas manusia, termasuk aktivitas di bidang pertanian. Dengan mengacu pada Althusser di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa suatu ideologi dapat bersembunyi di balik aktivitas seseorang atau sekelompok orang, akan tetapi orang bersangkutan tidak menyadarinya.

Berdasarkan data kaneah yang didapat di lokasi penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa di lingkungan subak abian Kecamatan Pekutatan telah terjadi pergeseran ideologi dari ideologi yang tidak berorientasi pasar menuju ideologi kapitalis yang berorientasi pasar. Ideologi pasar yang jika meminjam gagasan Maguire (2004) disebut “agama pasar” adalah:

Kapitalisme menjadi seperti agama. Ia melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh agama dan mengatakan pada kita apa yang suci, apa yang bernilai, dan bagaimana kita harus berbuat. Terlebih lagi, ia melakukan semua ini, bahkan lebih efektif dibandingkan apa yang dilakukan oleh agama pada masanya.

Dengan mengacu pada gagasan Maguire dan jika dikaitkan dengan kondisi lapangan di lokasi penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa “agama pasar” telah berkembang semakin luas dalam kehidupan masyarakat Bali,

termasuk dalam kehidupan bidang pertanian. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa ideologi pasar atau ideologi kapitalis, merupakan suatu sistem kepercayaan yang mengagungkan pasar sebagai media utama bagi pemenuhan segala kebutuhan atau hasrat manusia akan kesejahteraan, sehingga manusia memiliki pandangan positif, bahkan mendewakan pasar (Steger, dalam Atmadja, 2010a: 136).

Apa yang dikatakan Steger di atas dan jika dikaitkan dengan pandangan orang Hindu Bali, tentang pasar dan uang, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Dikatakan demikian sebab pada masyarakat Bali, termasuk masyarakat di Kecamatan Pekutatan dari sejak jaman dahulu telah mengenal kepercayaan akan adanya dewa pasar yang disebut *Dewi Melanting*. Demikian pula masyarakat Bali dari sejak lama telah mengenal dan memuja dewa uang yang disebut *Ida Batara Rambut Sedana*. Adanya kesamaan ideologi semacam inilah membuat masyarakat Bali dengan mudah dapat menerima gagasan tentang “agama pasar” yang disebarluaskan oleh sistem ekonomi kapitalis.

Sebagai bukti bahwa masyarakat Hindu, khususnya di Bali memiliki pandangan positif tentang pasar dan uang dapat pula dicermati dari ketentuan kitab *Sarasamusccaya* Sloka 263 yang mengatakan sebagai berikut.

*yerthā dharmena te labhyā ye 'darmena dhigastu tān,  
dharmam vai śaṣvataṁ loke na jahyādharthakāmṣaya.*

Artinya:

Sebab uang itu, jika *dharma* landasan memperolehnya, laba atau untung namanya; sungguh-sungguh mengalami kesenangan orang yang beroleh uang itu;

akan tetapi jika uang itu diperoleh dengan jalan *a-dharma*, merupakan noda uang itu, dihindari oleh orang yang berbudi utama; oleh karena itu janganlah bertindak menyalahi *dharma* jika anda berusaha menuntut sesuatu.

Jadi, jika mengacu pada ketentuan sloka tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya umat Hindu sangat menghargai uang dan pasar sebagai tempat berputarnya uang. Namun, dalam upaya mencari uang sangat ditekankan agar mencarinya berlandaskan *dharma*. Sebab jika mencari uang berdasarkan cara-cara *a-dharma*, maka uang yang diperoleh tidak akan memberikan berkah bagi keluarga yang menikmatinya. Namun, dalam konteks perluasan ideologi kapitalis, Marx (dalam Darsono, 2006:130) menegaskan bahwa pendewaan uang berkaitan erat dengan sistem kapitalisme yang memosisikan uang sebagai alat sirkulasi, alat pertukaran, satuan nilai, alat penimbun kekayaan, dan sebagai kapital. Sementara umat Hindu berdasarkan ketentuan kitab Sarasamusccaya di atas, memang menghargai uang dan pasar, tetapi dengan penekanan bahwa mencari uang harus senantiasa di dasarkan atas *dharma*, dan bukan atas dasar *a-dharma*. Artinya, menurut Hindu sahsah saja seseorang mencarai harta, uang, atau pun kekayaan, asal mencarinya selalu didasari atas kebenaran, sehingga uang yang didapat memberikan berkah kepada yang mendapatkannya atau dalam istilah Balinya disebut agar uang yang diperoleh itu “*mesari*” (bisa menjadi sumber kehidupan/*amerta*).

### 6.3.2 Perubahan pada Kehidupan Keagamaan

Kehidupan keagamaan dalam konteks ini berisi kepercayaan dan nilai bersama yang bersinggungan dengan

keyakinan akan adanya kekuatan dan kekuasaan atau sesuatu yang bersifat supernatural. Artinya, dalam konteks agama masyarakat menganggap di luar kemampuan dirinya ada kekuatan yang bersifat adikodrati yang langsung atau pun tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Masyarakat Bali, termasuk, masyarakat Pekutatan dilihat dari agama yang dianutnya sebagian besar penduduknya adalah beragama Hindu. Adapun rincian jumlah penduduk di Kecamatan Pekutatan berdasarkan agama adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk yang beragama Hindu sebanyak 25.566 orang yang terdiri atas 12.696 orang laki-laki dan 12.870 orang perempuan; beragama Islam sebanyak 5.286 orang yang terdiri atas 2.628 orang laki-laki dan 2.658 orang perempuan; beragama Kristen sebanyak 59 orang yang terdiri atas 22 orang laki-laki dan 37 orang perempuan; beragama Katolik sebanyak 301 orang yang terdiri atas 148 orang laki-laki dan 153 orang perempuan; beragama Budha sebanyak 3 orang terdiri atas 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, beragama Konghuchu tidak ada, sementara penganut aliran kepercayaan dua orang dan keduanya adalah laki-laki. Jadi, dari 31.217 orang penduduk Kecamatan Pekutatan yang memeluk agama Hindu adalah sebanyak 25.566 orang atau sekitar 81,90% (Profil Kecamatan Pekutatan, 2015:17).

Menurut keyakinan orang Hindu, Tuhan itu bersifat tak terpikirkan (*acintya*), tak berwujud (*impersonal god*), sangat luhur (*trancendent*), dan meresapi serta memenuhi segala-galanya di seluruh jagat raya ini (*wyapi wyapaka*). Oleh karenanya keberadaan Tuhan sangat sulit dibayangkan oleh umat pada umumnya, namun oleh kalangan tertentu, seperti orang-orang *Wipra* atau para Yogi dapat melihat Tuhan dengan mata batinnya melalui *samadhi*. Bagi orang-orang seperti ini, tentu tidak memerlukan sarana apa-apa untuk bisa



berhubungan dengan Tuhan. Namun, sebaliknya bagi orang kebanyakan dibutuhkan sarana untuk melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yakni berupa persembahan yang dalam konteks Hindu disebut *upakara* (Suja, 1999:67).

Pemujaan dalam bentuk persembahan semacam ini sebenarnya didasarkan atas wahyu Tuhan yang tertuang dalam *Bhagavad-Gītā*, IX.26 yang mengatakan sebagai berikut.

‘*patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyāṁ yo me bhaktyā  
prayacchati tad aham bhakti-upahrtam aśnāmi  
prayatātmanah*’

Bhg. IX.26

Artinya:

Kalau seseorang mempersembahkan daun, bunga, buah atau air dengan cinta *bhakti*, Aku akan menerimanya.

Jika mengacu pada isi sloka tersebut, dapatlah dipahami bahwa persembahan atau persembahyangan yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya di Bali senantiasa menggunakan daun, bunga, biji-bijian, dan air. Dalam perkembangannya dapat dipahami pula bahwa masyarakat Hindu di Bali mengenal nilai kearifan lokal yang disebut *desa*, *kala*, dan *patra* yang mengandung arti, tempat, waktu, dan keadaan. Hal inilah kemudian memberikan warna terhadap sarana persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu, sehingga di tiap-tiap daerah bentuk persembahan yang dilakukan umat Hindu sangat bervariasi sesuai *desa*, *kala*, dan *patra* itu sendiri. Ditambah lagi seni yang bersifat religious ikut mewarnai persembahan umat Hindu di Bali, membuat bentuk-bentuk persembahan menjadi semakin bervariasi. Akan tetapi secara

filosofi tetap mengandung makna yang sama sebagaimana ditekankan dalam sloka IX.26 *Bhagavad-Gītā*, sebagaimana disebutkan di atas.

Namun, masuknya modernisasi dan *westernisasi* dalam kehidupan masyarakat Bali tidak saja mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan fisik dan sistem sosial, tetapi juga pada sistem budaya, antara lain pada aspek spiritualitas, yakni spiritualisme modern. Menurut Griffin (2005:15) beberapa aspek yang termasuk ke dalam unsur-unsur atau ciri-ciri spiritualisme modern adalah sikap individualisme, dualisme dikotomik, *futurisme*, dan materialisme atau ekonomisme. Individualisme mengandung arti bahwa dalam konteks spiritualisme modern manusia tidak lagi memahami dirinya dalam konteks komunal, melainkan dalam konteks individualistik. Atau manusia tidak melihat masyarakat atau komunitas sebagai yang utama, dengan individu sebagai produknya, melainkan masyarakat hanya dianggap sebagai kumpulan individu-individu bebas yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya, dualisme dikotomik dalam konteks spiritualisme modern dimaksudkan masyarakat membuat pemilahan yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Misalnya, modern lawan tradisional, seperti sains modern lawan sains tradisional, organisasi modern lawan organisasi tradisional, pertanian modern lawan pertanian tradisional, dan lain sebagainya. Hal menarik dari keberlawanan tersebut bukan pada masalah dikotominya, akan tetapi dalam hal anggapan bahwa yang modern selalu dianggap lebih unggul dari yang tradisional. Hal ini berimplikasi bahwa apapun yang bersifat tradisional harus digusur atau disingkirkan padahal dalam kenyataannya belum tentu yang tradisional kalah dengan yang modern.

Selanjutnya, *futurisme* mengandung arti bahwa spiritualisme modern memiliki kecenderungan menggali hampir semua makna masa kini dalam hubungannya dengan masa depan yang dalam praktiknya melupakan masa lalu, atau selalu menjalin keterikatan dengan segala sesuatu yang baru. Sedangkan sifat materialisme atau ekonomisme mengandung maksud bahwa dalam pandangan spiritualisme modern masyarakat menganggap kebutuhan material adalah kebutuhan yang utama, sedangkan kebutuhan lain, seperti hubungan antarmanusia dipandang sebagai kebutuhan nomor dua.

Dengan demikian dalam pandangan spiritualisme modern cara pandang moral dalam masyarakat telah diganti atau digeser dengan cara pandang ekonomi, sehingga dalam kehidupan masyarakat perolehan kekayaan, dan kemakmuran material merupakan inti kehidupan manusia. Berkenaan dengan ciri-ciri kehidupan masyarakat seperti itu, maka dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, jargon "*mati iba hidup kae*" semakin banyak dianut oleh masyarakat Bali, baik dalam hal melihat eksistensi dirinya maupun eksistensi orang lain. Adanya spiritualisme modern seperti itu, menurut Sutrisno (2004) acapkali berakibat terjadinya *atomisme*, yakni unit-unit sosial dalam masyarakat Bali, seperti, *kuren, dadia, banjar, desa*, dan *subak* yang semula kohesif, menjadi pecah bahkan tercerabut solidaritasnya.

Kemudian pada kenyataannya setiap pecahan unit sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat berkembangnya spiritualisme modern bisa bergerak secara antagonistik, karena didorong oleh kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Artinya, perpecahan yang terjadi pada masyarakat Bali akibat masuknya spiritualisme modern bisa bersifat antagonis. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda bahkan berlawanan satu dengan yang lainnya, setelah unit-unit sosial

mengalami perpecahan. Hal ini diakui oleh Bapak I Wayan Madia (umur 50 tahun) Kelihan Subak Abian Pucak Sari, Desa Pengeragan dengan menyatakan sebagai berikut.

Sekarang kehidupan bermasyarakat lebih banyak diwarnai oleh sifat individual dibandingkan sikap sosial. Misalnya, kalau jaman dulu masih ada istilah minta tolong sama tetangga dalam mengerjakan pekerjaan di ladang atau di sawah. Namun, sekarang hampir semua pekerjaan harus dikerjakan sendiri, dan kalau toh harus minta tolong karena pekerjaannya berat dan banyak, harus diperhitungkan ongkos (dengan sistem upah). Karena jaman sekarang jaman ekonomi, semua harus diukur dengan uang (wawancara, 8 Pebruari 2020).

Berangkat dari pernyataan informan di atas dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa masyarakat jaman sekarang, termasuk di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, kehidupannya telah banyak dipengaruhi oleh kehidupan materialisme. Artinya, orang jaman sekarang semua berlomba-lomba mengejar kekayaan atau materi, karena eksistensi manusia sekarang diukur berdasarkan seberapa besar orang bersangkutan mampu mengumpulkan materi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Atmadja (2010:89) bahwa orang-orang di jaman modern berlomba-lomba mengejar materi atau kekayaan karena eksistensi manusia diukur dari kemamkuran material. Hal demikian menurut Atmadja, dapat menimbulkan masalah, yakni kekosongan makna kehidupan, karena hidup ideal adalah keseimbangan antara kehidupan material dengan kehidupan spiritual, baik yang bersumber pada

kehidupan keagamaan Hindu maupun pada kearifan lokal masyarakat Bali.

### **6.3.3 Perubahan pada Aspek Ilmu Pengetahuan**

Ilmu pengetahuan dimaksud dalam kajian ini adalah serangkaian teknik untuk memperoleh pengetahuan dengan mendasarkan diri pada kegiatan observasi dan pengalaman. Dalam konteks ini teknik tidak saja mencakup teknik dan prosedur untuk menghasilkan pengetahuan, tetapi juga bangunan akumulatif pengetahuan itu sendiri. Berangkat dari pemahaman tentang ilmu pengetahuan di atas, maka dalam konteks penelitian ini ilmu pengetahuan dimaksud adalah ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan bidang pertanian, khususnya pertanian tanaman kering. Dengan meminjam gagasan Chambers (1983:106—118), maka dapat dipahami bahwa masyarakat Bali memiliki pengetahuan dan teknologi tradisional yang disebut “pengetahuan masyarakat pedesaan”, yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Misalnya, masyarakat petani tahu persis kapan saat yang tepat untuk memulai bekerja di ladang, di kebun atau di sawah. Petani juga mengetahui kapan saat yang tepat untuk menanam bibit tanaman agar bisa tumbuh dengan baik. Petani juga tahu tanaman apa yang cocok ditanam di kebun mereka, sesuai dengan jenis tanah, iklim, dan cuaca yang sedang berlangsung di wilayah mereka. Semua ini diketahui oleh para petani melalui tradisi yang diterimanya secara turun-temurun dari para orang tua mereka. Dengan mengacu pada Giddens (2003) tradisi memiliki karakteristik, di antaranya terkait dengan memori kolektif, dan melibatkan ritual sebagai strategi pemertahananya. Oleh karenanya, masyarakat mengikuti tanpa memerlukan pemikiran alternatif, sebab tradisi menyediakan kerangka dasar bertindak yang dianggap benar oleh

masyarakat, sehingga orang tidak perlu mempertanyakannya.

Tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat biasanya memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, dan salah satu unsurnya adalah kearifan tradisional. Menurut Keraf, (2002:289) kearifan tradisional adalah:

Semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas sosiologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis.

Berangkat dari gagasan Kraf tentang kearifan tradisional di atas, maka dalam konteks penelitian ini kearifan tradisional dapat berupa adat kebiasaan yang memedomani hubungan antarmanusia dan bisa pula dalam bentuk kearifan lingkungan, yakni adat kebiasaan yang memedomani hubungan antarmanusia dengan lingkungannya. Berdasarkan data kaneah yang diperoleh selama penelitian di lapangan dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa, masuknya modernisme dalam bidang pertanian di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, berakibat banyak pengetahuan masyarakat, baik dalam bentuk kearifan sosial maupun dalam bentuk kearifan lingkungan telah tergusur. Misalnya, pengetahuan masyarakat tentang sistem *nyakap*, sistem *sekhe*, sistem *menyame beraya* dengan filosofi *sagalak-sagilik*, *salung-lung sabayantaka*

*paras-paros*, *sarpanaya* juga mulai tidak dikenal oleh anak-anak muda di lingkungan masyarakat Pekutatan. Demikian pula mengenai kearifan lingkungan, seperti makna upacara *tumpek bubuh* (*tumpek wariga*) mulai kurang dikenal oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda. Padahal jika dicermati nilai kearifan lingkungan sebagai bentuk pengetahuan tradisional masyarakat Bali, yang terkandung dalam pelaksanaan upacara *tumpek wariga* itu sangat mulia.

Upacara *tumpek wariga* dilaksanakan oleh umat Hindu, khususnya di Bali adalah dalam rangka melakukan *sembah bhakti* kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai *Dewa Sangkara*, yakni dewanya tumbuh-tumbuhan. Pandangan filosofi yang mendasari pelaksanaan upacara ini adalah ‘prinsip memberikan sebelum menikmati’. Jika prinsip ini dicermati secara lebih dalam, ternyata mengandung pemikiran filsafati yang sangat mendalam. Betapa tidak, sebab dalam konteks pelestarian sumber daya hayati, manusia sebelum menikmati hasil-hasil alam, harus melakukan penanaman atau pemeliharaan terlebih dahulu. Demikian halnya dengan pengetahuan tradisional masyarakat Hindu di Bali mengenai pelaksanaan upacara *tumpek kandang* (*tumpek uye*).

Pelaksanaan upacara *tumpek uye* atau *tumpek kandang* yang dilaksanakan setiap *Saniscara Kliwon wuku Uye*, yang jatuhnya setiap 210 hari sekali, secara filsafati mempunyai makna untuk menyatakan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai *Dewa Pasupati*, yakni Dewa pencipta binatang atau hewan-hewan piaraan yang telah memberikan kesejahteraan hidup bagi umat manusia. Selain beberapa pengetahuan tradisional sebagaimana diuraikan di atas, masyarakat Bali juga memiliki keyakinan bahwa tidak boleh melakukan penebangan pohon bambu pada

hari Minggu, pantang menebang kayu untuk bangunan, jika harinya berisi “*was*” (menurut perhitungan kalender Bali, hari “*was*” datang setiap enam hari sekali) menurut perhitungan *sad wara*, dan banyak lagi nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang berkaitan dengan konsep pelestarian lingkungan (Gunadha dan Dharmika, t.t: 2).

Akan tetapi pada kenyataannya di lokasi penelitian ini, berbagai nilai kearifan *lingkungan* yang sesungguhnya sangat *adiluhung* sebagaimana diuraikan di atas, keberadaannya hampir punah. Memang pelaksanaan upacara *tumpek wariga* sebagai manifestasi *rasa bhakti* masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewanya tumbuh-tumbuhan (*Dewa Sangkara*) masih tetap dilaksanakan, termasuk upacara peringatan *tumpek uye* (*tumpek kandang*) sebagai manifestasi rasa sujud manusia Hindu terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai *Dewa Pasupati*, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya sebatas rutinitas, tanpa pemaknaan apa-apa. Sementara larangan menebang pohon bambu pada hari Minggu, pantangan menebang pohon untuk bangunan pada hari yang berisi “*was*” hampir tidak diindahkan lagi oleh masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Pekutatan pada khususnya.

Hal ini dibenarkan oleh Jero Mangku I Nengah Simpang (*Jero Mangku* di Pura Penghulu *Desa Adat Badingkayu*). Di antara berbagai pernyataannya dia berucap:

*Mangkin masyarakate sampun pada maju, napi sane kabaos dresta, pemali, sekadi ten dados ngebah tiying ring rahina redite, ten dados ngebah kayu angiang wewangunan ring rahina sane medaging “was” manut sadwara, tur dresta sane tiosan mangkin makueh sampun ical. Napi mawinan, santukan masyarakate*



*mangkin pada sibuk, ten sempat malih ngerereh padewasan rintajekan jagi ngemargian parikrama.* (Masyarakat sekarang sudah pada maju, dalam melaksanakan berbagai aktivitas sudah tidak lagi memperhitungkan tradisi, seperti adanya larangan menebang bambu pada hari Minggu, menebang pohon untuk bangunan pada hari yang berisi ‘was’, semua itu seakan tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat. Sebab masyarakat sekarang sudah pada sibuk, sehingga tidak sempat lagi mencari hari baik untuk melakukan aktivitas tertentu (wawancara, 8 Pebruari 2020).

Pernyataan senada disampaikan pula oleh Bapak I Nengah Warsa (Kelihan Subak Karya Darma Sari Pulukan) dengan menyatakan sebagai berikut.

Sekarang masyarakat kan sudah maju, oleh karenanya mereka lebih suka beraktivitas atas dasar sikap praktis dibandingkan berdasarkan tradisi kuno. Sebab kalau terlalu berpegang pada tradisi kuno, sulit rasanya maju. Karena tradisi kuno itu banyak pantangan, seperti tidak boleh menebang pohon bambu pada hari Minggu, tidak boleh menebang pohon untuk bangunan pada hari yang berisi ‘was’. Pantangan-pantangan semacam itu, dianggap menghambat, sehingga masyarakat lebih senang hal-hal yang bersifat praktis, dibandingkan yang bersifat tradisi (wawancara, 8 Pebruari 2020).

Berangkat dari pernyataan kedua informan di atas, dan jika ditinjau dari perspektif kritis, maka perilaku masyarakat seperti itu tidak bisa dilepaskan dari adanya tuntutan dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini untuk bersikap (1)

praktis (*practicality*); (2) kerja keras (*workability*); (3) mempunyai nilai uang (*cash value*); (4) personalisme dan dinamisme; (5) menolak kepasrahan (*agresive*); (6) pasti bisa kalau ada kemauan; (7) menjelajah (*achievement status*); (8) alam sebagai objek; (9) sekularisme. Hal ini sejalan dengan filsafat pragmatism yang dikembangkan oleh John Dewey, (2001:23—28) yang mengatakan bahwa pragmatisme adalah filsafat yang mementingkan hal-hal yang bersifat praktis, dan kerja keras yang kriteria utamanya adalah sukses finansial. Melihat perkembangan pemikiran masyarakat seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat saat ini, termasuk masyarakat petani telah dimasuki oleh aliran filsafat pragmatisme. Secara umum aliran filsafat pragmatisme dianggap sebagai pandangan khas Amerika, yakni suatu gerakan filsafat yang lahir dari pola-pola kebudayaan Amerika.

#### **6.3.4 Perubahan Menyangkut Kesenian dan Kesusastraan**

Aspek kesenian dalam komponen sosiokultural adalah bersifat universal, artinya di dalamnya berisi kesan-kesan atau ungkapan-ungkapan simbolik yang mempunyai nilai estetis, emosional, atau intelektual bagi para anggota masyarakat atau bagian dari suatu masyarakat. Demikian halnya aspek kesusastraan juga berisi kesan-kesan atau ungkapan-ungkapan simbolik yang mempunyai nilai estetis, emosional, atau intelektual. Bedanya dengan aspek kesenian adalah jika pada aspek kesenian kesan-kesan atau ungkapan-ungkapan simbolik yang bersifat estetis, emosional, atau intelektual itu lebih bersifat fisik, sementara pada aspek kesusastraan ungkapan-ungkapan tersebut lebih bersifat verbal (baik, lisan maupun tulisan).

Terkait dengan aspek sosiokultural masyarakat manusia, menurut Koentjaraningrat (1984:16--17) ada puluhan

pranata kebudayaan yang kemudian digolongkan ke dalam delapan kelompok pranata sebagai prinsip penggolongan yang didasarkan atas kebutuhan manusia itu sendiri. Namun demikian, menurut Koentjaraningrat penggolongan ini hanya sebagai ilustrasi, sebab pada kenyataannya kebutuhan manusia tentu ada lebih dari delapan kelompok. Adapun pranata-pranata tersebut adalah (1) pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan; (2) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan untuk mata pencaharian hidup; (3) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan; (4) pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia; (5) pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rasa keindahan dan rekreasi; (6) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib; (7) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara; dan (8) pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah manusia, seperti pemeliharaan kecantikan, kesehatan, kebugaran, dan sebagainya.

Jika mengacu pada Koentjaraningrat (1984:16—17) sebagaimana diuraikan di atas, dan jika dikaitkan dengan aspek kesenian dan kesusastraan pada superstruktur ideologis masyarakat, maka dalam konteks kajian ini akan dicoba dianalisis terjadinya pergeseran pranata-pranata kebudayaan berkaitan dengan aspek keindahan dan rekreasi pada masyarakat petani, khususnya di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana akibat masuknya era modernisme ke daerah tersebut. Aspek keindahan dan rekreasi dimaksud dalam konteks ini bisa menyangkut hal-hal seperti seni rupa, seni suara, kesusastraan, dan sebagainya.

Berdasarkan data kancah yang didapat di lokasi penelitian ini, ternyata seni rupa seperti struktur bangunan, bahan material bangunan, dan jenis ornamen yang digunakan pada bangunan-bangunan masyarakat, baik bangunan tempat suci maupun bangunan untuk rumah tinggal juga ikut bergeser, akibat masuknya era modernisme ke wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Misalnya, untuk bangunan pura atau tempat suci lainnya kalau dulu masyarakat Pekutatan tetap memperhitungkan jenis kayu yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan untuk tempat suci, seperti, kayu cempaka, majegau, cendana, dan lain-lain yang diatur secara normatif dalam "*Asta Kosala-Kosali-Asta Bumi*", sekarang hal-hal seperti itu mulai melonggar. Demikian pula untuk bangunan rumah, pada jaman dulu masyarakat di Kecamatan Pekuatan cenderung membuat rumah dengan arsitektur tradisional Bali, kini banyak rumah penduduk yang dibuat dengan gaya arsitektur modern, seperti arsitektur ala Eropa, atau perpaduan arsitektur Bali dengan arsitektur Eropa.

Demikian halnya dengan seni suara, kalau jaman dulu masyarakat Bali yang bersifat komunal agraris, sangat menggemari lagu-lagu atau tembang-tembang yang bernuansa religious magis, seperti tembang *sekar rare*, *sekara alit*, *sekar madya*, bahkan *sekar agung*. Tetapi saat ini terutama anak-anak muda lebih suka mendengarkan lagu-lagu pop, atau lagu-lagu nasional yang dinyanyikan oleh para selebritis ibu kota, karena pengaruh siaran televisi. Berbicara masalah TV Jean Baudrillard (dalam Ibrahim, 2004:90) mengatakan bahwa TV tidak saja menjadi objek tontonan, akan tetapi pada waktu yang sama TV juga bisa menjadi penonton kita. Hal ini mengandung arti bahwa pada saat TV menyiarkan *ivent-ivent* yang lucu, seperti komedian, lawak, dan lain-lain para pemirsa bisa tertawa terbahak-bahak, namun sebaliknya ketika giliran TV

menyiarkan iklan, sinetron, dan film yang menampilkan kehidupan mewah, sementara pemirsa yang menyaksikan tayangan tersebut belum mencapai kondisi yang ditampilkan oleh siaran TV, maka giliran TV lah yang menertawakan kita, bahkan bisa terkesan melecehkan.

Dengan demikian apa yang ditayangkan oleh iklan, dan sinetron di TV, bisa pula dimaknai sebagai teror terhadap para pemirsa TV tersebut. Pasalnya, ketika pemirsa menonton berbagai tawaran iklan, atau menonton glamornya kehidupan para selebritis di TV, sementara dirinya merasa tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membeli barang-barang yang ditawarkan (yang diiklankan), atau tidak mampu mengikuti kemewahan yang ditampilkan oleh para selebritis tersebut, maka pada diri pemirsa akan muncul rasa ketakutan akan ketuaan barang-barang yang dimilikinya atau ketinggalan zaman (Sunardi, 2004). Hal yang menakutkan masyarakat inilah kemudian memberi dorongan yang sangat kuat terhadap keinginan masyarakat untuk membeli sesuatu yang baru, atau sesuatu yang belum dimiliki oleh seseorang seperti yang disaksikannya di layar TV.

Hal inilah yang juga memberi dorongan kuat terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya, dalam bidang seni, terutama menyangkut seni rupa dalam konteks properti, seperti berbagai arsitektur bangunan yang semula memakai arsitektur tradisional Bali, kemudian berubah menjadi arsitektur modern atau perpaduan antara arsitektur tradisional dengan arsitektur modern. Kemudian dalam bidang seni suara, sebelumnya masyarakat sangat gemar mendengarkan lagu-lagu atau tembang-tembang tradisional, seperti *sekar rare*, *sekara alit*, *sekar madia*, bahkan *sekar agung* dengan adanya penampilan para selebritis di TV dan menyenandungkan lagu-lagu nasional bahkan lagu-lagu yang berasal dari dunia Barat, maka

kegemaran masyarakat untuk menikmati seni suara tradisional pun ikut tergusur, atau bergeser.

Hal demikian mengandung arti bahwa kegilaan manusia akan suatu produk baru bermuara pula pada hakikat manusia sebagai mesin hasrat atau jika meminjam istilah Hindu, disebut mesin *kama*. Menurut Deleuze dan Guattari (dalam Piliang, 2003:166) bahwa hasrat manusia selalu berkaitan dengan hasrat akan sesuatu yang lain. Atau dengan bahas lainnya dapat dikatakan bahwa manusia tidak pernah mempunyai hasrat terhadap sesuatu yang sama atau sesuatu yang telah dimiliki.

Berangkat dari beberapa uraian di atas, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa pada masyarakat Bali, khususnya masyarakat Pekutatan, Kabupaten Jembrana, masuknya era modernisme melalui program revolusi hijau ternyata berakibat terjadinya pergeseran budaya, khususnya budaya pertanian subak abian. Perubahan yang terjadi bermula dari perubahan pada aspek infrastruktur material kemudian mempengaruhi pula perubahan pada aspek struktur sosial, dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap perubahan pada aspek superstruktur ideologis (Sanderson, 1993). Akan tetapi dalam konteks kajian ini peneliti tidak menggunakan istilah evolusi sosiokultural, namun istilah yang digunakan adalah perubahan sosiokultural masyarakat.

Hal ini disebabkan istilah evolusi mengandung arti gerakan ke arah "tujuan akhir", sementara perubahan sosiokultural tidak mengarah pada perkembangan "tujuan akhir". Oleh karena itu peneliti dalam melihat terjadinya pergeseran budaya pertanian di subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana lebih memilih istilah perubahan dibandingkan istilah evolusi dengan menekankan terjadinya proses perubahan dari suatu bentuk sosiokultural yang satu ke bentuk sosiokultural yang lainnya. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian tentang hakikat evolusi sosiokultural itu sendiri.

Maksudnya, jika istilah evolusi sosiokultural digunakan, maka kajiannya harus diarahkan pada upaya untuk memahami “pembentangan” atau “perkembangan” sebuah proses di mana sistem sosiokultural mulai menyadari kemungkinan-kemungkinan potensial yang sejak awal melekat di dalam dirinya. Sementara kajian yang dilakukan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada upaya untuk melihat terjadinya pergeseran-pergeseran dari satu bentuk sosiokultural ke bentuk sosiokultural yang lainnya.

**BAB  
VII**

**Implikasi Pergeseran Budaya  
Pertanian Subak Abian Terhadap  
Kehidupan Sosial, Ekonomi, Dan  
Keagamaan Masyarakat  
Kecamatan Pekutatan**

**7.1 Implikasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat**

Secara harafiah implikasi dapat diartikan sebagai keterlibatan, atau keadaan terlibat, akan tetapi tidak dinyatakan secara jelas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:374). Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pada intinya implikasi merupakan dampak atau keterlibatan, baik langsung maupun tidak terhadap sesuatu. Terjadinya pergeseran budaya pertanian akibat masuknya era modernisme ke wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana bukan tidak mungkin dapat berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat petani di



wilayah tersebut. Misalnya, terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat bersangkutan. Sebelum mengkaji implikasi terjadinya pergeseran budaya pertanian terhadap kehidupan sosial masyarakat, ada baiknya dipahami dulu hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Nugroho (2013:1) bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang sering juga disebut *homo socius*, yakni makhluk yang selalu ingin berteman, berkelompok, atau selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya.

Betapa kuatnya esensi manusia sebagai *homo socius* juga tampak pada kehidupan masyarakat Bali, termasuk masyarakat di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam acara rapat (*pesangkepan*) *desa adat* atau *pesangkepan krama subak*. Selain itu, esensi manusia sebagai makhluk *homo socius* tampak juga dari aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas kehidupan, seperti gotong-royong memberihkan jalan, membangun rumah, membuat tempat peribadatan bersama, termasuk aktivitas bertani.

Selain aktivitas sosial dalam melakukan berbagai pekerjaan, manusia sering juga berkumpul-berkumpul di *bale banjar*, di posko siskamling (pos komando sistem keamanan lingkungan) atau di ruang-ruang publik lainnya untuk sekadar bertukar informasi atau sekadar refreking dalam rangka melepas segala kepenatan setelah melakukan berbagai rutinitas masing-masing. Pada era 1960-an pada masyarakat Bali juga dikenal adanya tradisi berkunjung ke rumah tetangga atau ke rumah keluarga lainnya untuk sekadar *ngorte* atau saling bertukar informasi. Namun, belakangan dengan masuknya program revolusi hijau ke wiyah subak di Bali, terlepas dari

berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, juga harus diakui secara umum program tersebut juga telah mampu meningkatkan pendapatan para petani di Bali, termasuk di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Akibatnya, pendapatan para petani semakin meningkat dan kesejahteraan mereka juga ikut meningkat. Hal ini ditandai dengan kemampuan para petani untuk membeli simbol-simbol status sosial, seperti TV, radio, *tape*, *handphone*, sepeda motor, bahkan beberapa di antaranya mampu membeli fasilitas mobil. Adanya peningkatan para petani dalam hal memiliki simbol-simbol status sosial seperti itu, akibat produksi pertanian mereka meningkat, ternyata berimplikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat bersangkutan. Misalnya, jika dulu masyarakat di wilayah subak abian biasa melakukan aktivitas pertanian di ladang atau di kebun dengan sistem tolong-menolong atau gotong-royong, kini telah bergeser ke sistem upah. Demikian pula tradisi ngumpul di *bale banjar*, di posko kamling, atau di ruang-ruang publik lainnya untuk sekadar *ngorte* (bertukar informasi), kini telah bergeser pada tradisi nonton TV di ruang keluarga secara eksklusif.

Bukan hanya itu, tradisi berkunjung ke rumah tetangga atau ke rumah keluarga lainnya juga mulai berkurang, karena masyarakat lebih suka menyaksikan siaran TV di ruang keluarga atau di kamar tidurnya sambil melepas kepenatan setelah melakukan berbagai aktivitas kesehariannya. Kondisi semacam ini tentu berimplikasi pula terhadap kehidupan sosial lainnya, seperti sikap asling *runguang* (saling memperhatikan satu sama lain) bergeser ke sikap permisif dan eksklusif. Kondisi ini diakui oleh I Nyoman Sukama (umur 53 tahun) Kelihan Subak Abian Asahduren dengan mengatakan sebagai berikut.

Sekarang memang jaman sudah berbeda, kalau dulu sewaktu saya masih kecil, masyarakat biasa minta tolong untuk berbagai pekerjaan di ladang atau di kebun dengan sistem tolong-menolong. Sekarang hal itu sudah tidak ada lagi semua jenis pekerjaan harus dikerjakan oleh tenaga buruh. Demikian pula kalau jaman dulu, terutama di sore hari biasa masyarakat ngumpul-ngumpul di *bale banjar* atau di tempat-tempat umum lainnya untuk saling bertukar informasi sambil melepas lelah setelah bekerja seharian di kebun atau di ladang, sekarang hal seperti itu agak jarang terjadi. Hal demikian disebabkan masing-masing keluarga sudah punya hiburan, yakni nonton TV, sambil bercengkrama dengan sesama anggota keluarga (wawancara, 8 Februari 2020).

Hal senada disampaikan pula oleh I Wayan Riasa (umur 50 tahun) Kelihan Subak Pangyangan. Di antara berbagai pernyataannya dia berucap:

Ya sekarang jaman kan sudah maju, jadi malu kalau kita minta tolong kepada tetangga atau keluarga lainnya untuk membantu mengerjakan pekerjaan di ladang, karena sekarang sudah jaman ekonomi. Apa pun jenis pekerjaan di ladang atau di kebun harus dikerjakan dengan sistem upah. Kenapa sebab hasil yang didapat nantinya akan dijual, sementara bagi mereka yang tidak mempunyai ladang atau kebun kan dapat pula kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Dengan cara-cara seperti itu, adil jadinya, bagi para tuan tanah mereka akan mendapat penghasilan yang diperoleh dari hasil kebun yang mereka miliki, sedangkan bagi

masyarakat yang tidak memiliki kebun atau ladang, mereka juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara *meburuh* (wawancara, 8 Pebruari 2020).

Berangkat dari pernyataan ke dua informan di atas, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa terjadinya pergeseran budaya pertanian di wilayah subak abian Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, ternyata berimplikasi terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Misalnya, sistem gotong-royong atau tolong-menolong telah bergeser menjadi sistem upah, kehidupan saling *runguang* berubah menjadi prinsip '*mati iba hidup kae*', demikian pula ritual saling berkunjung ke rumah tetangga untuk sekadar bertukar informasi juga ikut bergeser ke pola hidup eksklusif dengan acara nonton TV di ruang keluarga bersama anggota keluarga inti saja.

Kondisi ini membuat arus informasi dengan berbagai muatan ideologi yang terkandung di dalamnya dengan cepat beredar dari pusat (kota metropolitan) ke daerah-daerah pinggiran, seperti ke kota-kota kecil, bahkan sampai ke plosok-plosok pedesaan. Oleh karena itu, dengan meminjam gagasan Giddens (2003:7) bahwa modernisasi atau globalisasi tidak hanya berkaitan dengan sistem-sistem besar, seperti tatanan keuangan dunia, tetapi juga menyangkut sistem-sistem kecil di pedesaan, seperti tatanan kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk pula tatanan kehidupan masyarakat pedesaan. Atau dengan bahasa lain dapat pula dikatakan bahwa modernisasi atau globalisasi bukan sekadar apa yang ada "di luar sana", terpisah dan jauh dari kehidupan orang per orang. Tetapi juga menyangkut fenomena yang ada "di dalam sini" yang

mempengaruhi aspe-aspek kehidupan masyarakat yang sangat intim dan pribadi.

Adanya pergeseran-pergeseran seperti itu, ternyata berimplikasi sangat luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, masuknya berbagai teknologi modern ke lingkungan masyarakat tani di Kecamatan Pekutatan, selain beberapa implikasi yang telah dijelaskan di atas, ternyata berakibat pula posisi uang telah menjadi kesadaran hidup masyarakat di wilayah subak tersebut. Akibatnya, di lingkungan masyarakat subak terjadilah pasarisasi atau moneterisasi di segala bidang kehidupan, terutama kehidupan bidang pertanian (Atmadja, 2010:16). Akibat lainnya, banyak tradisi atau sistem kehidupan sosial yang berlawanan dengan asas pasarisasi perlahan, tetapi pasti mulai tergusur. Misalnya, tradisi pelayanan kredit sosial lewat asas resiprositas (seperti, *matulungan*, *ngopin*, *maselisi* dan lain-lain) mulai bergeser dan diganti dengan sistem upah.

Terjadinya pergeseran semacam itu dilandasi oleh pemikiran bahwa kredit sosial sebagaimana di uraikan di atas oleh masyarakat dianggap kurang praktis dan kurang ekonomis. Anggapan semacam itu, datangnya baik dari pihak pengguna tenaga maupun dari pihak penyedia tenaga itu sendiri. Bukan hanya itu, asuransi ekonomi seperti meminjam uang (*nyilih pipis*) tanpa bunga semakin langka, bahkan tidak ada sama sekali, karena digantikan dengan sistem kredit formal (seperti Bank, Koprasi, LPD, dan lain-lain) dan sistem kredit informal, misalnya rentenir (Nugroho, 2001). Berdasarkan data kanchah yang didapat di lapangan, ternyata kondisi seperti ini terjadi pula di lokasi penelitian ini. Akibatnya, petani di wilayah subak abian Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana lebih mudah menerima model pertanian kapitalistik dibandingkan model pertanian tradisional, sehingga hal-hal yang tidak dikenal sebelumnya, seperti efisiensi, efektivitas,

kompetisi, dan lain-lain menjadi menyatu dengan kehidupan mereka. Demikian pula formasi sosial ekonomi yang bercorak kapitalistik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka (Fakih, dalam Atmdja, 2010:17). Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergeseran budaya pertanian di subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, akibat masuknya prinsip-prinsip modernisme ke dalam kehidupan petani, berimplikasi sangat luas terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama masyarakat subak di wilayah tersebut.

## **7.2 Implikasi terhadap Kehidupan Ekonomi**

Berbicara soal kehidupan ekonomi, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi manusia sebagai makhluk *homo economicus* atau manusia sebagai insan ekonomis. Dengan mengacu pada gagasan ini, maka manusia sebagai *homo economicus*, dalam menjalani hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari berbagai kebijakan dalam mengelola berbagai sumber daya, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya waktu, termasuk sumber daya uang. Kebijakan dalam proses pengelolaan sumber daya tersebut, bukanlah semata-mata dalam bentuk penetapan rencana, akan tetapi juga berupa pelaksanaan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa kebutuhan keluarga maupun kebutuhan unit-unit sosial lainnya dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil observasi lapangan selama peneliti melakukan penelitian dapat dipahami bahwa secara ekonomi, masuknya teknologi modern ke wilayah subak abian, di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dapat dikatakan berimplikasi positif terhadap perekonomian masyarakat Pekutatan. Dikatakan demikian sebab dengan teknik pertanian

modern, panen bisa dilakukan dua sampai tiga kali per tahun yang sebelumnya cenderung hanya satu kali atau paling banyak dua kali. Hal ini dikatakan oleh Bapak Ketut Sukayadnya (umur 53 tahun) Kelihan Subak Abian Gumrih yang menyatakan:

Dengan adanya teknologi modern dalam bidang pertanian, seperti traktor, bibit unggul, pupuk buatan, dan berbagai teknologi lainnya memang membuat pendapatan para petani menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan proses penggarapan ladang menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih baik hasilnya. Oleh karena itu, saya kira adanya teknologi di bidang pertanian, memberikan dampak positif bagi pendapatan para petani (wawancara, 8 Pebruari 2020).

Dari pernyataan informan tersebut, dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa masuknya teknologi modern di bidang pertanian baik, langsung maupun tidak ternyata membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat petani. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Atmdja (2010:15) bahwa apa pun bentuk teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian, sesuai dengan asas modernitas, yakni nilai kepraktisan dan keekonomisannya selalu menjadi tolok ukur utama. Dalam arti, penerapan teknologi modern itu akan dijalankan oleh para petani jika dalam penerapannya mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi mereka. Sebaliknya, jika penggunaan teknologi modern itu dianggap merugikan para petani secara ekonomi, tentu hal itu tidak akan dijalankan oleh para petani.

Bersamaan dengan penerapan revolusi hijau tersebut, banyak tradisi atau kearifan lokal dalam sistem bercocok tanam

akhirnya tergusur. Kalau pun ada yang bertahan, misalnya tentang upacara daur pertanian, pemaknaanya telah mengalami pendangkalan, yakni pelaksanaan upacara hanya sebatas rutinitas belaka. Meski secara ekonomi, masuknya program revolusi hijau ke areal subak abian di Kecamatan Pekutatan boleh dibilang berimplikasi positif terhadap perekonomian masyarakat, tetapi di sisi lain tanpa disadari telah terjadi dominasi dan hegemoni ilmu dan teknologi modern terhadap pengetahuan dan teknologi tradisional (Giddens, 2005). Akibat semua ini banyak pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergusur, atau setidaknya diadaptasikan, agar nilai kepraktisannya meningkat.

Hal lain yang kurang disadari secara ekonomi oleh para petani adalah bahwa sesungguhnya gejala ini juga membawa implikasi negatif bagi perekonomian masyarakat. Pasalnya, bersamaan dengan masuknya teknologi modern ke wilayah kehidupan bidang pertanian, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh para petani juga semakin besar. Sebab bentuk modal teknologi yang digunakan tidak bisa diproduksi secara swasembada, tetapi harus didapat melalui pasar. Akibat ikutannya, kebutuhan petani akan uang tunai juga menjadi meningkat. Dengan gejala semacam itu, para petani mengalami kesulitan untuk menghindarkan diri dari kapitalisasi di bidang pertanian. Misalnya, tidak jarang petani kemudian menjual produksi pertaniannya dengan sistem *pajeg*, agar bisa mendapatkan uang lebih cepat guna menjaga kelangsungan usaha pertaniannya.

Adanya pergeseran sistem panen, dari upaya memanen sendiri hasil pertaniannya menjadi sistem *pajeg*, telah menimbulkan serangkaian perubahan. Misalnya, dengan sistem *pajeg* mengharuskan para petani menjual hasil pertaniannya secara langsung di kebun mereka, sehingga hasil panen tidak



dalam bentuk, kopi, cengkeh, manggis, dan lain-lain, tetapi telah berbentuk uang tunai. Hal ini diakui oleh Jero Mangku I Nengah Simpang (*Jero Mangku* di Pura Penghulu *Desa Adat Badingkayu*) dengan mengatakan sebagai berikut.

Kalau saya lebih senang menjual hasil kebun langsung di kebun dibandingkan saya memanen sendiri kemudian menjualnya ke pasar. Sebab kalau saya menjual hasil kebun secara langsung jauh lebih mudah dibandingkan memetik, sendiri kemudian menjual ke pasar walaupun hasilnya mungkin bisa lebih mahal. Tetapi repotnya juga bukan main, saya harus membayar buruh untuk memanen hasil kebun saya, kemudian lagi mencari buruh untuk ngangkut ke rumah, mencari buruh lagi untuk membawa ke pasar dan belum lagi harga dimainkan oleh pedagang di pasar. Pokoknya jauh lebih repot dibandingkan dengan cara menjual langsung di kebun, kita tinggal terima uang tunai. Misalnya, untuk kebun manggis, setiap 4 pohon kalau buahnya lagi bagus, bisa dikontrakkan sampai 2,5 juta rupiah untuk satu musim panen, dari pada harus memanen sendiri kemudian menjual sendiri ke pasar sangat untung-untungan. Kalau nasib lagi baik bisa melebihi harga kontrak, tetapi kalau nasib lagi apes bisa ndak laku-laku (wawancara, 8 Pebruari 2020).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa dengan model pemasaran hasil-hasil pertanian dengan sistem *pajeg* berakibat para petani sangat mudah menerima model pertanian kapitalistik, sehingga berbagai nilai modernisme yang tidak dikenal sebelumnya oleh para petani menjadi sangat familiar di

kalangan masyarakat subak, seperti sikap efisiensi, sikap kompetisi, prinsip efektif dan lain-lain. Jika meminjam gagasan Fakih (2000) hal demikian berakibat formasi sosial ekonomi yang bercorak kapitalistik tidak bisa dihindarkan dari kehidupan mereka. Atau jika meminjam gagasan Siva (2005:130) hal ini dapat dipandang sebagai upaya menyatukan para petani di dunia ketiga, termasuk petani Bali ke dalam pasar global. Dengan demikian secara ringkas dapat ditegaskan bahwa keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melembagakan revolusi hijau beserta program-programnya, tidak hanya terlihat dari peningkatan hasil produksi pertanian, tetapi juga dari ketersediaan lahan bagi penyediaan sistem ekonomi kapitalisme global yang merupakan turunan langsung dari era globalisasi.

### **7.3 Implikasi terhadap Kehidupan Keagamaan**

Istilah keagamaan dalam kajian ini mengacu pada kata “agama” yang berarti ajaran (keyakinan). Adapun agama dimaksud sering dihubungkan dengan keyakinan manusia atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*). Selanjutnya dalam konteks agama E.B. Taylor menegaskan bahwa agama adalah “*the faith in spiritual being*” (yakni, kepercayaan terhadap wujud spiritual) (Jamaludin, 2015:66). Berangkat dari pandangan E.B Taylor tentang agama sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa secara terminologi agama merupakan ajaran, petunjuk, yang berisi perintah atau larangan, hukum, dan peraturan yang diyakini oleh masyarakat pendukungnya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa dijadikan rujukan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya dalam konteks kajian ini, keyakinan (agama) dimaksudkan adalah sesuatu yang berisi harapan-harapan bagi orang yang mengklaim dirinya sebagai umat yang beragama. Artinya, dalam konteks agama, praktik beragama (keagamaan) adalah dimensi-dimensi yang menyangkut aktivitas pemujaan, ketaatan, atau dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang mengaku beragama terkait dengan pandangan teologis tertentu yang mengakui kebenaran dari doktrin-doktrin agama yang dianutnya. Jadi, berangkat dari beberapa uraian di atas, yang dimaksud dengan kehidupan keagamaan dalam konteks kajian ini adalah menyangkut, berbagai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat, terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan juga menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya.

Menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, termasuk di dalamnya adalah sikap pemujaan, keyakinan akan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan hukum-hukum yang digariskan oleh agama yang dianut oleh manusia itu sendiri. Kemudian hubungan antarsesama manusia, berisi pengakuan yang sama terhadap harkat dan martabat manusia, keyakinan terhadap keharusan berkata, bersikap, dan berperilaku yang baik terhadap sesama manusia. Sementara hubungan manusia dengan lingkungannya menyangkut, perlakuan manusia terhadap lingkungannya harus mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam ajaran-ajaran agama.

Berdasarkan data kancah yang didapat dari hasil wawancara dan juga dari hasil observasi selama peneliti melakukan pengumpulan data lapangan maka dapat dideskripsikan bahwa masuknya berbagai teknologi modern ke

wilayah subak abian di Kecamatan Pekutatan, ternyata berimplikasi pula terhadap kehidupan keagamaan masyarakat petani setempat. Dalam arti, saat ini nilai-nilai pragmatisme sedikitnya telah masuk ke tataran kehidupan keagamaan masyarakat, yakni kalau di era 1960-an *krama subak* dalam mempersiapkan sarana upacara (*upakara*) dilakukan secara gotong-royong di pura, tetapi sekarang jenis *upakara* (jenis *banten*) yang digunakan dalam proses upacara tersebut dibagi oleh *krama subak* kemudian dikerjakan di rumahnya masing-masing.

Memang dari segi keefektifan lebih efektif dengan sistem seperti itu, tetapi tanpa disadari oleh *krama* dengan sistem seperti sekarang ini ada nilai-nilai yang hilang, yakni nilai kebersamaan. Sebab biasanya dengan mengerjakan sarana upacara secara bersama-sama di pura anggota subak dapat saling bertukar informasi, mengenai berbagai hal. Ketika sistem seperti ini diubah tentu momen-momen untuk sekadar *ngorte* (saling bertukar informasi) di antara *krama subak* menjadi hilang. Hal demikian bukan tidak mungkin dapat mengakibatkan sikap individualisme (mementingkan diri sendiri) di antara *krama subak* menjadi semakin menguat. Meski pun implikasi masuknya teknologi modern ke wilayah subak abian, di Kecamatan Pekutatan belum menyentuh tataran ideologi keagamaan, tetapi pelaksanaan upacara keagamaan tampaknya mulai tersentuh.

Seperti dikatakan oleh Bapak I Wayan Duwita (umur 52 tahun) Perbekel Panggyangan, dengan mengatakan sebagai berikut.

*Yen indik pemargin upacara menawi kantun sekadi sane sampun memargi, sakemaon indik tata carane akidik megeser. Maksud titiang, yen kadi dumunan*

*karma subake mekarya serana upacara, minakadi bebantenan, sami kekaryaning antuk ikrama ring pura. Sakemaon mangkin kekaryan bebantenan punika kekaryaning ring jero soang-soang ikrama subak. Kawentenan pemargi kadi asupnika melarapan antuk pikayun mangde gelisan mekarya, turmaning ikrama subak presida nyambi ngambil kekaryaane dane soang-soang.* (Mengenai pelaksanaan upacara keagamaan di lingkungan subak abian Pangyangan, masih tetap seperti yang dulu-dulu. Memang ada sedikit pergeseran dari segi teknik pelaksanaannya saja, misalnya kalau jaman dulu semua sarana upacara dibuat secara gotongroyong di pura, tetapi sekarang jenis *banten* itu dibagi oleh *krama subak* untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi dalam membuat sarana upacara krama subak tidak lagi mengerjakannya di pura tetapi secara individual di rumahnya masing-masing. Hal ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa dengan mengerjakan sarana upacara di rumahnya masing-masing dia bisa mengerjakan sarana upacara untuk di pura sekaligus mengerjakan beberapa pekerjaan keluarganya (wawancara, 16 Pebruari 2020).

Berangkat dari pernyataan informan di atas, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa masyarakat petani di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan telah terjerat oleh pola pemikiran *McDonaldisasi* (Ritzer, 2002). Gejala ini mengandung arti bahwa terjeratnya masyarakat, termasuk masyarakat petani di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, terhadap pola-pola pemikiran *McDonaldisasi*, ternyata berimplikasi pula terhadap kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Hal ini terbukti, pola-pola kehidupan

instan ala restoran waralaba *McDonald's* ternyata ditransformasikan pula dalam kehidupan keagamaan oleh masyarakat subak, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Hal demikian terlihat dari peralatan ritual yang digunakan oleh masyarakat petani Pekutatan dalam konteks kekinian. Pada jaman dulu, masyarakat cenderung mempersembahkan berbagai sarana upacara sesuai situasi dan kondisi yang ada, misalnya mereka mempersembahkan buah-buahan, bunga-bunga, dan lain-lain sesuai dengan yang mereka hasilkan dari kebun mereka sendiri. Tetapi di era sekarang ada kecenderungan masyarakat Bali merasa gengsi, jika mempersembahkan buah-buahan, jajan, dan bunga-bunga yang bersifat lokal. Mereka lebih suka mempersembahkan berbagai buah, jajan, bunga, dan lain-lain yang mereka bisa dapati dengan cara membeli di pasar, dan cenderung yang bernuansa import. Akibatnya, masyarakat Bali, termasuk masyarakat di wilayah subak abian Pekutatan, merasa sangat keteragntungan pada sistem ekonomi kapitalisme global (Atmadja, 2010:114).

Hal ini dapat dilihat dari hasil studi yang dilakukan oleh salah seorang dosen Pertanian Universitas Udayana, sebagaimana dikutip Wiana (2005) bahwa umat Hindu di Bali mengimpor sarana upacara untuk sehari-hari di luar upacara *ngodalin* dan hari raya, mencapai harga satu triliun enam ratus juta rupiah per tahun. Sementara untuk buah-buahan, masyarakat Bali cenderung suka mempersembahkan buah impor, baik kepada Tuhan, kepada para Dewa, maupun kepada Roh Leluhurnya. Hal ini berakibat, kebutuhan buah impor untuk keperluan upacara keagamaan di Bali cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2003 impor buah mencapai angka 294.124 dolar AS, kemudian meningkat menjadi 367.098 dolar AS per tahun 2004,

meningkat lagi di tahun 2005 menjadi 438.000 dolar (Laporan Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Bali, Bank Indonesia Denpasar dalam Harian Bali Post, Sabtu, 14 Januari 2006).

Kegemaran orang Bali mengonsumsi buah-buahan impor membuat buah-buahan lokal atau hasil produksi pertanian lainnya menjadi terpinggirkan. Hal demikian kemudian menjadi dialektika bagi kehidupan masyarakat petani pedesaan. Dalam arti, petani pedesaan mempunyai lahan sebagai tempat membudidayakan berbagai buah-buahan, seperti pisang, jambu, rambutan, manggis, dan lain-lain, sementara di sisi lain buah-buahan lokal sebagaimana diuraikan di atas kurang diminati oleh masyarakat Bali, baik untuk dikonsumsi maupun untuk persembahan. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan buah-buahan pemerintah melakukan impor buah, seperti apel, peer, jeruk, dan lain-lain.

Demikian halnya dengan janur (*busung*) sebagai sarana utama pembuatan sarana upacara keagamaan (berupa *reringgitan*), masyarakat Bali harus mendatangkan dari Banyuwangi. Padahal Jembarana, banyak memiliki pohon kelapa sebagai komoditas pertanian, khususnya di subak abian, Pekutatan. Pasalnya, orang yang berani memanjat pohon kelapa untuk mencari janur sangat langka, bahkan kalau toh ada harganya juga sangat mahal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak I Negah Warsa (umur, 54 tahun) Perbekel Desa Pulukan sebagai berikut.

Memang di wilayah subak kami banyak ada pohon kelapa, tetapi orang yang berani memanjat pohon kelapa guna mencari janur sangat jarang. Selain sulit mencari tukang panjat, waktu yang diperlukan juga cukup lama, maka masyarakat kami lebih suka

membeli janur di pasar, karena selain lebih cepat, mereka juga lebih praktis bisa mendapatkannya, dibandingkan harus mencari tukang panjat toh juga ujung-ujungnya keluar uang (wawancara, 16 Pebruari 2020).

Mencermati pernyataan informan di atas, maka dapat dikembangkan sebuah pemahaman bahwa modernisasi yang menuntut nilai-nilai pragmatis, efektif, dan efisien secara langsung atau pun tidak, ternyata berimplikasi terhadap kesukaan masyarakat Bali untuk membeli bahan-bahan kebutuhan upacara di pasar, dibandingkan harus repot-repot mencari di kebunnya sendiri. Terkait dengan sikap pragmatisme masyarakat seperti itu, membuat berbagai nilai kearifan lokal terkait dengan sistem upacara (sistem ritual) keagamaan menjadi ikut tergeser. Misalnya, dalam upacara kematian, kalau jaman dulu ada orang meninggal para kerabat atau tetangga yang datang menenggok cenderung membantu dengan membawakan berbagai hasil bumi atau peralatan yang mereka miliki, tetapi sekarang ada kecenderungan kebiasaan seperti itu telah bergeser, di mana kerabat atau tetangga yang datang ke rumah orang yang mempunyai kematian cenderung membantunya dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam amplop, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah, lebih praktis, dan dengan uang yang diberikan, mereka yang mempunyai kematian bisa membeli apapun yang dibutuhkan terkait upacara yang dilaksanakan. Jadi, masuknya teknologi pertanian ke wilayah subak abian, di Kecamatan Pekutatan, ternyata berimplikasi pula terhadap kehidupan keagamaan masyarakat bersangkutan.



#### 7.4 Implikasi terhadap Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan dalam konteks kajian ini adalah sistem kekeluargaan yang digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bali dalam menentukan garis keterunan dalam proses penerusan tradisi dalam keluarga masyarakat bersangkutan. Jika mengacu pada teori evolusi keluarga yang dikembangkan oleh Bachopen dalam bukunya ‘*Das Mutter Recht*’ (1861), sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa keluarga manusia di seluruh dunia berkembang melalui empat tingkat evolusi. Adapun tingkatan evolusi keluarga manusia menurut Bachopen adalah sebagai berikut. Tahap *pertama*, disebut masa *promiskuitas*, tahap kedua adalah *matriarchate*, tahap ketiga adalah tahap *patriarchate*, dan tahap keempat adalah apa yang disebut tahap *parental*.

Namun, masuknya teknologi modern sebagai akibat berkembangnya peradaban manusia saat ini, berbagai sistem sosial, sistem budaya, dan juga berbagai artepak sebagai wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat juga ikut tersentuh. Misalnya, dalam sistem kekerabatan yang dulunya murni mengacu pada garis keturunan selalu ditarik melalui garis laki-laki (*purusa*) berdasarkan garis lurus, kini mulai mengalami sedikit pergeseran. Berdasarkan data kaneah yang diperoleh dari lokasi penelitian ini dapat dipahami bahwa masyarakat Pekutatan tidak lagi murni menganut sistem kekerabatan *patriarchi* terutama dalam kaitannya dengan sistem pewarisan. Artinya, pada jaman dulu masyarakat Pekutatan dalam hal sistem pewarisan tidak memberikan hak sama sekali atas harta yang dimiliki oleh keluarga terhadap anak perempuannya setelah mereka menikah.

Demikian pula dalam hal menikmati pendidikan, anak laki-laki di lingkungan keluarga selalu mendapat sekala

prioritas untuk menikmati pendidikan formal. Artinya, pada jaman dulu anak perempuan dalam keluarga masyarakat Bali baru diberikan kesempatan menikmati pendidikan formal yang tinggi, jika keluarga masih mempunyai kemampuan ekonomi, setelah semua anak laki-lakinya mendapat sekala prioritas. Namun, saat ini dalam hal menikmati pendidikan tidak lagi dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan asal mereka mempunyai kemauan dan kemampuan secara akademik pihak keluarga senantiasa memberikan ruang yang sama terhadap anak perempuannya untuk menikmati pendidikan formal yang setinggi-tingginya. Hal demikian membuktikan bahwa masuknya pengetahuan dan teknologi modern ke wilayah subak abian di Kecamatan Pekutatan, berimplikasi pula terhadap sistem kekerabatan masyarakat di sana. Hal ini dikarenakan masuknya teknologi, khususnya teknologi informasi membuat transformasi budaya berlangsung begitu cepat dan luas. Artinya, dengan media komunikasi seperti TV, surat kabar, majalah, dan media sosial lainnya, seperti HP membuat komunikasi antar umat manusia di muka bumi ini menjadi semakin intensif. Canggihnya media komunikasi yang berhasil diciptakan oleh manusia saat ini, membuat berbagai informasi dengan mudah dapat menyebar ke seluruh plosok negeri ini, termasuk ke daerah-daerah pedesaan.

Oleh karenanya, berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di belahan dunia sana dengan cepat dan mudah dapat diketahui dan diterima di belahan dunia sini. Padahal tanpa disadari berbagai informasi yang disajikan oleh media kebudayaan tersebut, bukan tidak mungkin mengandung suatu ideologi. Menurut Noorman, (2003) apa pun bentuk pesan yang disampaikan oleh media komunikasi kebudayaan, pada dasarnya merupakan konstruksi yang mengandung suatu ideologi, kepentingan, dan niat untuk memperoleh keuntungan

atau pun kekuasaan. Namun, dalam realiasnya ideologi, kepentingan, atau pun niat untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan, tidaklah tampak secara nyata. Akan tetapi tersembunyi di balik pesan yang di sampaikan melalui media komunikasi kebudayaan tersebut.

Secara ideologis apa pun bentuk tayangan yang ditampilkan media komunikasi kebudayaan tersebut, terutama tayangan iklan pasti mengandung ideologi. Ada pun ideologi yang tersembunyi di balik tayang iklan di TV, di surat kabar, majalah, dan lain-lainnya adalah ideologi pasar, yakni berisi bujukan atau menanamkan gagasan bahwa pasar adalah penyelamat kehidupan manusia. Berangkat dari keyakinan masyarakat terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh media komunikasi kebudayaan tersebut, maka apa pun bentuk informasi yang ditayangkan sering kali diterima begitu saja oleh masyarakat tanpa dicerna secara matang. Akibatnya, banyak nilai-nilai modernitas yang ditayangkan lewat media massa diterima begitu saja oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran, yang kemudian hal inilah yang menyebabkan tergesernya berbagai nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang jaman dulu dipandang sebagai barometer ketinggian nilai, namun kini telah dicampakan begitu saja. Misalnya, prinsip suka menabung sebelum membeli sesuatu barang sebagai upaya pengendalian diri yang merupakan salah satu sikap asketisme juga ikut bergeser ke sistem pembelian barang dengan cara mencicil.

Pada hal mentalitas asketis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan agama Hindu yang dianut sebagian besar masyarakat Bali, dan juga anutan agama-agama lainnya di dunia. Menurut Turner (dalam Atmadja, 2010:111) agama-agama dunia sangat menekankan pengendalian tubuh, termasuk di dalamnya hawa nafsu. Gagasan ini sesungguhnya

telah ditekankan dalam ajaran Hindu, terutama di Bali, termasuk di Kabupaten Jembrana yang menekankan pengendalian *kama*, nafus, hasrat, atau keinginan. Akan tetapi pada kenyataannya, setelah masuknya arus modernisme ke dalam kehidupan masyarakat Bali, melalui media komunikasi kebudayaan, akhirnya berbagai nilai kearifan lokal yang dulunya kental mewarnai kehidupan kekerabatan masyarakat Bali akhirnya banyak pula yang bergeser. Berangkat dari uraian di atas, maka dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa, masuknya arus modernisasi ke dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali, ternyata berimplikasi pula terhadap sistem kekerabatan masyarakat Bali itu sendiri.

## **BAB VIII**

### **Penutup**

Dengan mengacu pada uraian pada Bab-Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. *Pertama*, terjadinya pergeseran budaya pertanian di subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, faktor modernisme, faktor ideologi, perubahan zaman dari pramodern menuju ke era modern, orientasi pembangunan di bidang ekonomi, dan faktor pengetahuan dan teknologi. Masuknya arus modernisme ke Indonesia, kemudian menjalar sampai ke plosok-plosok pedesaan, telah mengakibatkan berbagai nilai tradisional tergeser, bahkan tersingkirkan oleh nilai-nilai modernisme itu sendiri. Selain faktor modernisme, faktor ideologis juga tidak kalah pentingnya sebagai faktor penyebab bergesernya nilai-nilai budaya subak abian di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Di samping itu, pengaruh perkembangan zaman dari era pramodern menuju ke era modern, orientasi pembangunan bidang ekonomi, serta pengetahuan dan teknologi juga ikut mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya pertanian

di subak abian menuju nilai-nilai modern. Kelima faktor tersebut bekerja secara siltultan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (*interdevendence*). Namun, pada kenyataannya masyarakat petani di Kecamatan Pekutatan dapat menerima kondisi seperti ini, karena mereka telah terbius secara ideologis. Hal ini bisa terjadi karena kecerdikan orang-orang Barat yang dalam hal ini orang-orang Belanda dalam memainkan modal pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki.

*Kedua*, terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya pertanian di lingkungan subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. Pergeseran itu terjadi mulai dari berubahnya aspek infrastruktur material, kemudian mempengaruhi perubahan pada aspek struktur sosial, dan pada akhirnya mempengaruhi pula terjadinya perubahan pada aspek superstruktur ideologis. Aspek infrastruktur material berisi bahan-bahan baku berupa bentuk-bentuk sosial dasar terkait dengan upaya manusia untuk mempertahankan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun unsur-unsur sosial dasar dimaksud meliputi, bidang teknologi, ekonomi, ekologi, dan demografi. Disebut bahan-bahan baku sosial dasar, sebab tanpa komponen-komponen tersebut, manusia tidak akan mungkin bisa bertahan hidup. Selanjutnya, aspek struktur sosial berisi pola-pola kehidupan sosial yang teratur yang biasa digunakan di kalangan anggota masyarakat. Pada aspek struktur sosial, tercakup di dalamnya adalah ada tidaknya kelompok-kelompok yang tidak sama kekayaan dan kekuasaanya. Ada atau tidaknya startifikasi etnis dan rasial, dalam arti ada atau tidaknya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mungkin dibedakan berdasarkan karakteristik rasial atau etnis. Selanjutnya sistem kepolitikan, merujuk pada cara-cara terorganisirnya sebuah masyarakat,

terutama dalam memelihara hukum dan aturan internal. Sedangkan aspek superstruktur ideologis berisi komponen-komponen ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya pergeseran budaya pertanian di subak abian, Kecamatan pekuatatan, Kabupaten Jembrana cenderung dimulai dari perubahan pada aspek infrastruktur material, kemudian mempengaruhi perubahan pada aspek struktur sosial, dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap perubahan superstruktur ideologis.

*Ketiga*, terjadinya pergeseran budaya pertanian dari budaya pertanian tradisional ke budaya pertanian modern di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana ternyata berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, di antaranya terhadap kehidupan sosial, kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi, dan termasuk pada sistem kekerabatan masyarakat Pekuatatan. Implikasi terhadap kehidupan sosial meliputi hilangnya budaya gotong-royong dan tolong-menolong dalam kehidupan pertanian dan diganti dengan sistem upah. Implikasi terhadap kehidupan ekonomi, masuknya pengetahuan dan teknologi modern ke dalam kehidupan pertanian *krama subak* di wilayah subak abian, Kecamatan Pekutatan secara langsung atau pun tidak berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat Pekutatan. Hal ini ditandai dengan berubahnya pola kehidupan masyarakat, gaya hidup, dan pola konsumsi masyarakat Pekutatan. Selain terhadap aspek-aspek tersebut, bergesernya budaya pertanian di lingkungan subak abian di Kecamatan Pekutatan juga berimplikasi terhadap kehidupan keagamaan, dan sistem kekerabatan masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari teknik pelaksanaan upacara, terutama dalam hal pembuatan sarana upacara yang semula dikerjakan secara gotong-royong di pura,

kini pekerjaan itu dikerjakan di rumah anggota subak masing-masing. Dalam hal kekerabatan bergesernya budaya pertanian di lingkungan subak abian, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, berimplikasi pula terhadap sistem kekerabatan masyarakat setempat, di mana sebelumnya biasa ditemui ritual berkunjung ke rumah tetangga atau kerabat dekat untuk sekadar bertukar informasi, sambil melepas lelah setelah melakukan rutinitas keseharian di ladang atau di kebun, kini telah bergeser ke ritual nonton TV di ruang keluarga bersama anggota keluarga inti. Selain itu, tradisi ngumpul di ruang-ruang publik seperti di *bale banjar*, di warung kopi, dan di tempat-tempat umum lainnya untuk sekadar *ngorte* (bertukar informasi) juga keberadaanya sudah semakin langka, jika tidak mau disebut telah hilang.



## Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu, H. 1991. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alimi, Moh., Yasir, 2004. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial. Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Althusser Lois, 1984. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. (Olsy Vinoli Arnof, terj.) Yogyakarta: Jalasutra.
- Antlov, H., 2002. *Negara dalam Desa Patronase Kepemimpinan Lokal*. (Pujo Semadi, terj.) Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Artha Wiguna Alit, Ni Wayan Tatik Inggriati, I Ketut Suda, Euis Dewi Yuliana, I
- Wayan Kastawan, 2018. *Jasa Lingkungan Budaya dan Sistem Subak di Bali*. Denpasar: Kerja sama Yayasan Somia Pertiwi Bali dengan Fauna dan Flora International United Kingdom dan Unhi Press.
- Atmadja, Nengah Bawa, 2005. *Joged Bumbung Porno: Industri Seks Berbentuk Hiburan Seks Melalui Pandangan Mata (Studi Kasus di Buleleng, Bali)*. Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- , 2010. *Ajeg Bali, Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- , 2010a. *Komodifikasi Tubuh Perempuan Joged ‘Ngebor’ Bali*. Denpasar: Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana bekerjasama dengan Pustaka Larasan.

- A.W. Widjaja, 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, (Sebuah Tinjauan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Statistik Kabupaten Jembrana, 2019. *Kecamatan Pekutatan dalam Angka*.
- Bagus, I G N, 1995. "Kebudayaan Bali". Dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (oleh Koentjaraningrat) Jakarta: Jambatan, hal. 286—306.
- Budiana, I Nyoman, 1995. *Aspek Sosiologis Sistem Kewarisan Hindu, Suatu Studi tentang Perilaku Pembagian Harta Kekayaan dalam Sistem Kewarisan Hindu di Bali*. Hasil penelitian disampaikan pada Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
- Burhanuddin Salam, 1988. *Logika Formal (Filsafat Berpikir)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Chambers, R., 1983. *Pembangunan desa Mulai dari Belakang*. (Pepe S., Sudradjat, terj.). Jakarta: LP3ES.
- Darsono, P., 2006. *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*. Jakarta Diadit Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewey John, 2001. *Agama Pragmatis Telaah Atas Konspesi Agama John Dewey*. Magelang: Indonesiatra.
- Dharmika, Bagus, 2019. *Paradoks Bali, Agama, Budaya, dan Kekerasan Hutan*. Denpasar, PT. Japa Widya Duta.
- Dove, M.R., 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. (YAI, Trj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dwipayana, A. A.G.N Ary. 2001. *Kelas dan Kasta Pergulatan Kelas Menengah di Bali*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

- Fakih, Mansour 2000. ‘‘Tinjauan Kritis terhadap Revolusi Hijau’’. Dadang Yuliantara (ed.) *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat Emansipasi, dan Demokrasi Mulai Dari Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- , 2004. *Bebasa dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: INSIST Press Printing.
- Fokus Media, 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Fokus Media.
- Geertz, Clifford, 1977. *Penjaja dan Raja Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. (R, Soepomo, terj.). Jakarta: PT. Gramedia.
- , 1999. *After the Fect Dua Negeri, Empat Dasa Warsa Satu Antropolog*. (Landung Simatupang, terj.). Yogyakarta: LKiS.
- , 2000. *Abangan, Santri, dalam Masyarakat Jawa*. (Aswab Mahasin, trj.). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Giddens, Antony, 2003. *Masyarakat Post Tradisional*. (Ali Noer Zaman, terj.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- 2005. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas* (Nurhadi, terj.) Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Griffin, D.R., 2005. ‘‘Pendahuluan Spiritualisme dan Postmodern’’. David Ray Griffin (ed.) *Visi-Visi Postmodern Spirituaitas dan Masyarakat*. (A. Gunawan Admiranto, terj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Gunadha, I.B dan Ida Bagus Dharmika, t.t. Kerangka Konseptual Hindu Mengenai Hubungan Timbal Balik antara Manusia dan Lingkungan. Makalah Diseminarkan dalam seminar nasional ‘‘Nilai-Nilai Agama dan Kebudayaan dalam Pelestarian Lingkungan

- Hidup''. Kerja sama DPD RI dengan LP 2 M Universitas hindu Indonesia, Denpasar.
- Hatta, Mohamad, 1979. *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta: Mutiara.
- Hertz, N. 2004. *Kapitalisme Global dan Kematian Demokrasi Membunuh Atas Nama Kebebasan The Silen Take Over*. (Dindin Salahuddin, trj.). Bandung: Nuasan
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pergeseran>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanian>
- <https://www.google.com>
- <https://nasional.compas.com>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pekutatan,\\_Jembrana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekutatan,_Jembrana)
- Ibrahim, I.S. 2004. *Sinarnya Komunikasi Empatik; Krisis Budaya Komunikasi dalam Masyarakat Kontemporer*. Bandung: PustakaBani Quraisy.
- Imron, Ali, 2008. *Kebijaksanaan Pendidikan: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi AKSara.
- Jamaludin, Nasrullah Adon, 2015. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pustaka setia.
- Jauss, Hans Robert, 1983. *Toward an Aesthetik of Reception*. University of Minesotta Press: Minnia Polis.
- Kadjeng, I Nyoman, dkk. 1997. *Sarasamusccaya dengan Teks Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno*. Surabaya: Paramita.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2001. *Bahan Informasi Gender-Modul*. Jakarta: hal. 6
- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kraf, A.S, 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas.

- Kurniawan, E., 1999. *Pramoedia Anantatoer dan Sastra, Realisme Sosialis*. Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia.
- Kutha Ratna, Nyoman, 2005. *Sastra dan Cultural Studies Refresentasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lauer, R.H., 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. (Alimandan, terj.) Jakarta: Bina Aksara.
- Lenski, Gerhad E., 1970. *Human Societies: AMarcolelevel Introduction to Sociology*. New York: McGRaw-Hill.
- Lull, J. 1998. *Media Komunikasi Kebudayaan Suatu Pendekatan Global*. (A. Setiawan Abadi, terj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maguire, D.C., 2000. *Energi Suci Kerja Sama Agama-agama untuk Menyelamatkan Masa Depan Manusia dan Duni* (Ali Nur Zaman terj.). Yogyakarta: Pohon Sukma.
- Maliki, Zainuddin, 1999. *Penaklukan Negara Atas Rakyat, Studi Resistensi Petani Berbasis Religio Politik Santri terhadap Negaranisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Martyn J. Lee, 2006. *Budaya Konsumen Terlahir Kembali, Arah Baru Modernitas dalam Kajian Modal, konsumen dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Martono, Nanang, 2015. *Metode Penelitian Sosial, Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Montero, M. 2005. "Psikologi Politik: Suatu Perspektif Kritis". Dalam D. Fox dan I. Prilleltensky ed., *Psikologi Kritis Metaanalisis Psikologi Kritis*. (A. Chusairi dan I.L. Alfian terj.). Bandung: Mizan Media Utama.
- Nugroho, Heru, 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- Nugroho, Riant, 2008. *Gender dan Pengarusutaman Gender di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Wahyu, Budi, 2013. *Orang Lain adalah Neraka (Sosiologi Eksistensialisme Jean Paul Sartre)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurrochmant, Dodik Ridho. 2005. *Strategi Pengelolaan Hutan Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Om Viṣṇupāda A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1986. *Bhagavad-Gītā Menurut Aslinya*.
- Piliang, Yasraf Amir, 2004. *Dunia yang Dilipat, Tamsya Melampauai Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pitana, I Gede. 1994. ‘‘Desa Adat dalam Arus Modernisasi’’ (Dalam Pitana, (ed.) *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: PT. Bali Post. Profil Kecamatan Pekutatan, 2015
- Pudja, G. dan Tjok Rai Sudhartha, 2010. *Manwa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita
- Rich, B. 1999. *Menggadaikan Bumi Bank Dunia Pemikiran Lingkungan dan Krisis Pembangunan*. (AS Burhan dan Benu Hidayat, terj.). Jakarta: INFID.
- Ritzer, George, 2002. *Ketika Kapitalisme Berjingkran, Telaah Kritis terhadap Gelombang McDonaldisasi (Solchin Didik, P. Yuwono, terj.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer G. dan Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Modern*. (Alimandan, terj.) Jakarta: Prenada Media.
- Sanderson, K Stephen, 1993. *Sosiologi Makro, sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali.

- Satori, Djam'an. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sendratari, Luh Putu, 2016. *Membongkar Jaring Kuasa, Kekerasan, dan Resistensi di Balik Perkawinan Ngemaduang (Poligami)*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sianipar, G.J., 2005. "Tubuh dan Kesadaran dalam BudayaImajinasi Penafsiran atas Budaya Masyarakat yang Diserbu oleh Teknologi dan Media Komunikasi". Dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto *ed.*, *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, Hl. 295—312.
- Shiva V. dan M.Mies 2005. *Ecofeminisme Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. (Kelik Isamunanto dan Lilik, terj.). Yogyakarta: IRE Press.
- Soelaiman M. Munandar, 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stager, M. 2005. *Globalisasi Bangkitnya Ideologi Pasar*. (Heru, Prasetya, terj.).Yogyakarta: Lafadi Pustaka.
- Suda, I Ketut 1999. Keterlibatan Anak-Anak Usia Sekolah dalam Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga: studi Kasus di Desa kedisan, Tegallalang, Gianyar. Tesis disampaikan pada Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana, Denpasar.
- 2008. *Anak dalam Pergulatan Industri Kecil dan Rumah Tangga di Bali*. Yogyakarta: Aksara Indonesia.
- 2019. Penanggulangan Sampah Plastik pada Upacara Piodalan di Pura Besakih (Perspektif osio-ekologis). Denpasar: UNHI Press.
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabetta.

- Suja, I Wayan, 1999. *Tafsir Keliru terhadap Hindu, Tanggapan untuk Dr. A.G, Honig, J.R.* Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Sunardi, St., 2004. *Semiotika Negativa.* Yogyakarta: Buku Baik.
- Suparlan, P., 1986. "Manusia Indonesia; Individu, Keluarga, dan Masyarakat Topik-Topik Kumpulan Bahan Bacaan Ilmu Sosial Dasar". (Dalam *Perubahan Sosial.* A.W. Widjaja (ed.), Jakarta: Aksara Presindo).
- Sutopo, H.B 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori, dan Terapannya dalam Penelitian.* Surakarta: Sebelas Maret University Perss.
- Suriasumanteri, Jujun.,S.2003. *Ilmu dalam Perspektif, Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutrisno, M. 2004. "Agama, Harkat Manusia dan Modernisasi" Dalam elga Sarapung, Nugroho Agung, dan Alfred B. Jogoena ed., *Dialog, Kriktik dan Identitas Agama.* Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei. Hal. 227—233.
- Svalastoga, K. 1989. *Difrensiasi Sosial.* (Alimandan, terj.) Jakarta: Bina Aksara.
- Sztompka, P. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial.* (Alimandan, terj.) Jakarta: Prenada.
- Takwin, B. 2003. *Akar-Akar Ideologi.* Yogyakarta: Jalasutra.
- Thompson, B. John, 2007. *Analisis Ideologi Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia.* (Hqqul Yaqin, terj).Yogyakarta: IRCiSoD
- Wahab, Solichin, Abdul, 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.



- Wijaya, A.W. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Windia dan Wiguna A.A. 2012. *Subak Warisan Budaya Dunia*. Udayana University Press.
- Wiguna, A.A dan Kaler Surata. 2008. *Multi Fungsi Sistem Subak dalam Pembangunan Pariwisata di Bali*. Yogyakarta: Aksara Indonesia.
- Van, Baal, 1988. *Sejarah dan Perumbuhan Teori Antropologi Budaya (hingga Dekade 1970-an) Jilid 2*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Zamroni, 1992. *Pengantar Pengembangan Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

ISBN 978-623-7963-19-6



9

786237

963196